

LKiP 2016

Laporan Kinerja Kementerian BUMN





RINI M. SOEMARNO | MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

KATA PENGANTAR

Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Bersama ini kami sajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian BUMN tahun 2016, sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan, serta laporan kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian BUMN dalam periode Tahun Anggaran 2016.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kementerian BUMN. Sangat disadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai Kementerian BUMN.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan Kementerian BUMN dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan program dan kegiatannya di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.



RINI M. SOEMARNO

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

RINGKASAN EKSEKUTIF

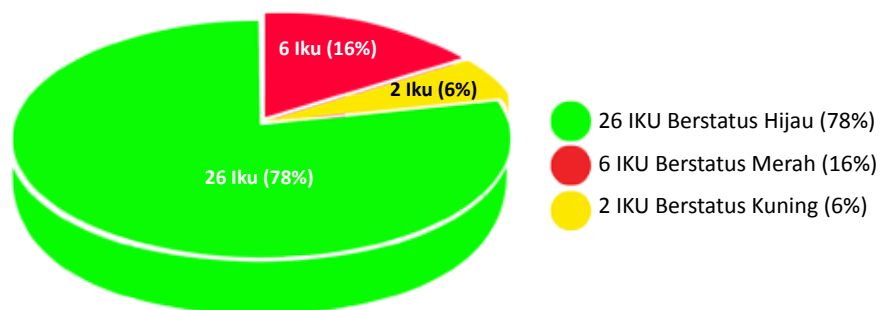
Visi Kementerian BUMN adalah “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN”. Dalam mencapai visi tersebut Kementerian BUMN sebagai Kementerian Pembina BUMN melaksanakan pembinaan BUMN secara transparan dan akuntabel, yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian BUMN menetapkan misi yaitu (1) Mewujudkan organisasi yang modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (2) Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional dan internasional (3) meningkatkan kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut disusunlah Peta Strategi Kementerian BUMN berdasarkan metodologi balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal business process dan Learning and Growth. Peta strategi tersebut terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis bagian dari Stakeholders Perspective, 2 (dua) sasaran strategis bagian dari Customer Perspective, 3 (tiga) sasaran strategis bagian dari Internal Business Process Perspective dan 5 (lima) sasaran strategis bagian dari Learning and Growth Perspective. Sasaran- sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) terwujudnya BUMN sebagai agent of development yang besar, kuat dan lincah; (2) Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN; (3) Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap Kebijakan Kementerian BUMN; (4) Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif; (5) Pembinaan BUMN yang optima; (6) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif; (7) Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional; (8) Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern; (9) Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih; (10) Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses; (11) Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel.

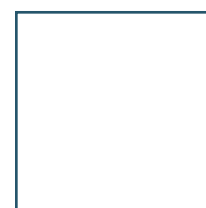
Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Penetapan Kinerja (PK). Pada tahun 2016 Kementerian BUMN telah menghasilkan 37 IKU yang merupakan komitmen kerja Menteri BUMN. Beberapa isu strategis pada tahun 2016 yang dihadapi oleh Kementerian BUMN dan telah dijadikan sebagai bagian dari target kinerja antara lain terkait rencana holding sektoral BUMN, restrukturisasi BUMN, pemberian tambahan PMN, penyusunan laporan keuangan konsolidasi BUMN dan kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan BUMN yang berbasis pada sosial yaitu melalui kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2016 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali IKU yang berada di bawah target. Dari 37 IKU level Kementerian BUMN terdapat 29 IKU berstatus hijau (mencapai target), 2 IKU berstatus kuning (sedang) dan 6 IKU berstatus merah (jauh dari target). IKU yang kurang dari target meliputi: (1) Jumlah capex BUMN; (2) BUMN yang masuk Global Fortune 500; (3) Kontribusi BUMN Terhadap Negara; (4) Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU); (5) Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal; (6) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN. Adapun penjelasan secara lengkap akan diuraikan pada Bab III.

Perbandingan Jumlah IKU berdasarkan Indeks Capaian



Implementasi manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* di Kementerian BUMN telah berjalan baik walaupun masih butuh banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan action plan yang relevan. Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas. Untuk itu, segenap jajaran Pimpinan dan pegawai Kementerian BUMN akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang menjadi organisasi sehat yang berkinerja tinggi (*healthy and high performance organization*).



DAFTAR

ISI

BAB 1 - Pendahuluan

A. Latar Belakang	10
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
C. Sejarah Singkat Kementerian BUMN	14
D. Profil Pejabat Kementrian BUMN	16
E. Mandat dan Peran Strategis	20
F. Sistematika Penyajian	22
G. Daftar Nama dan Alamat BUMN	24

BAB 2 - Akuntabilitas Kinerja

A. Rencana Strategis 2015 - 2019	32
B. Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	35
C. Pejanjian Kinerja Tahun 2016	36

BAB 3 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

A. Evaluasi Kinerja Pada Periode Renstra Tahun 2012 - 2014	40
B. Evaluasi Kinerja Tahun 2015 - 2016	40
C. Capaian Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU)	42
D. Peningkatan Kinerja BUMN	58

BAB 4 - Capaian BUMN Sebagai Agent Of Development yang Besar, Kuat dan Lincah

A. Capaian BUMN Sebagai Agent Of Development yang Besar, Kuat dan Lincah	78
--	----

BAB 5 - PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2016	94
---	----



BAB 01

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan pertanggungjawaban atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kementerian BUMN

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2016 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian BUMN pada tahun anggaran 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar keberadaan Badan Usaha Milik (BUMN) adalah Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik negara yang menjadi kewenangan Menteri BUMN. Sebagai turunan dari UUD Tahun 1945 tersebut, kebijakan pembinaan BUMN dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya, BUMN juga tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, protokol pasar modal (paket UU Pasar Modal dan peraturan

pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia), paket UU Keuangan Negara dan Paket UU Pemeriksaan dan Pengawasan.

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan BUMN, terdapat pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN. Kewenangan Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagai pengelola kekayaan negara terkait dengan urusan permodalan/kepemilikan. Sedangkan kewenangan Menteri BUMN terkait dengan urusan operasional/manajerial yang dalam hal ini dilakukan dalam kedudukannya selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Persero dan selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;





3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kementerian BUMN sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, memiliki peran yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Hal ini sangat penting agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan swasta tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi di tingkat regional dan internasional.

Agar setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut di atas, dibentuk Kementerian BUMN untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi pendirian BUMN dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yang kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Alat ukur yang dipergunakan sebagai implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga mengatur bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia serta susunan organisasi tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Tugas Pokok

3. Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

4. Fungsi

5. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

6. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;

7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;

8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan

9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2015, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, struktur organisasi Kementerian BUMN yang semula ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengalami perubahan struktur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, susunan organisasi Eselon I Kementerian BUMN terdiri dari:

1. Sekretariat Kementerian

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

2. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi.

3. Deputi Bidang Usaha Industri Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri energi, perdagangan, logistik, perdagangan, kawasan dan pariwisata.

4. Deputi Bidang Usaha Industri Pertambangan, Industri Strategis, dan Media

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media.

5. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara.

6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan.

7. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi, pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas, pengembangan usaha, dan kebijakan peta jalan (road map) BUMN.

8. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif, pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, layanan hukum BUMN, serta pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian BUMN.

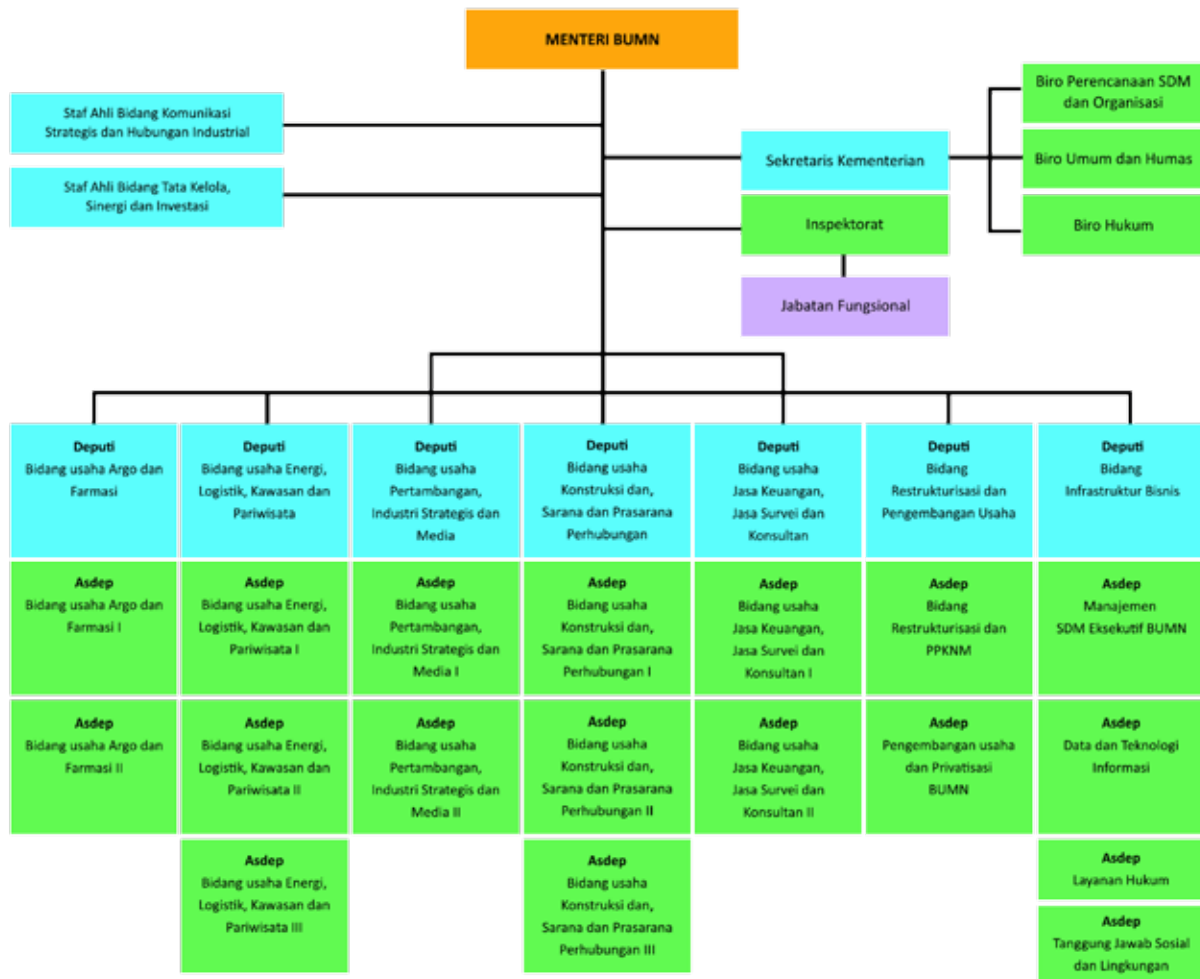
9. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial

Mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri BUMN mengenai masalah komunikasi strategis dan hubungan industrial BUMN.

10. Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi

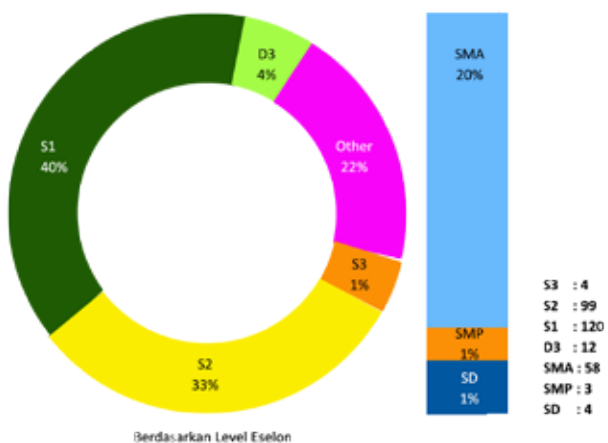
Mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri BUMN mengenai masalah kebijakan tata kelola, sinergi, dan investasi BUMN.

Struktur Organisasi Kementerian BUMN

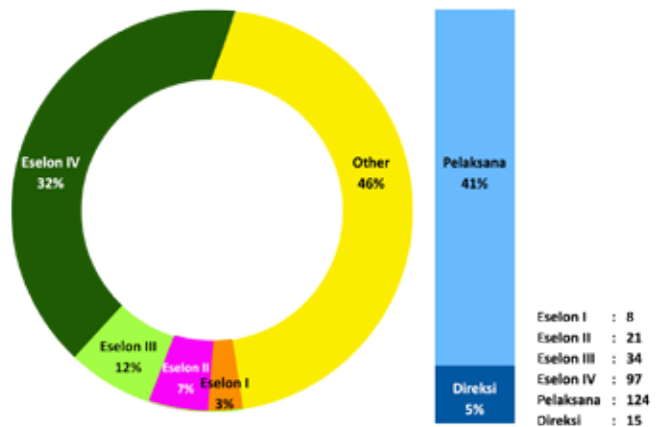


Komposisi SDM

Berdasarkan Level Pendidikan



Berdasarkan Level Jabatan Eselon



C. Sejarah Singkat Kementerian BUMN

Dalam perjalanannya melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia, Kementerian BUMN telah mengalami beberapa kali transformasi organisasi sebagaimana penjelasan berikut:

- **Pembinaan BUMN sebelum tahun 1973 dilakukan secara terpisah oleh masing-masing Departemen Teknisnya.**

Berbagai aturan mengenai BUMN (atau sebelumnya disebut sebagai Perusahaan Negara) antara lain Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO).

*Terpisah melalui masing-masing Departemen Teknis
Menjadi Unit Eselon II*

- **Unit Eselon II**

Dengan keluarnya Inpres Nomor 11 Tahun 1973, maka pembinaan terhadap Perusahaan Negara/BUMN dilimpahkan dari Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku pemegang saham dari penyertaan modal Negara dalam Perusahaan Negara/BUMN kepada Menteri bidang teknis yang terkait.

Mengingat Departemen Keuangan hanya berperan dalam penatausahaan kepemilikan Negara atas saham Perusahaan Negara/BUMN tersebut, maka sejak tahun 1973 tersebut, unit yang menanggapi Perusahaan Negara/BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara) pada Departemen Keuangan. Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1983.

Menjadi Unit Eselon I



- **Menjadi Unit Eselon I**

Pada tahun 1983 terbitlah PP Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan, organisasi pembinaan Perusahaan Negara/BUMN yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).

Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara. Periode Unit Eselon I ini terjadi dalam kurun waktu 1993-1998, dan tercatat 2 (dua) orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Bapak Martiono Hadianto dan Bapak Baelius Ruru.

- **Menjadi Kementerian**

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, maka sejak tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi tersebut terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VII, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Menteri pertama yang bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN tersebut adalah Bapak Tanri Abeng (16 Maret 1998 – 20 Oktober 1999). Pada masa ini sempat digagas tentang BUMN incorporated, sebuah bangun organisasi BUMN berbentuk super holding.

Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), struktur organisasi Kementerian ini sempat digabungkan dengan Badan Penanaman Modal sehingga menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dengan Menteri Bapak Laksamana Sukardi (26 Oktober 1999 – 26 April 2000). Selanjutnya Presiden Gus Dur mengganti Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dengan mengangkat Bapak Rozy Munir (26 April 2000 – 23 Agustus 2000). Dari tanggal 23 Agustus 2000 hingga 9 Agustus 2001, keberadaan Kementerian yang membina BUMN dihapus dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh Bapak I Nyoman Tjager.

Namun, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, dalam Kabinet Gotong Royong di bawah pimpinan Presiden Megawati, organisasi pembina BUMN tersebut dikembalikan, dan Bapak Laksamana Sukardi kembali menjadi Menteri Negara BUMN tanggal 9 Agustus 2001. Kala itu, kembali dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan penanaman modal. Bapak Laksamana Sukardi menjadi Menteri hingga tanggal 20 Oktober 2004. Ketika Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden di tahun 2004, terjadi pergantian Menteri yang menangani BUMN ini. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Bapak Sugiharto dipercaya menjadi Menteri Negara BUMN (21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007), yang kemudian digantikan Bapak Sofyan A. Djali (9 Mei 2007 – 20 Oktober 2009), Bapak Mustafa Abubakar (22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011), Bapak Dahlan Iskan (19 Oktober 2011 - 20 Oktober 2014). Selanjutnya dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Ibu Rini Mariani Soemarno dipercaya sebagai Menteri BUMN sejak 27 Oktober 2014 hingga saat ini.



D. Profil Pejabat Kementerian BUMN



Rini Mariani Soemarno

Menteri BUMN Republik Indonesia

Rini Mariani Soemarno lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958, menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Kabinet Gotong Royong pada tahun 2001 hingga tahun 2004. Beliau juga pernah menjadi Staf Ahli Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1998, serta pernah juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional di tahun yang sama. Sarjana Ekonomi dari Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat ini adalah termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Peraih penghargaan Pemimpin Puncak Terpuji 1995 dari Majalah Swa Sembada ini, mengawali karirnya di dunia industri sebagai General Manager Finance Division PT Astra International pada tahun 1989. Selanjutnya beberapa jabatan puncak di berbagai perusahaan besar pernah diembannya.

Diantaranya sebagai Direktur Keuangan Astra Internasional (1990-1998), Komisaris Bank Universal (1990), Wakil Presiden Komisaris PT United Tractors (1993), Komisaris Bursa Efek Jakarta (1995), Komisaris PT Astra Agro Lestari (1995), Presiden Direktur PT Astra Internasional (1998-2000), Presiden Komisaris PT Astra Agro Lestari (1999), Komisaris PT Agrakom (2000), Presiden Komisaris PT Semesta Citra Motorindo (2000), Presiden Direktur PT Semesta Citra Motorindo (2000-2001), Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia (2001-2005), dan Komisaris Aora (2008).

Hingga akhirnya pada 26 Oktober 2014, Rini Mariani Soemarno diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga sekarang.



Imam Apriyanto Putro

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Imam Apriyanto Putro lahir di Cilacap, 22 Maret 1964, menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 18 Maret 2013 hingga sekarang, dengan pangkat Pembina Utama Madya / IV d. Sebelumnya lulusan S2 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII ini, pada 1 Oktober 2010 sampai dengan 6 Maret 2010 pernah menjabat sebagai Asdep Riset dan Informasi di Kementerian BUMN.

Kemudian pada 7 Maret 2012 sampai dengan 8 Januari 2013 menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi. Lalu pada 9 Januari 2013 sampai dengan 17 Maret 2013 menjabat sebagai Plh. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik. Beliau juga memiliki banyak pengalaman di luar jabatan struktural di sejumlah BUMN.



Wahyu Kuncoro

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis dan Pelaksana Tugas
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi

Wahyu Kuncoro lahir di Surakarta, 31 Oktober 1969, menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 9 Februari 2016 hingga sekarang, dengan pangkat Pembina Utama Muda / IV c. Sebelumnya lulusan S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada ini, menjabat sebagai Kepala Subbidang Perencanaan Usaha Produksi Pertanian (2002-2006),

Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIB (2006-2010), Bidang Usaha Industri Primer IIIa (2010-2012), Kepala Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia (2012-2013), Asdep Bidang Usaha Jasa III (2013-2014), Asdep Usaha Perbankan dan Asuransi (2014-2015), Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis sejak 27 Juli 2015 sampai dengan 8 Februari 2016.



Edwin Hidayat Abdullah

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Edwin Hidayat Abdullah lahir di Jakarta, 28 April 1971, menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang.

Selain itu lulusan S2 Master of Public Management Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura dan Amerika Serikat ini, juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tbk. Beliau memiliki sederet riwayat pelatihan diantaranya Chartered Financial Analysis Level I (CFA), Basic LNG Operations (Beijing), Negotiating Leadership (NUS-Harvard University), Crisis Management (NUS-Harvard University), Privatization (NUS-Harvard University), dan E-Governance (NUS-Harvard University).



Fajar Harry Sampurno

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Fajar Harry Sampurno lahir di Blitar, 18 April 1966, menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang.

Selain itu lulusan S3 dari American University, Iowa City, Amerika Serikat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Beberapa jabatan penting pernah diembannya antara lain Vice President BPIS (2000-2001), Komisaris PT Dahana (2000-2001), Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha PT Dahana (2002-2011), Direktur Utama PT IKI (2012), dan terakhir menjabat sebagai Direktur Utama PT Dahana sejak tahun 2012 hingga pertengahan 2015.



Pontas Tambunan

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pontas Tambunan lahir di Jakarta, 16 Februari 1961, menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang, dengan pangkat Pembina Utama Madya / IV d. Sebelumnya lulusan S2 Manajemen Universitas Gajah Mada ini, menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi Bangunan (2002-2006), Asdep Urusan Usaha Prasarana Angkutan (2006-2010), lalu menjabat sebagai Asdep Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I (2010-2012).



Gatot Trihargo

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan

Gatot Trihargo lahir di Yogyakarta, 29 Agustus 1960, menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 10 Juni 2015 hingga sekarang, dengan pangkat Pembina Utama Madya / IV d. Sebelumnya lulusan S3 Ilmu Manajemen Universitas Padjajaran ini, menjabat sebagai Kepala Bidang Sistem Informasi sejak 14 Februari 2006 sampai dengan 20 Mei 2008, Kepala Bidang Data sejak 21 Mei 2008 sampai dengan 30 September 2010, Asdep Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II sejak 1 Oktober 2010 sampai dengan 17 Maret 2013, Deputi Bidang Usaha Jasa sejak 18 Maret 2013 sampai dengan 4 Mei 2014, dan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain sejak 5 Mei 2014 sampai dengan 9 Juni 2015.



Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Usaha Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

Aloysius Kiik Ro lahir di Kupang, 29 April 1961, menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang. Sebelumnya lulusan S3 Finance University of Kentucky, Amerika Serikat ini, sempat menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian BUMN (2003-2005), Direktur Bisnis PT Danareksa (Persero) sejak 14 Juli 2005 sampai dengan 31 Maret 2015, dan Direktur Keuangan PT Antam Tbk sejak 1 April 2015 sampai dengan 26 Juli 2015.



Hambra

Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial dan Pelaksana Tugas Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi

Hambra lahir di Maluku, 10 Oktober 1968, menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sejak 9 Februari 2016 hingga sekarang. Sebelumnya lulusan S2 Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada ini, menjabat sebagai Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (2002-2006), Kepala Bagian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Perundangundangan (2006-2010), Kepala Bagian Perundang-undangan (2010-2012), Kepala Biro Hukum sejak 3 September 2012 sampai dengan 29 Januari 2014, Plt. Inspektur sejak 30 Januari 2014 sampai dengan 5 Mei 2014, Kepala Biro Hukum sejak 6 Mei 2014 sampai dengan 26 Juli 2015, serta Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial sejak 27 Juli 2015 sampai dengan 8 Februari 2016.

E. Mandat dan Peran Strategis

1. Mandat

Institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara melalui pembinaan terhadap BUMN dengan arah kebijakan BUMN sebagai agen pembangunan (*agent of development*) untuk mendukung realisasi program pemerintah.

Kementerian BUMN sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam rangka mengelola aset negara melalui pembinaan terhadap BUMN dengan arah kebijakan BUMN sebagai agen pembangunan (*agent of development*) untuk mendukung realisasi program pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tentang pentingnya peran BUMN dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan jumlah BUMN sebanyak 118 pada tahun 2016 dan di seluruh sektor industri baik yang terbuka (*listed*) maupun tertutup, potensi BUMN memberikan sumbangsih bagi negara secara maksimal sangat besar. Hal ini didukung oleh kondisi Indonesia yang memiliki populasi penduduk dan sumber daya sangat besar, serta pasar ekonomi yang sangat potensial.

Selain itu, dengan peran serta BUMN, harapan Indonesia menjadi "*Regional Economic Powerhouse*" juga dapat diwujudkan. Karena itulah, Kementerian BUMN telah menyusun "Mimpi BUMN" yang diwujudkan dalam sebuah roadmap. Roadmap yang disusun dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai.

Penyusunan roadmap BUMN dilandaskan atas citacita pembangunan yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu TRISAKTI :

BERDAULAT : Indonesia berdaulat secara politik

MANDIRI : Indonesia yang mandiri secara ekonomi

BERKEPRIBADIAN : Indonesia yang berkepribadian secara social



Untuk mewujudkan jalan perubahan tersebut, telah dirumuskan Sembilan agenda prioritas yang disebut dengan NAWACITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita yang menjadi cita-cita luhur membangun bangsa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dengan berbagai target kualitatif dan kuantitatif.

a. Target Kualitatif

- Mengejar peningkatan daya saing
- Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental
- Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas
- Mengurangi ketimpangan antar wilayah
- Memulihkan kerusakan lingkungan
- Memajukan kehidupan bermasyarakat

b. Target Kuantitatif

- Pertumbuhan ekonomi naik dari 5,1% di tahun 2014 menjadi 8% di tahun 2019.
- PDB per Kapita naik dari Rp43,32 juta di tahun 2014 menjadi Rp71,97 juta di tahun 2019.
- Inflasi turun menjadi 3,5% di tahun 2019 dari 7,3% di tahun 2014.
- Tingkat kemiskinan turun menjadi 5-6% di tahun 2019 dari kisaran 11% di tahun 2014.
- Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2019 menjadi 16% dari posisi 2014 yang berada di kisaran 11%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka di kisaran 4-5% dari posisi 2014 yang di kisaran 6%.



2. Strategi

Strategi pencapaian roadmap BUMN

BUMN sebagai agen pembangunan ikut berperan aktif dalam mewujudkan pencapaian Nawacita yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyusunan roadmap yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN sebagai sebuah "Mimpi BUMN", berlandaskan pada harapan pencapaian Nawacita tersebut. Sebagai implementasi strategis, telah disusun strategi pencapaian roadmap, yaitu melalui:

a. 4 Pilar Strategis

Arah pengembangan BUMN didasarkan pada empat pilar strategis yang membentuk strategi: sinergi di antara BUMN, hilirisasi dan kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah terpadu, serta kemandirian keuangan dan penciptaan nilai.

Sinergi BUMN

Akselerasi proyek strategis BUMN antara lain dengan melakukan Sinergi BUMN yang bertujuan agar setiap BUMN memiliki pemikiran yang sejalan terkait visi dan misi serta akar dari perusahaan itu, manajemen setiap perusahaan mendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, optimalisasi sumber daya produksi yang dimiliki, menambah *added value* BUMN yang ada, dan untuk mengatasi BUMN yang merugi.

Dalam sinergi BUMN dilakukan pendekatan yaitu Pertama, *Value Chain Approach* (pendekatan nilai secara berantai). Dalam pendekatan ini BUMN perlu melakukan sinergi apabila *output* suatu BUMN dapat menjadi input bagi BUMN lain, dengan demikian biaya input suatu BUMN akan menjadi sumber pendapatan bagi BUMN lain. Kedua, *Management Function Approach*. Sinergi ini dilakukan tidak hanya terbatas pada output atau produk BUMN, tetapi dapat pula dilakukan pada fungsi-fungsi manajemen seperti bidang produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya.

Selanjutnya, dalam melakukan sinergi antara perusahaan BUMN tentu harus jelas program yang disinergikan dan tolak ukur keberhasilannya, karena dalam melakukan sinergi harus tetap mengacu dan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Adapun acuan hubungan kontraktual antar BUMN yang dilibatkan dalam sinergi yaitu aturan main dalam kerjasama diantara BUMN harus ditentukan dengan jelas, kejelasan pihak yang berpartisipasi, kejelasan peran masing-masing pihak, kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu kerjasama, pembagian untung/rugi, *Exit clause*, *legal protection*, dan tidak menciptakan *moral hazard*.

Sinergi BUMN dapat dilihat dari sudut pandang pemegang saham dan perusahaan. Sinergi BUMN dalam sudut pandang pemegang saham yaitu tuntutan besar untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada APBN, percepatan peningkatan cakupan dan kualitas layanan publik, pemulihan perekonomian nasional, dan penciptaan *demonstration effect* untuk menarik investasi.

Sedangkan dalam sudut pandang perusahaan, sinergi diperlukan secara alamiah untuk tetap survive dalam persaingan, adanya tujuan yang ingin dicapai bersama dari kompetensi inti berbeda, *shared vision* diantara BUMN, kebutuhan untuk mendukung ekspansi usaha dan penetrasi pasar, kebutuhan untuk mendayagunakan sumber daya yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Ragam bentuk sinergi BUMN yaitu kerja sama operasi (KSO), konsorsium, hubungan kontraktor-sub-kontraktor, *joint venture*, kontrak berkaitan, kemitraan, dan merger.

b. Restrukturisasi Organisasi

Roadmap juga fokus pada penguatan BUMN melalui skema *Stand Alone*, *Merger/Konsolidasi* dan Holding untuk menciptakan sinergi yang optimal.

c. Roadmap Sektoral

Roadmap disusun per tema dan per sektor sesuai dengan fokus pemerintah dengan melibatkan seluruh BUMN. Total terdapat 15 tema/sektor yang menjadi fokus ke depan.

F. Sistematika Penyajian

Penyajian LKIP Kementerian BUMN Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan mengenai struktur organisasi, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang dihadapi.

Bab II Akuntabilitas Kinerja

- A. Rencana Strategis 2015 - 2019
- B. Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

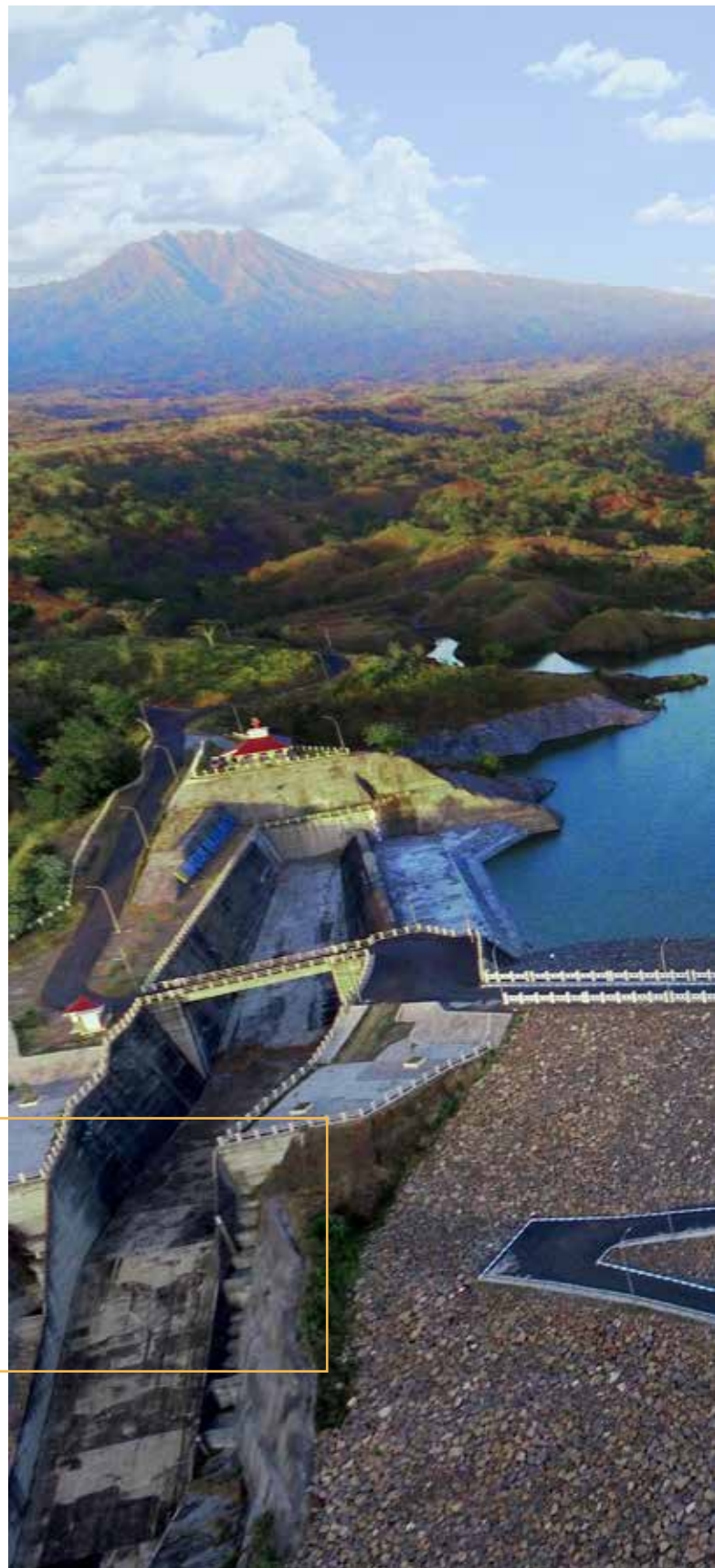
Bab III Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- A. Evaluasi Kinerja Pada Periode Renstra Tahun 2012 -2014
- B. Evaluasi Kinerja Tahun 2015 - 2016
- C. Capaian Masing - masing Indikator Kinerja Utama (IKU)
- D. Peningkatan Kinerja BUMN

Bab IV Capaian BUMN Sebagai Agent Of Development yang Besar, Kuat dan Lincah

Bab V Penutup

Menyajikan muatan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian BUMN tahun 2016, Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang dalam rangka peningkatan kinerja.

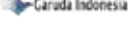




Daftar Nama dan Alamat Situs BUMN

No.	Nama BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
1.	Perum Antara		Informasi dan Telekomunikasi	http://www.antaranews.com
2.	Perum BULOG		Perdagangan Besar dan Eceran	http://www.bulog.co.id
3.	Perum Damri		Transportasi dan Pergudangan	http://www.damri.co.id
4.	Perum Jaminan Kredit Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://www.jamkrindo.com
5.	Perum Jasa Tirta I		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	http://jasatirta1.co.id
6.	Perum Jasa Tirta II		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	http://jasatirta2.co.id
7.	Perum Navigasi		Transportasi dan Pergudangan	http://airnavindonesia.com
8.	Perum Perhutani		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	http://perumperhutani.com
9.	Perum Perikanan Indonesia		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	http://www.perumperindo.co.id
10.	Perum Perumnas		Konstruksi	http://perumnas.co.id
11.	Perum Peruri		Industri Pengolahan	http://www.peruri.co.id
12.	Perum PFN		Informasi dan Telekomunikasi	-
13.	Perum PNRI		Industri Pengolahan	http://pnri.co.id
14.	Perum PPD		Transportasi dan Pergudangan	http://perumppd.blogspot.com
15.	PT Adhi Karya Tbk		Konstruksi	http://adhi.co.id
16.	PT Amarta Karya		Konstruksi	http://amartakarya.co.id
17.	PT Aneka Tambang Tbk		Pertambangan dan Penggalian	http://antam.com
18.	PT Angkasa Pura I		Transportasi dan Pergudangan	http://angkasapura1.co.id
19.	PT Angkasa Pura II		Transportasi dan Pergudangan	http://angkasapura2.co.id

No.	Nama BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
20.	PT ASDP Indonesia Ferry		Transportasi dan Pergudangan	http://indonesiaferry.co.id
21.	PT Asuransi ABRI		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://asabri.co.id
22.	PT Asuransi Jasa Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://jasindo.co.id
23.	PT Asuransi Jiwasraya		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://jiwasraya.co.id
24.	PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://jasaraharja.co.id
25.	PT Asuransi Kredit Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://askrindo.co.id
26.	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://bahana.co.id
27.	PT Balai Pustaka		Industri Pengolahan	http://balaipustaka.co.id
28.	PT Bank Mandiri Tbk		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://bankmandiri.co.id
29.	PT Bank Negara Indonesia Tbk		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://bni.co.id
30.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://bri.co.id/
31.	PT Bank Tabungan Negara		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://btn.co.id
32.	PT Barata Indonesia		Industri Pengolahan	http://barata.co.id
33.	PT Berdikari		Perdagangan Besar dan Eceran	http://berdikari-persero.com
34.	PT Bhanda Ghara Reksa		Transportasi dan Pergudangan	http://bgrindonesia.com
35.	PT Bina Karya		Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	-
36.	PT Bio Farma		Industri Pengolahan	http://biofarma.co.id
37.	PT Biro Klasifikasi Indonesia		Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	http://klasifikasiindonesia.com
38.	PT Boma Bisma Indra		Industri Pengolahan	http://ptbbi.co.id

No.	Nama BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
39.	PT Brantas Abipraya		Konstruksi	http://brantas-abipraya.com
40.	PT Dahana		Industri Pengolahan	http://dahana.com
41.	PT Danareksa		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://danareksa.com
42.	PT Dirgantara Indonesia		Industri Pengolahan	http://indonesian-aerospace.com
43.	PT Djakarta Lloyd		Transportasi dan Pergudangan	http://djakartalloyd.co.id
44.	PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari		Industri Pengolahan	http://dkb.co.id
45.	PT Dok dan Perkapalan Surabaya		Industri Pengolahan	http://dok-sby.co.id
46.	PT Energy Management Indonesia		Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	http://energyservices.co.id
47.	PT Garam		Industri Pengolahan	-
48.	PT Garuda Indonesia Tbk		Transportasi dan Pergudangan	http://garuda-indonesia.com
49.	PT Hotel Indonesia Natour		Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman	http://innagroups.com
50.	PT Hutama Karya		Konstruksi	http://www.hutamakarya.com
51.	PT Iglas		Industri Pengolahan	http://iglas.co.id
52.	PT Inalum		Pertambangan dan Penggalian	http://inalum.co.id
53.	PT Indah Karya		Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	-
54.	PT Indofarma Tbk		Industri Pengolahan	http://indofarma.co.id
55.	PT Indonesia Tourism Development Corporation		Real Estate	http://itdc.co.id
56.	PT Indra Karya		Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	http://indrakarya.co.id
57.	PT Industri Kapal Indonesia		Industri Pengolahan	http://ikishipyard.com

No.	Nama BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
58.	PT Industri Nuklir Indonesia		Industri Pengolahan	http://batantek.com
59.	PT Industri Sandang Nusantara		Industri Pengolahan	-
60.	PT INKA		Industri Pengolahan	http://inka.web.id
61.	PT INTI		Industri Pengolahan	http://inti.co.id
62.	PT Istaka Karya		Konstruksi	-
63.	PT Jasa Marga Tbk		Transportasi dan Pergudangan	http://jasamarga.com
64.	PT Kawasan Berikat Nusantara		Transportasi dan Pergudangan	http://kbn.co.id
65.	PT Kawasan Industri Makassar		Transportasi dan Pergudangan	http://ptkima-makassar.co.id
66.	PT Kawasan Industri Medan		Transportasi dan Pergudangan	http://kim.co.id
67.	PT Kawasan Industri Wijayakusuma		Transportasi dan Pergudangan	http://kiw.co.id
68.	PT Kereta Api Indonesia		Transportasi dan Pergudangan	http://kereta-api.co.id
69.	PT Kertas Kraft Aceh		Industri Pengolahan	http://kka.co.id
70.	PT Kertas Leces		Industri Pengolahan	http://kertasleces.co.id
71.	PT Kimia Farma Tbk		Industri Pengolahan	http://kimiafarma.co.id
72.	PT Kliring Berjangka Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://ptkbi.com
73.	PT Krakatau Steel Tbk		Industri Pengolahan	http://krakatausteel.com
74.	PT Len Industri		Industri Pengolahan	http://len.co.id
75.	PT Merpati Nusantara Airlines		Transportasi dan Pergudangan	http://merpati.co.id
76.	PT PAL Indonesia		Industri Pengolahan	http://pal.co.id
77.	PT PANN Multi Finance		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://pannmf.co.id
78.	PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam		Transportasi dan Pergudangan	http://perserobotam.com

No.	Nama BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
79.	PT Pegadaian	 Pegadaian	Jasa Keuangan dan Asuransi	http://pegadaian.co.id
80.	PT Pelabuhan Indonesia I	 Pelindo I	Transportasi dan Pergudangan	http://inaport1.co.id
81.	PT Pelabuhan Indonesia II	 IPC	Transportasi dan Pergudangan	http://indonesiaport.co.id
82.	PT Pelabuhan Indonesia III	 Pelindo III	Transportasi dan Pergudangan	http://pp3.co.id
83.	PT Pelabuhan Indonesia IV	 Pelayan	Transportasi dan Pergudangan	http://inaport4.co.id
84.	PT Pelayaran Nasional Indonesia	 Pelayaran Nasional Indonesia	Transportasi dan Pergudangan	http://pelni.co.id
85.	PT Pembangunan Perumahan Tbk	 PP	Konstruksi	http://pt-pp.com
86.	PT Perikanan Nusantara	 Perikanan Nusantara	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-
87.	PT Perkebunan Nusantara III	 PTP Nusantara III	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	http://ptpn3.co.id
88.	PT Permodalan Nasional Madani	 PNM	Jasa Keuangan dan Asuransi	http://pnm.co.id
89.	PT Pertamina	 Pertamina	Pertambangan dan Penggalian	http://pertamina.co.id
90.	PT Pertani	 Pertani	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	http://pertani.co.id
91.	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	 Perusahaan Gas Negara	Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin	http://pgn.co.id
92.	PT Perusahaan Pengelola Aset	 PPA	Jasa Keuangan dan Asuransi	http://ptppa.com
93.	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	 PPPI	Perdagangan Besar dan Eceran	http://tradingindonesia.com
94.	PT Pindad	 Pindad	Industri Pengolahan	http://pindad.com
95.	PT PLN	 Perusahaan Listrik Negara	Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin	http://pln.co.id
96.	PT Pos Indonesia	 Pos Indonesia	Transportasi dan Pergudangan	http://posindonesia.co.id

No.	Nama BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
97.	PT Primissima		Industri Pengolahan	-
98.	PT Pupuk Indonesia Holding Company		Industri Pengolahan	http://pupuk-indonesia.com
99.	PT Rajawali Nusantara Indonesia		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	http://rni.co.id
100.	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://asei.co.id
101.	PT Sang Hyang Seri		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	http://sanghyangseri.co.id
102.	PT Sarinah		Perdagangan Besar dan Eceran	http://sarinah.co.id
103.	PT Semen Baturaja		Industri Pengolahan	http://semenbaturaja.co.id
104.	PT Semen Indonesia Tbk		Industri Pengolahan	http://semenindonesia.com
105.	PT Semen Kupang		Industri Pengolahan	-
106.	PT Sucofindo		Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	http://sucfindo.co.id
107.	PT Survei Udara Penas		Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	http://penas.co.id
108.	PT Surveyor Indonesia		Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	http://ptsi.co.id
109.	PT Taman Wisata Candi BP dan RB		Real Estate	http://borobudurwisata.com
110.	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk		Pertambangan dan Penggalian	http://ptba.co.id
111.	PT TASPEN		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://taspen.com
112.	PT Telkom Tbk		Informasi dan Telekomunikasi	http://telkom.co.id
113.	PT Timah Tbk		Pertambangan dan Penggalian	http://timah.com
114.	PT Varuna Tirta Prakasya		Transportasi dan Pergudangan	http://vtp.co.id
115.	PT Virama Karya		Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	http://viramakarya.co.id
116.	PT Waskita Karya		Konstruksi	http://waskita.co.id
117.	PT Wijaya Karya Tbk		Konstruksi	http://wika.co.id
118.	PT Yodya Karya		Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	http://yoka.co.id

BAB 02

AKUNTABILITAS KINERJA







AKUNTABILITAS KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Adalah menjadi tugas Kementerian BUMN untuk menjadikan BUMN sebagai *Agent of Development* dan pelaku utama yang kompetitif, artinya BUMN harus mempunyai ciri-ciri yang sehat dan berdaya saing.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian BUMN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Renstra Kementerian BUMN merupakan acuan dalam Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian BUMN. Renstra juga merupakan salah satu komponen dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan siklus perencanaan, pemograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga penyusunan Renstra berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra Kementerian BUMN 2015–2019 disusun berlandaskan pada tugas dan fungsi kementerian, amanat undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemetaan kondisi lingkungan strategis, tantangan yang terus berkembang, isu-isu strategis yang harus diakomodir serta mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Renstra ini dalam pelaksanaannya akan digunakan sebagai acuan perencanaan, pemo-graman, penganggaran tahunan dan evaluasi pelaksanaan/pencapaian sasaran dalam pembinaan BUMN.

Memasuki tahap ketiga pelaksanaan pembangunan jangka panjang (2015–2019), tatanan Kementerian/Lembaga telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (beserta perubahannya dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2014), Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (beserta perubahannya dalam Perpres 14 Tahun 2014) serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN.

Sesuai Undang-Undang tersebut, Kementerian BUMN termasuk dalam kelompok kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tugas Kementerian BUMN adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sesuai PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan kepada Menteri Negara BUMN, tidak semua kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Menteri BUMN.

Beberapa hal yang tidak dilimpahkan kepada Menteri BUMN adalah:

- Penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam Persero dan Perum, serta kegiatan penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan;
- Penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam Persero dan Perum, serta kegiatan penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan;
- Pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam Persero dan Perum yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam Perjan;
- Pendirian Persero, Perum, atau Perjan dan perubahan bentuk hukum Perjan. Dengan adanya pengecualian tersebut, Menteri Keuangan masih merupakan ultimate shareholder bagi BUMN yang dapat membuat business process yang seharusnya dapat berjalan lebih cepat justru memakan waktu yang lebih lama dan kurang efektif, khususnya dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi (rightsizing) BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008.

Sebagai kementerian yang mengelola dan membina BUMN, Kementerian BUMN mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis untuk mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Perkembangan organisasi Kementerian BUMN yang sangat dinamis menunjukkan pemangku Kepentingan di negara ini masih mencari bentuk terbaik organisasi dalam mengelola BUMN agar BUMN dapat lebih berdaya saing di tingkat nasional, regional dan internasional dan juga dapat meningkatkan kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN

Sebagai birokrasi yang mengelola korporasi, Kementerian BUMN dituntut dapat secara profesional mengelola BUMN berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi, hal tersebut menjadi tantangan dan potensi bagi Kementerian BUMN yang memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan Kementerian lain. Potensi Kementerian BUMN sebagai kementerian pengelola BUMN dianggap belum optimal karena pengelolaannya belum berbasis korporasi sehingga cenderung lambat.

Adalah menjadi tugas Kementerian BUMN untuk menjadikan BUMN sebagai pelaku utama yang kompetitif, artinya BUMN harus mempunyai ciri-ciri yang sehat dan berdaya saing. Hal yang sangat penting adalah BUMN sudah seharusnya tidak boleh lagi membebani negara dan hal ini dapat tercapai manakala BUMN telah dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi Negara dan perekonomian nasional.

Sebagaimana arahan dalam sidang kabinet bahwa visi misi Kementerian/ Lembaga adalah sama dengan visi misi Kabinet Kerja yaitu:

Visi Misi Kementerian BUMN mengikuti Visi Misi Kabinet Kerja

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional, maka Tujuan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

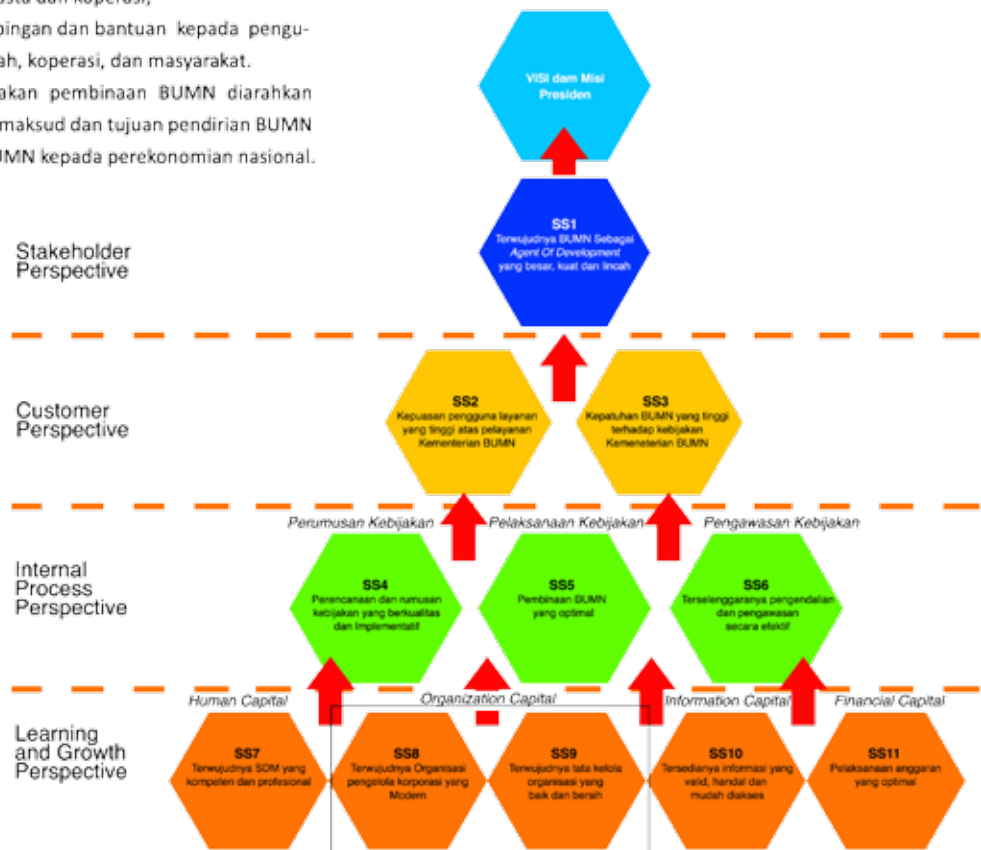
1. Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai organisasi yang Profesional Dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional, BUMN tentunya akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, Kementerian BUMN harus bisa berperan melakukan proses koordinasi, harmonisasi dan pengawasan dalam pengurusan BUMN secara efektif dan efisien sehingga BUMN dapat melakukan kegiatannya secara optimal. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian BUMN haruslah diperkuat dengan standar yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya melalui pemahaman yang komprehensif atas BUMN, serta adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan.
2. Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMN yang Optimal kepada Ekonomi Nasional Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
 Oleh karena itu, setiap kebijakan pembinaan BUMN diarahkan untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu optimalisasi kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional.

Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Kementerian BUMN menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Kementerian BUMN sebagai organisasi yang Profesional, sasaran strategis yang harus dicapai adalah sebagai berikut:
 - Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN;
 - Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan Kementerian BUMN;
 - Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif;
 - Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif;
 - Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional;
 - Terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern;
 - Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih;
 - Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
 - Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel
2. Untuk Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMN yang Optimal kepada Ekonomi Nasional, sasaran strategis yang harus dicapai adalah sebagai berikut:
 - Terwujudnya BUMN sebagai *Agent of Development* yang besar, kuat dan lincah; dan
 - Pembinaan BUMN yang optimal.

Peta Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019



Program

Sasaran Strategis Kementerian BUMN di atas akan dicapai melalui Program-Program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN; dan

2. Program Pembinaan BUMN

- Sektor Industri Agro dan Farmasi I;
- Sektor Industri Agro dan Farmasi II;
- Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I;
- Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata II;
- Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata III;
- Pembinaan Bumn Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media I;
- Pembinaan Bumn Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II;
- Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I;
- Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II;
- Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan III;
- Pembinaan Bumn Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan I;
- Pembinaan Bumn Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II;
- Restrukturisasi dan Pendayagunaan Potofolio Kepemilikan Negara Minoritas;
- Pengembangan Usaha dan Privatisasi;
- Penatakelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN;
- Penatakelolaan Data dan Teknologi Informasi;
- Pelayanan Hukum BUMN;
- Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



B. Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk.

Dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra, Kementerian BUMN menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran

Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Kementerian BUMN menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan.

Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

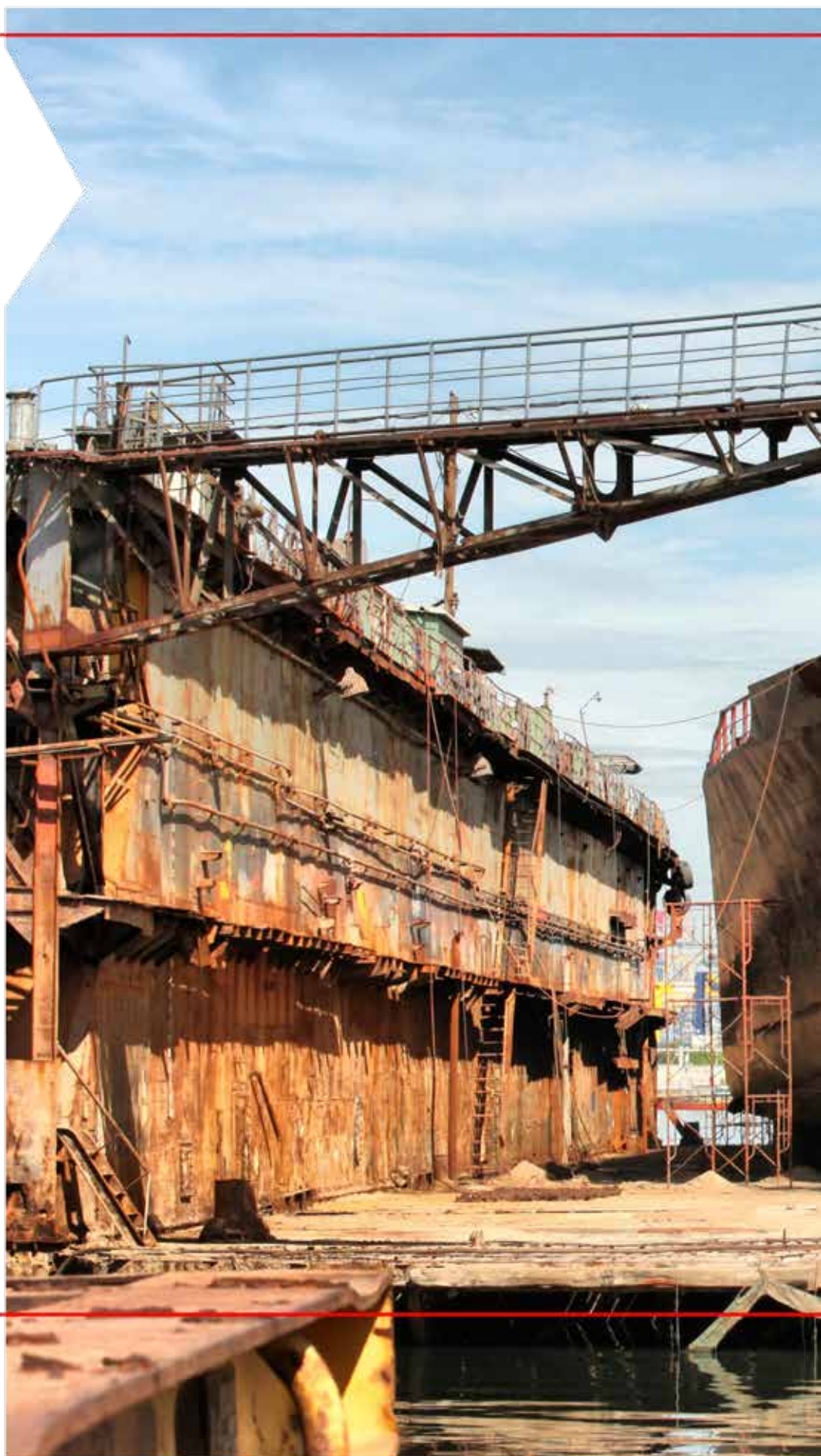
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya BUMN sebagai <i>Agent of Development</i> yang besar, kuat dan lincah	Jumlah Aset BUMN	5.632 T Rupiah
		Jumlah Laba BUMN	143 T Rupiah
		Jumlah Ekuitas BUMN	1.340 T Rupiah
		Jumlah Capex BUMN	401 T Rupiah
		BUMN Yang Masuk Global Fortune 500	3 BUMN
		Kontribusi BUMN Terhadap Negara	244 T Rupiah
		Skor Kinerja BUMN (KPKU)	35 BUMN masuk kategori Good Performance
		Persentase Roadmap BUMN	25 %
		Tercapainya SLA Penugasan PSO	93 %
2	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN	Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	84 %
		Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait /stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN	82 %
3	Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN	Nilai rata-rata GCG BUMN	83 %
		Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	100 %
		Persentase kepatuhan proses Operasional BUMN	100 %
		Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	100 %
4	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif	Terpenuhinya Batas Waktu Penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)	100 % Agustus 2016
		Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan	> 80 %
		Persentase Kebijakan Kementerian BUMN dengan Pencapaian Visi dan Misi Presiden	100 %
5	Pembinaan BUMN yang optimal	Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan	100% respons sesuai batas waktu dalam standar layanan
		Penetapan Direksi Sesuai dengan Peraturan	100% penetapan direksi sebelum masa jabatan Direksi berakhir
		Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu	100% penyelenggaraan RUPS tepat waktu
		Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian LHP BPK	100 %
		Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	100 %
7	Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	83 %
		Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan	60 %
		Persentase pelaksanaan diklat yang sesuai dengan Training Needs Analysis (TNA)	> 90 %
8	Terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern	Persentase Pencapaian Road Map Transformasi Organisasi	25 %
9	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	70
		Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	70
		Nilai Inisiatif Anti Korupsi	73
10	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal	85 %
		Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi	> 90 %
		Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5)	Rata - rata Skala 4
		Persentase downtime layanan TIK	< 3 %
11	Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel	Persentase Pemanfaatan Anggaran	> 90 %
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP Opini Bpk

Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2016 sebagaimana Revisi terakhir adalah sebesar Rp 190,8 Miliar yang terdiri atas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN sebesar Rp 115,3 Miliar dan Program Pembinaan BUMN sebesar Rp 75,5 Miliar.

BAB 03

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA





A. Evaluasi Kinerja pada periode Renstra Tahun 2012-2014

Sebelum beranjak pada periode Renstra tahun 2015-2019, maka perlu kiranya dilihat kembali capaian pada periode Renstra sebelumnya, dan dalam hal ini disajikan capaian 2 tahun terakhir sebagai gambaran kinerja untuk dapat dijadikan pertimbangan dan perhatian pimpinan dalam pengambilan kebijakan ke depan. Adapun gambaran capaian tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	2013			2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pajak BUMN	Rp 135 T	Rp 113.7 T	84%	Rp 135 T	RP 171 T	127%
Jumlah dividen BUMN	Rp 31 T	Rp 34.02 T	110%	Rp 35 T	Rp 40 T	114%
Persentase pertumbuhan aset BUMN	10%	17.42%	174%	10%	15.30%	153%
Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN	10%	6.62%	66%	10%	11.70%	117%
Jumlah belanja modal BUMN	Rp 240 T	Rp 184,36 T	77%	Rp 200 T	RP 255 T	128%
Rata-rata RoA BUMN	4.40%	5.11%	116%	5%	3.28%	66%
Rata-rata RoE BUMN	17.50%	13.30%	76%	15%	13.50%	90%
Indeks Kepuasan BUMN	78 point	72.9 point	93%	75 point	74.08 point	99%
Nilai rata-rata GCG BUMN	Baik	Sangat baik	100%	Sangat baik	sangat baik	100%
Jumlah riset/ kajian	25	24	96%	25	29	116%
Pelaksanaan RUPS tepat waktu	100%	98%	98%	100%	100%	100%
Persentase Penetapan Direksi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penetapan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan kontrak kinerja Direksi BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan kontrak kinerja Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skor SAKIP Kementerian BUMN	60	59.3	99%	65 point	65,10 point	100%
Jumlah rancangan peraturan perundangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/ direvisi/ dicabut	15	24	160%	15	27	180%
Rata-rata pencapaian target kinerja pegawai	85%	85%	100%	85%	85%	100%
Persentase pencapaian SLA penyediaan sarana dan prasarana kinerja	100%	101%	101%	100%	78%	78%
Persentase pencapaian SLA Sistem Informasi	60%	90%	150%	90%	90%	100%
Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi	60	59.13	99%	70%	54.52%	78%
Persentase penyerapan anggaran	85%	81.70%	96%	85%	78.87%	93%
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Pada periode Renstra tahun 2012-2014, dalam 2 tahun terakhir terlihat bahwa pencapaian kinerja per masing-masing IKU semakin membaik. Hal ini terlihat dari capaian jumlah IKU yang masih berwarna merah (capaian kurang baik) dari semula tahun 2013 sebanyak 4 IKU, pada tahun 2014 menjadi 3 IKU. Sedangkan capaian IKU yang masih berwarna kuning (capaian sedang) berubah dari semula sebanyak 6 IKU, pada tahun 2014 menjadi 3 IKU. Sedangkan capaian jumlah IKU yang berwarna hijau (capaian baik) dari semula sebanyak 13 IKU menjadi 17 IKU pada tahun 2014.

B. Evaluasi Kinerja Tahun 2015-2016

Pada capaian kinerja pada tahun 2016, penilaian didasarkan pada rencana strategis yang terdiri atas 11 sasaran strategis dan sudah berdasarkan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta berdasarkan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Menteri BUMN tahun 2016 dapat diringkaskan sebagai berikut:

Uraian	2015			2016		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Aset BUMN	tumbuh 12%	tumbuh 19%	158%	Rp 5.632 T	Rp 6.325 T	112.30%
Jumlah Laba BUMN	tumbuh 8%	tumbuh 26%	325%	Rp 143 T	Rp 166 T	116.08%
Jumlah Ekuitas BUMN	tumbuh 12%	tumbuh 62%	517%	Rp 1.340 T	Rp 2.235 T	166.79%
Jumlah Capex BUMN	tumbuh 24%	tumbuh 11%	46%	Rp 401 T	RP 298 T	74.31%
BUMN Yang Masuk Forbes 2000	11 BUMN	5 BUMN	45%			
BUMN Yang Masuk Global Fortune 500				3 BUMN	2 BUMN	66.67%
Kontribusi BUMN Terhadap Negara	Rp 227 T	Rp 164 T	72%	Rp 244 T	Rp 206 T	84.43%
Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)				35 BUMN masuk kategori Good Performance	22 BUMN masuk kategori Good Performance	62.86%
Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional	100%	100%	100%			
Persentase Pencapaian Roadmap BUMN				25%	40%	160.00%
Tercapainya SLA Penugasan PSO				93%	105.91%	113.88%
Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	80%	0	0%	84%	88.55%	105.42%
Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait /stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN				82%	90.20%	110.00%
Nilai rata-rata GCG BUMN	75	81.5	109%	83	86.49	104.20%
Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Persentase kepatuhan proses operasional BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Terpenuhinya Batas Waktu Penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)	Agustus 2015	Agustus 2015	100%	Agustus 2016	Agustus 2016	100.00%
Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan	100%	100%	100%	≥80 %	100%	100.00%
Persentase Kebijakan Kementerian BUMN dengan Pencapaian Visi dan Misi Presiden				100%	100%	100.00%
Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan	80%	100%	125%	100% respons sesuai batas waktu dalam standar layanan	100% respons sesuai batas waktu dalam standar layanan	100%
Penetapan Direksi Sesuai dengan Peraturan				100% penetapan direksi sebelum masa jabatan berakhir	100% penetapan direksi sebelum masa jabatan berakhir	100%
Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu	100%	100%	100%	100% penyelenggaraan RUPS tepat waktu	100% penyelenggaraan RUPS tepat waktu	100%
Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP	75%	100%	133%			
Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian LHP BPK				100%	100%	100%
Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan				100%	100%	100%
Persentase jumlah BUMN yang diadvokasi	44 BUMN	57 BUMN	130%			
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	2 Laporan	2 Laporan	100%			
Laporan audit operasional dan kepatuhan	3 Laporan	2 Laporan	67%			
Tersusunnya program pengembangan masing-masing individu sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dengan target	100%	100%	100%			
Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan				83%	162.50%	196%
Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan				60%	60%	100%
Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program pengembangan masing- masing individu dengan target	100%	100%	100%			
Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan dengan target	90%	100%	100%			
Persentase pelaksanaan diklat yang sesuai dengan Training Needs Analysis (TNA)				≥90 %	117.60%	131%
Persentase Pencapaian Road Map Transformasi Organisasi	100% program tahun 2015	80% program tahun 2015	80%	25% dari seluruh program	25% dari seluruh program	100%
Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	70	65.1	93%	70	66 (prognosa)	94%
Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	60	65.56	109%	70	79.21 (self assesment)	113%
Nilai Inisiatif Anti Korupsi				73	75.23	103%
Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal	75%	93%	124%	85%	74%	87%
Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi	90%	98.88%	110%	≥90 %	99.11%	110%
Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5)	3	37.5	1250%	Rata-rata skala 4	3.8	95%
Persentase downtime layanan TIK	3%	1.26%	158%	≤3 %	1.02%	166%
Jumlah SOP Prioritas yang Disusun	30 SOP	30 SOP	100%			
Persentase Pemanfaatan Anggaran	90%	84.84%	94%	≥90 %	93.26%	104%
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	100%	WTP Opini BPK	WTP DPP	75%

Pada tahun 2016 terdapat beberapa perubahan IKU sebagai hasil dari assesment SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB, yaitu menyangkut kualitas IKU maupun perubahan IKU yang digunakan. Adapun pada tahun 2016, terlihat bahwa pencapaian kinerja per masing-masing IKU semakin membaik yaitu jumlah IKU yang bertanda hijau (tercapai) semakin meningkat yaitu sejumlah 29 IKU dibanding tahun 2015 hanya sejumlah 26 IKU.

C. Capaian Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari hasil ringkasan capaian kinerja 2016 yang telah dibandingkan dengan capaian tahun 2015, maka dapat dijelaskan beberapa penyebab dan alasan atas capaian masing-masing IKU yaitu sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

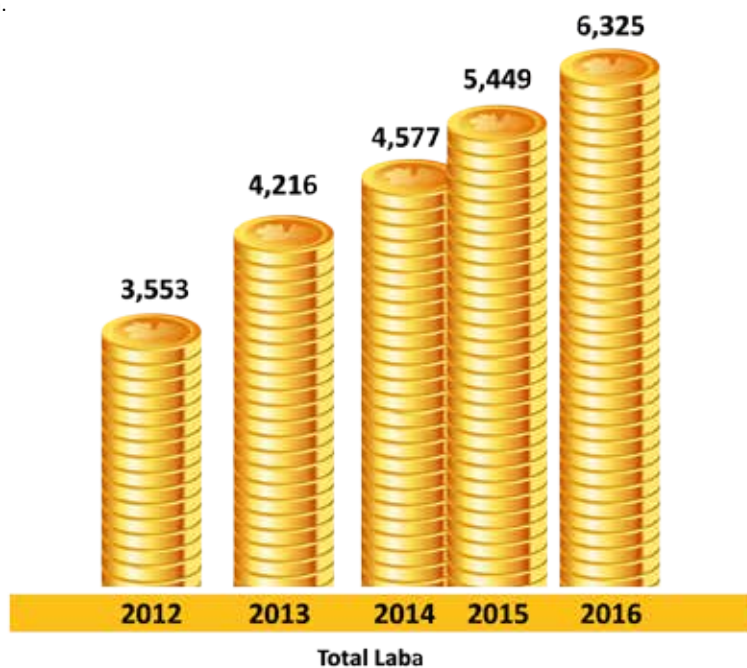
Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah

Tabel Peningkatan Data Kinerja BUMN Tahun 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Aset	3,553	4,216	4,577	5,449	6,325
Liabilitas	2,715	3,253	3,487	3,686	4,092
Ekuitas	838	963	1,091	1,763	2,235
Pendapatan	1,571	1,750	1,937	1,685	1,754
Laba tahun berjalan	139	117	148	147	166
Belanja modal	129	196	241	268	298

1. Jumlah Aset BUMN

Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN untuk terus meningkatkan asetnya karena aset adalah salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja perusahaan.



Total aset dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp 6.325 triliun, meningkat dari posisi akhir tahun 2015 sebesar Rp 5.449 triliun. Dari jumlah tersebut, maka pencapaian indikator utama jumlah aset BUMN sebesar 5.632 triliun terlampaui di tahun 2016.



2. Jumlah Laba BUMN

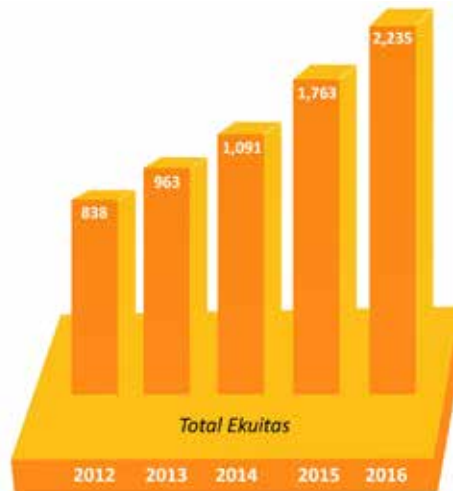
Laba merupakan salah satu ukuran keberhasilan dari suatu perusahaan yang mencerminkan efektivitas operasional perusahaan tersebut karena merupakan selisih antara pendapatan yang didapatkan dengan biaya yang dikeluarkan.



Total Laba dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp 166 triliun, meningkat dari posisi akhir tahun 2015 sebesar Rp 147 triliun. Dari jumlah tersebut, maka pencapaian indikator utama jumlah laba BUMN sebesar 143 triliun terlampaui di tahun 2016.

3. Jumlah Ekuitas BUMN

Ekuitas merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kekayaan bersih perusahaan, ekuitas BUMN juga dapat menjadi ukuran perkembangan nilai kekayaan Pemerintah yang diinvestasikan dalam bentuk kepemilikan perusahaan (BUMN).



Nilai total ekuitas dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.235 triliun, meningkat dari posisi akhir tahun 2015 yang sebesar Rp 1.763 triliun. Hal tersebut menunjukkan pencapaian indikator utama jumlah aset BUMN adalah sebesar 1.340 triliun terlampaui di tahun 2016.

4. Jumlah Capex BUMN

Belanja Modal (Capital expenditure) adalah alokasi yang direncanakan (dalam budget) untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara akuntansi. IKU ini bertujuan untuk memperbesar Capex BUMN agar BUMN dapat berekspansi atau meningkatkan kapasitas produksi.

Pada tahun 2016 jumlah belanja modal BUMN mencapai Rp 298 triliun, meningkat dari pencapaian belanja modal BUMN tahun 2015 yang mencapai Rp 268 Triliun. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2016 ini target Jumlah Capex BUMN sebesar 401 triliun belum tercapai dikarenakan banyaknya proyek BUMN yang mengalami keterlambatan pekerjaan sehingga dialihkan ke tahun 2017.

5. Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500

Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Fortune yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik pemerintah teratas yang diperingkatkan berdasarkan pendapatan bruto mereka setelah penyesuaian dibuat oleh Fortune untuk menghindari dampak pajak eksis yang dikumpulkan perusahaan. Pada tahun 2016, BUMN yang masuk ke dalam daftar Global Forbes 500 adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Berdasarkan hal tersebut target Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 tahun 2016 sebanyak 3 BUMN tidak tercapai karena proses pembentukan holding BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan serta holding BUMN Kepelabuhanan terealisasi.

6. Kontribusi BUMN terhadap Negara (Pajak + Dividen)

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pembayaran pajaknya dimana pajak adalah salah satu kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional terutama dalam penerimaan Negara.

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan setoran dividen dimana dividen adalah salah satu kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional terutama dalam penerimaan Negara.

Pada tahun 2016 jumlah setoran pajak BUMN mencapai Rp 168 triliun sedangkan setoran dividen dari BUMN mencapai Rp 36 triliun dengan total setoran pajak dan dividen sebesar Rp 206 triliun. Berdasarkan hal tersebut pencapaiannya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp 244 triliun.

7. Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)

KPKU merupakan suatu sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja BUMN berbasis Kriteria Kinerja Unggul yang diadopsi dari Malcolm Balgride Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) yang diimplementasikan melalui program pengembangan dan penerapan sistem manajemen kinerja BUMN mulai tahun 2012. KPKU bertujuan menjadi metode terpadu dalam pengelolaan kinerja BUMN yang diperuntukkan menghasilkan nilai yang meningkat kepada pelanggan dan kepada pemangku kepentingan lainnya sehingga berdampak pada keberlangsungan perusahaan dan meningkatkan efektifitas dan kapabilitas BUMN secara menyeluruh. Jumlah BUMN yang masuk kategori good performance pada tahun 2016 sebanyak 22 BUMN belum mencapai target sebanyak 35 BUMN. Hal tersebut dikarenakan masih banyak BUMN yang belum melakukan assessment KPKU.

8. Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

Pada bulan Mei 2016 telah disahkan Roadmap BUMN Tahun 2015 – 2019 yang disusun dalam kerangka 4 pilar strategis yaitu sinergi antar BUMN, hilirisasi dan kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah, kemandirian keuangan dan penciptaan nilai.

Pada tahun 2016 telah ditargetkan pembentukan 6 holding BUMN yaitu holding Migas, Holding Pertambangan, Holding Perbankan dan Jasa Keuangan, Holding Perumahan, Holding Kontruksi dan Jalan Tol serta Holding Pangan. Proses pembentukan holding memerlukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sekretaris Negara (Setneg). Sampai tanggal 31 Desember 2016 progres pembentukan holding dapat dilihat dari grafis berikut :

Holding	STATUS Pembahasan Antar Kementerian (PAK)	Harmonisasi
Migas	☒	☒
Pertambangan	☒	☒
Jasa Keuangan	☒	
Perumahan	☒	
Tol dan Konstruksi	☒	
Pangan	☒	

Berdasarkan data tersebut, realisasi sampai dengan tahun 2016 sebesar 40% atau lebih besar dari target sebesar 25%.

9. Tercapainya SLA Penugasan PSO

Pada tahun 2016 terdapat 12 BUMN yang mendapat penugasan PSO dari Pemerintah. Secara keseluruhan realisasi penggunaan Dana PSO oleh BUMN sebesar 105,91% atau lebih besar dari target tahun 2016 sebesar 93%.

No.	BUMN	RKAP TA 2016	Program Tahun 2016	Prosentase (%)
		1	2	3 = 2 : 1
1.	Perum Damri	96,649,031,000	96,122,922,000,00	99.46
2.	PT Kereta Api Indonesia	182,738,051,000	1,799,229,560,000,00	984.59
3.	PT Pertamina	39,105,900,000,000	35,205,683,000,000,00	90.03
4.	PT Perusahaan Listrik Negara	50,670,000,000,000	62,370,000,000,000,00	123.09
5.	PT POS Indonesia	341,598,000,000	341,598,000,000,00	100.00
6.	PT Pupuk Indonesia	30,063,193,000,000	30,063,193,000,000,00	99.96
7.	Perum Bulog	20,993,345,400,000	20,993,345,400,000,00	100.00
8.	PT ASDP Ferry Indonesia	325,524,237,000	127,823,158,405,00	39.27
9.	LKBN ANTARA	138,100,000,000	134,000,000,000,00	97.03
10.	PT Sang Hyang Seri	498,981, 100,000	345,094, 405,536,00	69.16
11.	PT Peln	2,511,040,344,344	2,199,857,847,437,00	87.61
12.	PT Pertani	404,452,300,000	259,737,723,500,00	64.22
	TOTAL	145,331,521,463,344,00	153,924,770,016,878,00	105.91

Sasaran Strategis 2:

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN

Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang di maksudkan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan permintaan masyarakat. Oleh karena itu core business dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima, baik dalam bentuk pelayanan administratif, pelayanan barang, maupun pelayanan jasa. Pemberian pelayanan publik tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas dan prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Fungsi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah terbagi ke dalam tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah.

Kementerian BUMN merupakan instansi pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan BUMN, sehingga pelayanan yang diharapkan dari Kementerian BUMN adalah dalam kaitannya dengan pembinaan BUMN tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian BUMN berbeda dengan instansi lain yang langsung melayani kebutuhan masyarakat luas seperti kantor pelayanan pajak atau kantor bea dan cukai, namun fungsi utama pelayanan yang diberikan berupa kebijakan, perizinan, maupun regulasi kepada BUMN, walaupun terdapat juga kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penyediaan data dan informasi tentang BUMN maupun Kementerian BUMN.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, perlu dilakukan pengukuran tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran tingkat pelayanan tersebut dilaksanakan dengan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sehingga dapat diketahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Sebagai pedoman dalam penyusunan IKM, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai cara penyusunan IKM serta unsur-unsur dalam penilaian IKM, namun karena jenis pelayanan dan masyarakat atau pemangku kepentingan dari setiap instansi pemerintah berbeda-beda, pedoman tersebut memberikan fleksibilitas dalam operasionalisasi pengukuran IKM. Adapun pedoman tersebut merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Perubahan dimaksud adalah terkait penyempurnaan parameter penilaian.

Dalam sasaran strategis ini, terdapat dua indikator kinerja utama yang ditargetkan yakni:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2016	Pencapaian %
Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	84%	74,3%	85,5%
Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/ <i>stakeholder</i> atas pelayanan Kementerian BUMN	82%	74%	90,2%

Uraian IKU :

1. Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 84%.

Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN diukur melalui survei dengan penyebaran kuesioner kepada BUMN. Survei tersebut telah selesai dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Bagian Riset Kementerian BUMN. Skor yang didapat dari survey tersebut adalah 74,33% yang menunjukkan persepsi BUMN terhadap pelayanan Kementerian BUMN masuk dalam kategori memuaskan secara aggregate. Namun skor tersebut masih jauh dibawah target yaitu 84%, sehingga untuk kedepannya area of improvement dalam pelayanan perlu untuk ditindaklanjuti agar indeks kepuasan pelayanan terhadap BUMN dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

2. Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/ *stakeholders* atas pelayanan Kementerian BUMN pada tahun 2016 ditargetkan 82 %.

Pengukuran indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/*stakeholders* atas pelayanan Kementerian BUMN dilakukan dengan cara melakukan survey melalui kuesioner. Survey tersebut telah selesai dilaksanakan dengan bekerjasama dengan PT Sucofindo (Persero) sebagai pihak ketiga pelaksana survey. Skor yang didapat dari survey tersebut adalah 74% yang menunjukkan persepsi instansi pemerintah terkait/*stakeholders* terhadap pelayanan Kementerian BUMN masuk dalam kategori memuaskan secara aggregate. Namun skor tersebut masih jauh dibawah target yaitu 82%, sehingga untuk kedepannya area of improvement dalam pelayanan perlu untuk ditindaklanjuti agar indeks kepuasan pelayanan terhadap instansi pemerintah terkait/*stakeholders* dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Sasaran Strategis 3:

Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2016	Pencapaian %
Nilai rata-rata GCG	83	86.49	104.2%
Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	100%	100%	100%
Persentase kepatuhan proses Operasional BUMN	100%	100%	100%
Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	100%	100%	100%

Uraian IKU:

1. Nilai rata-rata GCG BUMN

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Menteri BUMN berkewajiban memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) pada BUMN, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran.

Kriteria penilaian GCG terdiri dari 5 aspek, 50 Indikator dan 160 Parameter penerapan GCG yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian/Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Hasil pengukuran GCG dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Sangat Baik (jika skor di atas 85);
- Baik (Skor di atas 75 sampai dengan 85)
- Cukup (Skor di atas 60 sampai dengan 75)
- Kurang (Skor di atas 50 sampai dengan 60)
- Tidak Baik (skor sampai dengan 50)

Target IKU ini di tahun 2016 adalah 83 poin. Skor rata-rata GCG di tahun 2016 adalah 86.49 poin. Nilai rata-rata GCG BUMN di tahun 2016 ini membuat capaian IKU ini mencapai 104.2%.

3. Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN

Perencanaan BUMN disusun dalam RKAP tahun 2016 dimana proses perencanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri BUMN, dimana menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan tersebut, BUMN diharuskan telah menyampaikan perencanaan BUMN yang tertuang dalam RKAP selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun anggaran perusahaan tersebut.

4. Persentase kepatuhan proses operasional BUMN

Pelaksanaan operasional BUMN selama tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri BUMN.



Sasaran Strategis 4

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

1. Terpenuhi Batas Waktu Penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)

Shareholders Aspiration Letter (SAL) merupakan dokumen yang berisi pedoman penyusunan target-target Rencana Kerja dan Anggaran BUMN (RKAP) untuk tahun buku berikutnya. Sedangkan menurut peraturan Menteri BUMN tentang penyusunan RKAP, RKAP BUMN paling lambat harus sudah diserahkan kepada Pemegang Saham/ Pemilik Modal 60 hari sebelum tahun pelaksanaan RKAP. Oleh karena itu, guna mendukung proses penyusunan RKAP, dokumen SAL harus segera diterbitkan paling lambat bulan Agustus setiap tahunnya dan pada tahun 2016, telah diterbitkan dokumen SAL melalui surat Menteri BUMN Nomor: S-513/MBU/08/2016 pada tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017.

2. Presentase hasil riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan

Pada tahun 2016, unit riset telah menyusun 4 (empat) kajian, yang seluruhnya telah menjadi bahan kebijakan, yaitu:

- Analisis kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN, Kajian ini dilakukan untuk mengetahui, mengevaluasi, dan mendapatkan saran dan masukan dari BUMN terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Kementerian BUMN ataupun yang telah didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Dari hasil penelitian diharapkan dapat diidentifikasi area of improvement terhadap layanan yang diberikan dan selanjutnya dirumuskan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas layanan Kementerian BUMN di masa yang akan datang.

- Analisis kesiapan BUMN menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Dengan harapan akan meningkatkan daya saing ASEAN dalam persaingan global, ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan sejak 31 Desember 2015. Dengan pemberlakuan itu, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi yang bergerak hampir di seluruh

sektor industri dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang yang terbuka bagi keberlangsungan bisnisnya.

- Kajian model dividen BUMN

Riset ini dilakukan sebagai langkah awal menuju perumusan kebijakan dividen yang obyektif, rasional, dan adil tersebut. Di dalamnya dilakukan kajian terhadap 25 BUMN besar menurut aset yang berkontribusi terhadap 95% total dividen. Setiap BUMN dikaji faktor-faktor penentu kinerja (laba bersih) dan faktor kunci (determinant) penentu dividen. Agar lebih aplikatif, untuk setiap BUMN dibuat model dalam format excel yang memungkinkan pengguna untuk melakukan simulasi dan sensitivity analysis dinamika variabel-variabel eksternal dan internal perusahaan terhadap pencapaian laba dan pemenuhan target dividen yang telah ditentukan.

- Kajian holding BUMN: Critical Success Factors.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah (a) Menjelaskan proses dan prosedur pembentukan dan pengelolaan holding BUMN, (b) Mengukur dan menguji efektivitas pembentukan dan pengelolaan holding yang telah dibentuk, (c) mengidentifikasi critical success factors dalam proses pembentukan dan pengelolaan holding BUMN, (d) memberikan rekomendasi kebijakan dalam pembentukan dan pengelolaan holding BUMN di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan pada BUMN yang berbentuk strategic holding BUMN dan operating holding BUMN.

Berdasarkan hal tersebut, target Presentase hasil riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan tahun 2016 sebesar 80% telah tercapai karena seluruh hasil riset telah dijadikan bahan kebijakan atau 100%.

3. Persentase Kebijakan Kementerian BUMN dengan Pencapaian Visi dan Misi Presiden.

Visi dan Misi Kementerian pada Renstra Kementerian BUMN tahun 2015-2019 Visi dan Misi Kementerian BUMN sama dengan Visi dan Misi Presiden. Hal tersebut sesuai dengan arahan presiden. Oleh karena itu seluruh kebijakan Kementerian BUMN sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi Presiden.

Sasaran Strategis 5:

Pembinaan BUMN yang optimal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2016	Pencapaian %
Terpenuhi waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan	100%	100%	100%
Penetapan Direksi sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%
Penyelenggaraan RUPS tepat waktu	100%	100%	100%
Ketersediaan kontrak kinerja BUMN	100%	100%	100%

Uraian IKU:

1. Terpenuhi waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan

IKU ini bertujuan untuk menjadikan budaya kerja di lingkungan Kementerian BUMN menjadi lebih transparan, profesional dan akuntabel serta menunjang pengambilan keputusan yang lebih cepat terutama dalam usulan aksi kegiatan BUMN. IKU ini diukur berdasarkan oleh Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri BUMN atau Sekretaris Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target pencapaian IKU ini difokuskan pada layanan Evaluasi Kinerja Triwulanan/Berkala dan persetujuan corporate action yang ditargetkan atas seluruh proses sesuai dengan standar layanan. Selama tahun 2016, IKU ini telah tercapai 100%.

2. Penentuan Direksi sesuai Peraturan

Sepanjang tahun 2016, telah dilakukan proses pemberhentian dan/atau pengangkatan Direksi BUMN sebanyak 49 orang.

3. Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Penyelenggaraan RUPS tepat waktu menjadi salah satu IKU Kementerian dengan tujuan agar kepentingan pemegang saham dapat

terlindungi. Dengan terlaksananya RUPS tepat waktu dan dipersiapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan BUMN oleh Kementerian BUMN.

Pelaksanaan RUPS yang telah dilakukan selama tahun 2016 adalah RUPS maupun RPB Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2017 serta RUPS maupun RPB Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015.

Selama tahun 2016, pelaksanaan RUPS telah dilakukan 100% tepat waktu dimana seluruh BUMN telah melaksanakan RUPS tepat waktu dimana sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 23 menyatakan bahwa batas waktu RUPS Laporan Tahunan paling lambat 5 bulan setelah tahun berlalu. Sementara itu untuk pelaksanaan RUPS RKAP diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No.KEP- 101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, dimana batas waktu RUPS adalah 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan.

4. Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

Kontrak kinerja adalah suatu kesepakatan yang berisi mengenai indikator kinerja yang ingin dicapai baik sasaran pencapaiannya maupun jangka waktu pencapaiannya. Ada 2 (dua) hal yang perlu dicantumkan dalam kontrak kinerja yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai serta program kerja untuk mencapainya.

Seluruh target kontrak kinerja BUMN sudah terealisasi semua pada saat pelaksanaan RUPS dan RPB Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016.

Sasaran Strategis 6:

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif

1. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian LHP BPK

Capaian IKU persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK sebesar 100% dari target 100% yang merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas BPK di Kementerian BUMN. Hasil pemeriksaan BPK dalam kurun waktu 2012-2016 telah merekomendasikan 279 rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian BUMN, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN.

2. Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

Capaian persentase Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) adalah 100% dari target, merupakan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. PKPT tahun 2016 memuat 66 kegiatan pengawasan intern, dan seluruhnya atau sebanyak 66 kegiatan telah diterbitkan surat tugasnya dan telah dilaksanakan.



Sasaran Strategis 7 :

Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

1. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan

Target 83%

Pelaksanaan pelatihan pada tahun 2016 didasarkan pada program IDP masing-masing pegawai sebagaimana yang telah diasumsikan dalam rencana kertas kerja APBN tahun 2016 pada program peningkatan kualitas SDM. Target jumlah peserta yang akan mengikuti pelatihan sepanjang tahun 2016 adalah sebanyak 859 peserta, dimana total pegawai aktif sebanyak 291 orang sehingga masing-masing pegawai akan mengikuti pelatihan rata-rata 3 kali selama setahun. Sampai dengan triwulan IV tahun 2016, terdapat 1396 pegawai yang sudah mengikuti pelatihan atau sebanyak 162.5% dari total pegawai yang ditargetkan pada tahun 2016.

Adapun pelatihan yang telah dilaksanakan sepanjang triwulan IV tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - Diklat Perbendaharaan | - Bimtek ULP |
| - English Club | - Seminar PTC Holding Company |
| - Manajemen Organisasi | - Diklatpim Tk. II |
| - Life Sharing | - Diklatpim Tk. III |
| - Business Analyst Level 4 | - Diklatpim Tk. IV |
| - Seminar PTC Emerging Leader | |

2. Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan

Target 60%

Berdasarkan pemetaan kompetensi masing-masing pegawai berdasarkan hasil asesmen kompetensi manajerial dan asesmen kompetensi teknis, maka pada tahun 2016 telah disiapkan program pengembangan masing-masing individu berdasarkan peta gap kompetensinya. Dari 291 pegawai seluruhnya telah disusun program pengembangannya atau tercapai 100% sampai dengan triwulan IV tahun 2016. Namun demikian, pelaksanaan pengembangannya dilakukan berdasarkan komitmen masing-masing pegawai melalui kesadarannya untuk mendaftarkan diri pada daftar diklat yang disampaikan sesuai dengan rumpun jabatannya. Sedangkan pegawai yang tidak mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan akan disiapkan program pengembangan diluar dari subject training yang sudah diumumkan. Kegiatan tersebut disediakan dalam bentuk seminar maupun workshop.

Berikut ini adalah ringkasan dari IDP tahun 2016 sebagai berikut (rincian IDP terlampir):

No	Jenis Diklat	Jumlah Subject Training	Jumlah Rata-rata Pegawai yang Akan Mengikuti Training Pada Masing-masing Subject Training
1	Pengembangan kompetensi manajerial	4	32
2	Pengembangan kompetensi teknis umum	22	12
3	Pengembangan kompetensi Teknis inti	39	6
4	Pengembangan jenis pengayaan	3	150
		68	

- Jumlah total pegawai : 291 orang
- Rata-rata masing-masing pegawai akan mengikuti 3 subject training

3. Persentase pelaksanaan diklat yang sesuai dengan Training Needs Analysis (TNA)

Target $\geq 90\%$

Penyusunan perencanaan subject training untuk pelaksanaan diklat telah dilakukan berdasarkan training need analysis yang ditandai dengan adanya program pengembangan masing-masing individu atau individual development plan (IDP). Jumlah subject training yang dilaksanakan selama triwulan IV tahun 2016 sebanyak 11 dari total 68 subject training atau tercapai sebesar 16.2%. 68 subject training tersebut terdiri dari 5 komponen jenis diklat seperti tersebut pada IKU 2 di atas. Sehingga total subject training yang sudah diselenggarakan sepanjang 2016 adalah 80 subject training atau melebihi target yaitu sebesar 117.6% dikarenakan adanya subject training tambahan diluar yang sudah direncanakan dan dijadwalkan diawal tahun.

Proses training need analysis dilakukan pertama kali melalui identifikasi kompetensi masing-masing rumpun jabatan, kemudian ditetapkan subject training yang tepat untuk memenuhi suatu kompetensi.

Berdasarkan subject training yang telah ditetapkan, maka masing-masing pegawai dapat mendaftar pada training yang sesuai dengan rumpun jabatannya dan prioritas yang harus dipilih adalah training yang ditujukan untuk menutup gap kompetensi yang dimiliki.

Subject training yang dapat dipilih oleh masing-masing pegawai mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Pelatihan untuk pemenuhan kompetensi manajerial

Ketentuan pelatihan kompetensi manajerial adalah sebagai berikut:

Rumpun Jabatan	Jml Kompetensi Jabatan	Ketentuan Jml Gap Kompetensi
Seluruh Rumpun Jabatan	10 (Kecuali Kompetensi Integrity)	3

Apabila memperoleh hasil assessment kompetensi dengan gap sama dengan atau lebih dengan ketentuan jumlah gap di atas wajib mengambil minimal 1 diklat peningkatan kompetensi manajerial.

Apabila memperoleh hasil assessment kompetensi dengan gap kurang dari ketentuan jumlah gap di atas boleh tidak mengambil diklat peningkatan kompetensi manajerial.



2) Pelatihan untuk pemenuhan kompetensi teknis

Ketentuan jumlah gap kompetensi:

Rumpun Jabatan	Jml Kompetensi Jabatan	Ketentuan Jml Gap Kompetensi
Teknis	4	2
Data	3	2
Hukum	7	4
MSE	5	3
Riset	3	2
Sistem Informasi	2	1
SDM	4	2
ORB	5	3
Inspektorat	4	2
Manajemen Kinerja	4	2
Perencanaan dan Anggaran	4	2
Administrasi	3	2
Keuangan	4	2
Tata Usaha	3	2
Humas	3	2
Protokol	7	4
Perlengkapan	7	4
Unit Layanan Pengadaan	7	4

Apabila memperoleh hasil assessment kompetensi dengan gap sama dengan atau lebih dengan ketentuan jumlah gap di atas sesuai dengan rumpun jabatannya wajib mengambil diklat minimal satu diklat pada rumpun jabatannya dan tidak diperkenankan untuk mengambil diklat diluar rumpun jabatannya.

Apabila memperoleh hasil assessment kompetensi dengan gap kurang dari ketentuan jumlah gap di atas dapat mengambil diklat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Boleh tidak mengambil diklat peningkatan kompetensi teknis inti.
- Maksimal dapat memilih 1 pilihan diklat untuk subject sertifikasi, shortcourse atau pengayaan. Khusus shortcourse ditambah persyaratan minimal 3 kali mengikuti Business English Club pada tahun 2016 dan memiliki skor TOEFL minimal 450 atau yang setara apabila menggunakan metode tes yang lain. Sedangkan diklat pengayaan (IELTS + test) ditambah persyaratan minimal 1 kali mengikuti Business English Club.
- Maksimal dapat memilih 2 pilihan diklat untuk peningkatan kompetensi umum.
- Maksimal dapat memilih 1 pilihan diklat untuk peningkatan kompetensi diluar dari rumpun jabatannya.

3) Pelatihan untuk pemenuhan kompetensi umum

Ketentuan jumlah gap kompetensi:

Rumpun Jabatan	Jml Kompetensi Jabatan	Ketentuan Jml Gap Kompetensi
Seluruh Rumpun Jabatan	10 (Kecuali operasionalisasi aplikasi perkantoran dan kompetensi pengelolaan BUMN)	1

Apabila memperoleh hasil assessment kompetensi dengan gap sama dengan atau lebih dengan ketentuan jumlah gap di atas wajib mengambil minimal 1 diklat pengembangan teknis umum.

Apabila memperoleh hasil assessment kompetensi dengan gap kurang dari ketentuan jumlah gap di atas boleh tidak mengambil diklat peningkatan kompetensi teknis umum.

Program lain yang ikut mendukung pencapaian sasaran mewujudkan SDM

yang kompeten dan profesional di lingkungan Kementerian BUMN adalah program Knowledge Corner, antara lain sebagai berikut:

1) Program Knowledge Corner dilaksanakan dalam dua kegiatan yaitu kegiatan life sharing dan kegiatan business english club.

2) Kegiatan life sharing diselenggarakan setiap minggu pertama per bulan. Materi-materi yang dibahas adalah materi yang berkaitan dengan bagaimana menjalani rutinitas hidup yang lebih baik sehingga diharapkan tumbuh motivasi yang pada akhirnya meningkatkan produktifitas bekerja. Selama tahun 2016, life sharing telah diselenggarakan selama 6 kali.

Peserta yang diundang dalam kegiatan life sharing tidak hanya seluruh pegawai Kementerian BUMN namun mengundang pihak-pihak yang berhubungan dengan Kementerian BUMN dalam rangka mengikat hubungan yang semakin erat dalam wadah seminar yang ringan dan humanis.

3) Kemudian, kegiatan kedua adalah business english club yang diinisiasi untuk memfasilitasi suasana berkomunikasi dalam bahasa inggris yang cukup jarang digunakan apabila tidak ada pertemuan dengan relasi internasional. Business english club diselenggarakan dengan model debat dalam bahasa inggris agar kemampuan berkomunikasi dapat tersalurkan sekaligus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi baik dalam pengucapan maupun tata bahasa. Kegiatan ini langsung mengundang seorang native speaker agar tidak ada peluang berbicara dalam bahasa indonesia.

Sejak triwulan III, dilakukan perubahan formula english club dari yang semula debat menjadi format public speaking. Format debat yang selama ini dijalankan dirasa kurang merangsang dan kurang memberikan kesempatan yang banyak bagi peserta untuk mempraktekkan komunikasinya dalam bahasa inggris. Sedangkan dalam format public speaking disajikan dalam 8 kegiatan yaitu an action story, discourse management, a journey through time, creating a persona, emmm errrr focus please..., powers of persuasion, impromptu story telling, and cohesion.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2016, english club telah dilaksanakan selama 8 kali yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2016. Adapun bulan juni dan Juli untuk sementara ditunda pelaksanaannya karena bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Lebaran.



Sasaran Strategis 8:

Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern

1. Persentase Pencapaian Road Map Transformasi Organisasi

Transformasi Kementerian BUMN dilaksanakan dalam rangka menuju organisasi korporasi yang modern, untuk itu diperlukan inisiatif transformasi sebagaimana tahapan berikut:

Tahap 1 : Persiapan

Tahap 2 : Mobilisasi

Tahap 3 : Transformasi

Tahap 4 : Eksekusi

Target pencapaian transformasi organisasi di tahun 2016 ini adalah tahap persiapan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan High Level Blueprint organisasi:
 - a) Benchmark Best Practices
 - b) Pendefinisian struktur super holding
 - c) Desain peran dan tanggung jawab level eksekutif
 - d) Desain mekanisme key governance dalam pengelolaan BUMN

Kegiatan penyusunan High Level Blueprint organisasi dilaksanakan oleh konsultan untuk melakukan kajian Roadmap Organisasi Kementerian BUMN. Penyusunan kajian Roadmap Organisasi meliputi penyusunan kerangka teori, arah strategis pembinaan BUMN, benchmark pengelolaan BUMN di berbagai negara, pengelolaan BUMN di Indonesia, pemetaan fungsi stakeholders, dan kerangka transformasi organisasi. Namun pengadaan konsultan yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2016 batal ditindaklanjuti dikarenakan kebijakan pemotongan anggaran Kementerian/ Lembaga.

- 2) Penyempurnaan mekanisme governance organisasi existing sebagai transisi:
 - a) Standard Operating Procedure (SOP)
 - b) Standar Layanan
 - c) Pra-kajian Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengelola BUMN

Pelaksanaan transisi SDM dan Organisasi tersebut dimulai pada Triwulan III dan selesai pada akhir tahun 2016.

Sasaran Strategis 9:

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik dan bersih

1. Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN

IKU ini bertujuan agar Kementerian BUMN dapat memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, mengimplementasikan budaya kerja, hasil kerjanya optimal, dan memiliki sistem informasi manajemen kinerja untuk pertanggungjawaban. Melalui penerapan SAKIP instansi pemerintah diharapkan dapat merencanakan hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kerjanya secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pada publik.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2015 oleh Kementerian PAN dan RB, melalui surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/3936/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 hal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian BUMN memperoleh nilai 64.05 atau predikat B. Berdasarkan penilaian tersebut, Kementerian BUMN menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi dengan hasil yang memadai dengan beberapa perbaikan minor.

Rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti di Kementerian BUMN Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan Renstra dengan memperhatikan Road Map Transformasi BUMN 2015 – 2019 serta menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja hingga indikator kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan;
- 2) Menyempurnakan aplikasi keuangan dan kinerja yang ada sehingga selain dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja namun juga dapat memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan;
- 3) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian BUMN melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodic, mekanisme reward and punishment kinerja, dan sebagainya.

Terkait rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB tersebut, sampai dengan Triwulan III tahun 2016 ini, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Renstra Kementerian BUMN telah ditetapkan oleh Menteri BUMN melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-16/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015 – 2019 dan telah diluncurkan kepada seluruh pegawai Kementerian BUMN dan Dirut BUMN pada hari ulang tahun Kementerian BUMN tanggal 13 April 2016.
- 2) Penyempurnaan aplikasi manajemen kinerja melalui portal Office Automation (OA) Kementerian BUMN bersama Bidang Teknologi Informasi, Asdep Data dan Teknologi Informasi.
- 3) Percepatan pelaksanaan manajemen kinerja dan budaya kinerja di lingkungan Kementerian BUMN melalui penilaian kinerja secara periodic, mekanisme reward and punishment kinerja, dan sebagainya dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyusunan Sistem Manajemen Kinerja (Tim PSMK) yang beranggotakan perwakilan dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian BUMN.

Tim PMK telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Rapat Kegiatan Tim;
- b. Diklat Balance Score Card bagi seluruh anggota Tim dengan perwakilan Chief Transformation Officer (CTO) Kementerian Keuangan sebagai salah satu narasumber;
- c. Benchmarking sistem manajemen kinerja ke Pusat Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) Kementerian Keuangan;



- d. Penyusunan draft Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian BUMN;
- e. Pembahasan konsep Manajemen Kinerja Organisasi (MKO).

- 4) Pengadministrasian Dokumentasi SAKIP unit kerja yang meliputi Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulanan.
- 5) Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK).
- 6) Asistensi penyusunan Manual IKU dan Form Evaluasi IKU Unit Kerja dengan mengundang para Administrator SAKIP Unit Kerja yang telah ditetapkan melalui Memorandum Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: Mo-09/S. MBU/06/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- 7) Monitoring dan Evaluasi Output bulanan.
- 8) Rapat persiapan Evaluasi SAKIP 2016 bersama dengan Inspektorat dan Unit Kerja.
- 9) Monitoring capaian kinerja triwulanan Unit Kerja.

Sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/3201/D.I.PANRB/09/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, Kementerian PAN dan RB akan melaksanakan evaluasi SAKIP mulai tanggal 4 Oktober 2016 selama 20 (dua puluh) hari kerja, yang bertujuan untuk menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian BUMN serta memberikan saran dan perbaikan yang diperlukan.

2. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN

Untuk mendukung program reformasi birokrasi, Kementerian BUMN dituntut untuk selalu dapat membangun organisasi yang Good Governance dan Clean Government. Untuk melihat sejauh mana kesesuaian reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian BUMN dalam memenuhi harapan masyarakat, maka diperlukan adanya penilaian atas pelaksanaan program-program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dengan menggunakan metode penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Model PMPRB ini menitikberatkan penilaian pada 2 (dua) komponen utama yaitu Komponen Pengungkit (Enablers) meliputi kriteria kepemimpinan, perencanaan strategis, SDM aparatur, kemitraan dan sumber daya, serta proses; dan Komponen Hasil (Result) yang terdiri dari kriteria hasil pada masyarakat/ pengguna layanan, kriteria hasil pada komunitas lokal,

nasional dan internasional, kriteria hasil pada sumber daya manusia aparatur, dan kriteria hasil kinerja utama. IKU ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian bum. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Nilai self-assessment Program RB Tahun 2015 telah diperoleh melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target IKU PMPRB yaitu antara lain: 1) Pelaksanaan self assessment PMPRB 2016; 2) Finalisasi roadmap reformasi birokrasi; 3) Monitoring tindak lanjut hasil PMPRB Tahun 2015. Berdasarkan hasil self assessment PMPRB oleh Tim Asesor PMPRB Kementerian BUMN, skor PMPRB tahun 2016 adalah sebesar 79,21 dari skala 100. Nilai tersebut telah disampaikan kepada Kementerian PAN-RB secara online pada tanggal 28 April 2016.

Area Manajemen Perubahan memperoleh skor sebesar 82,56%. Penataan Peraturan dan Perundang-undangan memperoleh skor sebesar 75%. Penataan dan penguatan organisasi sebesar 83,5%. Penataan dan Tata Laksana memperoleh skor sebesar 76,85%. Penataan sistem manajemen SDM berhasil memperoleh skor 94,16%. Penguatan akuntabilitas memperoleh skor sebesar 92,27%. Penguatan pengawasan memperoleh skor sebesar 76,01%. Sementara peningkatan kualitas layanan publik memperoleh skor sebesar 78,77%. Secara keseluruhan komponen proses memperoleh nilai 83,73%, sementara komponen hasil memperoleh skor 72,43%.

Selanjutnya pada Triwulan IV, sebagaimana surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/3201/D.I.PANRB/09/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, akan dilaksanakan evaluasi implementasi Program RB di Kementerian BUMN yang akan difokuskan pada perubahan dan perkembangan yang terjadi selama tahun 2015-2016 di Kementerian BUMN.

3. Nilai Inisiatif Anti Korupsi

Kegiatan penilaian inisiatif anti korupsi telah dilaksanakan pada bulan Desember 2016. Dalam Program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi, Kementerian BUMN melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan inisiatif anti korupsi sebagai upaya untuk mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut sebagai wujud kesungguhan Kementerian BUMN dalam meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah. Dari skor 1 sampai dengan 100, nilai Inisiatif Anti Korupsi di Kementerian BUMN adalah sebesar 75,23 dari target sebesar 73.

Sasaran Strategis 10:

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

1. Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal

Target 85%

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara Secara Elektronik serta adanya himbauan-himbauan kepada Keasdepan Pembina BUMN dan BUMN agar tertib menyampaikan data kinerja BUMN melalui portal FIS, maka progress penyampaian data, laporan dan dokumen melalui portal FIS mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Hingga saat ini, terdapat 87 BUMN dan 20 Minoritas yang telah menyampaikan data dan laporan berkala periode tahunan audited TB 2015 secara valid dan lengkap. Selain periode tahunan Audited TB 2015, Bidang Analisis Data juga melakukan pengelolaan data dan laporan berkala periode lainnya yakni:

- 1) RKAP Final TB 2016 sebanyak 77 BUMN atau mencapai 78% dari target;
- 2) Tahunan Unaudited TB 2015 sebanyak 86 BUMN atau mencapai 88%;
- 3) Tahunan Audited TB 2015 sebanyak 87 BUMN atau mencapai 74% dari target;
- 4) Triwulan I TB 2016 sebanyak 106 BUMN atau mencapai 90% dari target.
- 5) Semester I TB 2016 sebanyak 88 BUMN atau mencapai 74% dari target.
- 6) Triwulan III TB 2016 sebanyak 63 BUMN atau mencapai 53% dari target.

Selanjutnya terkait rencana pengembangan konten portal FIS, progress sampai dengan Triwulan IV/2016 adalah telah disusunnya konsep implementasi pengembangan Portal FIS Kementerian BUMN.

2. Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi

Target $\geq 90\%$

Bidang Teknologi Informasi menggunakan aplikasi berbasis open source untuk mengukur pelaksanaan SLA yang bernama GLPI (Gestionnaire libre de parc informatique). Aplikasi tersebut digunakan untuk mencatat permasalahan yang muncul dari user dan menghasilkan nomor ticket untuk setiap permasalahan. Aplikasi tersebut dapat diakses di <http://netmon.bumn.go.id/glpi>. Sebagai jaminan atas keberlangsungan pelayanan, maka telah ditetapkan Standar Pelayanan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian BUMN sesuai dengan Nomor: PERJ-01/S.MBU/2012 dan PERJ-01/D5.MBU.4/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian telah diterbitkan juga Katalog Layanan Teknologi Informasi Komunikasi untuk melengkapi standar pelayanan sistem informasi sebagai dokumen terstruktur yang berisi informasi mengenai semua layanan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang tersedia di Kementerian BUMN.

Aplikasi GLPI ini merupakan aplikasi siap pakai yang dikembangkan oleh pihak ketiga (third party application). Dalam implementasinya pada tahun 2016 Triwulan IV, pengguna di Bidang Teknologi Informasi sebanyak 19 pengguna, yang terdiri dari Kabid Teknologi Informasi, Kasubbid Infrastruktur dan Pemeliharaan TI, Kasubbid Perencanaan dan Kebijakan TI, Kasubbid Pengembangan TI, Kasubbid Pengelolaan Data, Analis Informatika, Analis Sistem Informasi dan Jaringan, Pengelola Data Informasi, helpdesk officer, technical support, application support, programmer dan system administrator. Implementasi SLA pada tahun 2016 Triwulan IV dimaksud kemudian diinputkan ke dalam aplikasi GLPI yang menampilkan hasil analisis sebagai berikut:

1) Persentase Tiket Berdasarkan Status Tiket GLPI

Status Tiket	Jumlah Tiket tahun 2016	Persentase (%)
Ticket Solved + Closed :	2671	99,11
Processing / Ticket Not Solved	24	0,89
Pending		
Opened Ticket :	2695	100,00

2) Persentase Tiket Berdasarkan Jenis SLA

Jenis-jenis SLA	Jumlah Tiket tahun 2016	Persentase (%)
Layanan Aplikasi diluar aplikasi milik Kementerian BUMN	47	1,74
Layanan Aplikasi SMS Gateway	0	-
Layanan Aplikasi OA	352	13,06
Layanan Desktop	882	32,73
Layanan Email	153	5,68
Layanan File Sharing	40	1,48
Layanan Jaringan & Internet	287	10,65
Layanan Konsultasi TI & Otomasi Sistem	79	2,93
Layanan Multimedia	26	0,96
Layanan Pelatihan TI	26	0,96
Layanan Telekomunikasi	112	4,16
Layanan Perangkat Data Center	10	0,37
Layanan Portal ASET	21	0,78
Layanan Portal FIS	127	4,71
Layanan Portal PKBL	390	14,47
Layanan Portal Publik	90	3,34
Layanan Portal SDM	22	0,82
Perbaikan Bug dan Error	3	0,11
Un- Categories SLA*)	28	1,04
Total	2695	100,00

*) Uncategories SLA berupa administrasi naskah kedinasan dan aktivitas-aktivitas nya yang belum terkategori

Dari hasil pengukuran yang tercatat dalam aplikasi GLPI sampai dengan 31 Desember 2016, atas layanan SLA yang terselesaikan mencapai 99,11%. Jumlah permasalahan/permintaan Layanan Sistem Informasi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebanyak 2695 tiket, dengan permasalahan terbesar adalah untuk layanan desktop, laya layayanan Portal PKBLnan Portal PKBLnan Portal PKBL nan Portal PKBLnan Portal PKBL nan Portal PKBL nan Portal PKBL dan layanan Aplikasi OA.

3. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5)

Target Rata-rata skala 4

Survei Kepuasan Pengguna ditujukan untuk mengetahui pendapat dan harapan mengenai Produk dan Layanan TI KBUMN yang telah diberikan oleh Penyedia sesuai dengan yang tercantum di dalam Service Level Agreement. Informasi yang dihasilkan dari survei ini akan digunakan untuk membantu Penyedia dalam memperbaiki kinerja pelaksanaan dan pengelolaan produk dan layanan TI dengan mengidentifikasi tanggapan dan persepsi dari pelanggan/pengguna produk dan layanan.

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengukuran variabel survei menggunakan Skala Likert 5 pilihan yaitu:
1-Sangat Tidak Memuaskan, 2-Tidak Memuaskan, 3-Netral, 4-Memuaskan, 5-Sangat Memuaskan;
- 2) Nilai kepuasan pengguna terhadap kualitas produk TI secara umum yakni sebesar 3.80 (mendekati tingkat memuaskan);
- 3) Nilai kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan TI secara umum yakni sebesar 3.83 (mendekati tingkat memuaskan);
- 4) Nilai kepuasan pengguna terhadap deliverable/ keluaran TI secara umum yakni sebesar 3.82 (mendekati tingkat memuaskan);
- 5) Tingkat kepuasan pengguna tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.07 berdasarkan survei TI tahun lalu.
- 6) Beberapa hal yang menjadi masukan dari pengguna terhadap produk TI di antaranya terkait dengan pemutakhiran data, perbaikan tampilan dan fitur, peningkatan kecepatan akses, peningkatan kapasitas, dsb. Sementara hal yang menjadi masukan untuk layanan TI di antaranya terkait dengan peningkatan responsivitas, ketersediaan basis pengetahuan

(knowledge base) untuk troubleshooting, ketersediaan katalog software, peningkatan kuantitas pelatihan TI, dsb.

- 7) Sebesar 75% responden belum mengetahui tentang SLA TI;
- 8) Telepon merupakan media yang paling banyak dipilih oleh responden dalam menyampaikan keluhan TI;

4. Persentase downtime layanan TIK

Target ≤ 3 %

Durasi downtime layanan pada Tahun 2016 Triwulan IV selama 22.5 jam atau sebesar 1,02% antara lain 8 jam update Operating System mengalami gangguan, 2 jam harus rekonfigurasi ulang dikarenakan perubahan NIC pada VM Linux, 9.5 jam koneksi internet international mengalami intermitten disebabkan adanya gangguan masal dari provider dan selama 3 jam email tidak dapat diakses disebabkan adanya drive log untuk aplikasi Exchange sudah penuh.

Sasaran Strategis 11:

Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

1. Persentase Pemanfaatan Anggaran

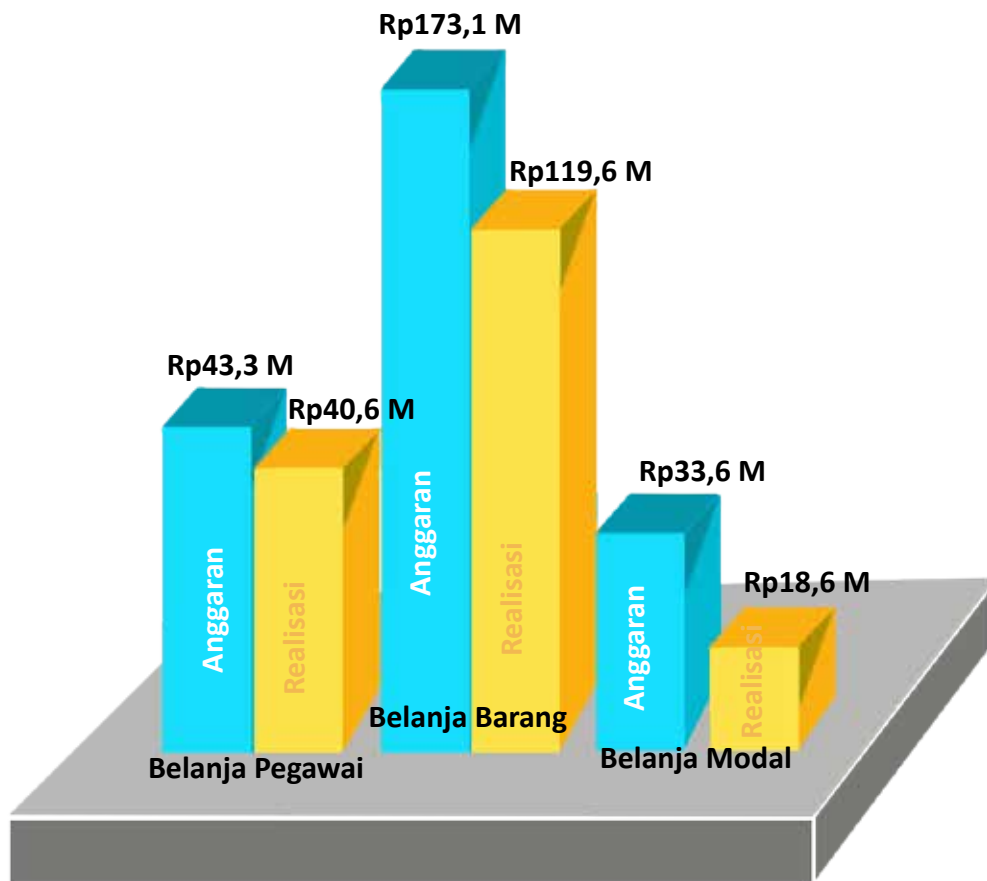
Target ≥ 90 %

Realisasi Belanja Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp177.946.666.000 atau 71,20% dari anggaran belanja sebesar Rp249.922.667.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian Belanja			
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja pegawai	43.269.962.000	40.644.839.185	93,93
2	Belanja Barang	173.078.040.000	119.624.424.863	69,12
3	Belanja Modal	33.574.665.000	18.624.019.584	55,47
Total Belanja Kotor		249.922.667.000	178.893.283.632	71,58
	Pengembalian Belanja		(946.617.632)	
Jumlah		249.922.667.000	117.946.666.000	71,20

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program	Per 31 Desember 2016		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	135.430.083.000	106.922.816.673	78,95
2	Program Pembinaan BUMN	114.492.584.000	71.023.849.327	62,03
Jumlah		249.922.667.000	177.946.666.000	71,20

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar 71,20% dari anggaran belanja, karena hal-hal sebagai berikut:

1) Terdapat Pemotongan Belanja Negara Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian BUMN sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 sehingga Kementerian BUMN harus mengidentifikasi program/kegiatan didalam Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dilakukan pemotongan yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan di Lingkup Kementerian BUMN.

2) Terdapat Penghematan Belanja Negara Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian BUMN sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 dengan melakukan blokir mandiri (self blocking). Nilai anggaran yang diblokir pada tahun 2016 sebesar Rp59.123.486.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Anggaran	Per 31 Desember 2016				
			Blokir	Anggaran Setelah Diblokir	Realisasi	%Realisasi Sebelum Blokir	%Realisasi Setelah Blokir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(6)/(3)*100	(8)=(6)/(5)*100
1	Belanja Pegawai	43.269.962.000	-	43.269.962.000	40.033.832.999	92,52	92,52
2	Belanja Barang	173.078.040.000	47.024.627.000	126.053.413.000	119.288.813.417	68,92	94,63
3	Belanja Modal	33.574.665.000	12.098.859.000	21.475.806.000	18.624.019.584	55,47	86,72
Jumlah		249.922.667.000	59.123.806.000	190.799.181.000	177.946.666.000	71,20	93,26

Apabila menggunakan anggaran setelah diblokir sebesar Rp190.799.181.000, maka persentase realisasi belanja Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2016 sebesar 93,26% dari anggaran belanja sebesar Rp249.922.667.000

3) Terdapat pelelangan yang dibatalkan karena waktu pelaksanaan pekerjaannya tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun 2016. Realisasi belanja untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 42,64 % dibandingkan tahun anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		31 Desember 2016	31 Desember 2015	
1	Belanja Pegawai	40.033.832.999	37.250.795.157	37.250.795.157
2	Belanja Barang	119.288.813.417	64.079.491.047	64.079.491.047
3	Belanja Modal	18.624.019.584	23.424.806.784	23.424.806.784
Total		177.946.666.000	124.755.092.988	124.755.092.988

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp40.033.832.999 dan Rp37.250.795.157 atau terjadi kenaikan sebesar 7,47 %. Kenaikan ini disebabkan oleh antara lain:

- 1) Terdapat kenaikan gaji, tunjangan kinerja, dan uang makan pegawai selama tahun 2016 karena adanya kenaikan pangkat, golongan dan jabatan pegawai.
- 2) Terdapat pegawai yang ditarik kembali ke Kementerian BUMN dari penugasan di BUMN dan terdapat pegawai yang selesai dari tugas belajar dan kembali bekerja di Kementerian BUMN.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp119.288.813.417 dan Rp64.079.491.047. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 86,16 % dari Realisasi Belanja tahun anggaran 2015. Kenaikan ini disebabkan terdapat belanja untuk mendukung program Kementerian BUMN antara lain Kegiatan Penyusunan Informasi Keuangan BUMN, Kajian Konsolidasi BUMN Sektor Pertambangan Tahun Anggaran 2016, dan Kajian Sistem Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp18.624.019.584 dan Rp23.424.806.784. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 20,49 % dari Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2015. Hal ini disebabkan antara lain terdapat belanja modal yang dibatalkan proses pengadaannya karena waktu pelaksanaan pekerjaannya tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun 2016 yaitu Pengadaan Trafo Tahun 2016 dan adanya efisiensi anggaran karena Kementerian BUMN sudah menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

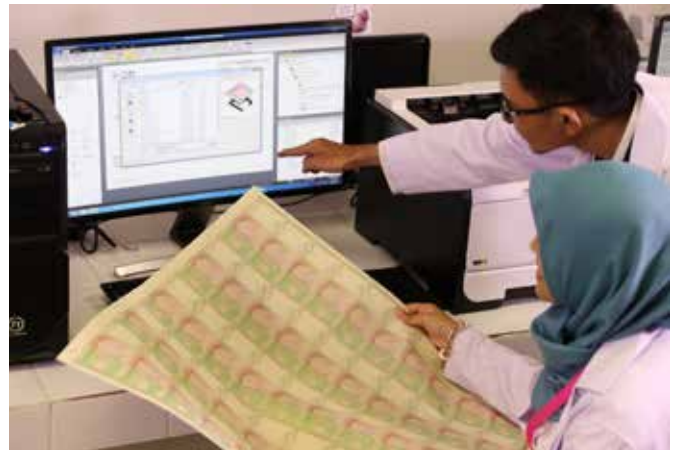
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN

Target WTP Opini BPK

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2016 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN digunakan untuk mencatat dan mengorganisasi barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.



Selain mengelola DIPA Bagian Anggaran 041, Kementerian BUMN juga mendapatkan DIPA BA 999.03 (Penyertaan Modal Negara) yang dilaporkan terpisah dari laporan keuangan.

Kementerian BUMN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

IKU ini bertujuan agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara dimana Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara harus disusun dengan prinsip-prinsip tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Tahun 2015 Kementerian BUMN belum bisa mencapai target WTP, namun hanya mendapat opini WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan). Hal ini disebabkan karena lemahnya penatausahaan aset barang milik negara.



D. Peningkatan Kinerja Kementerian BUMN

Program Internal

a. Penguatan Data dan Teknologi Informasi

Pengembangan sistem informasi yang modern merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian BUMN untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian BUMN. Sistem Informasi dicita-citakan mampu menjadi salah satu pendukung percepatan bisnis proses dan administrasi, pendukung pengambilan keputusan, sarana pembinaan, pengawasan & evaluasi kinerja BUMN serta sebagai sarana penyampaian informasi dari Kementerian BUMN kepada publik maupun dari BUMN kepada Kementerian BUMN.

Untuk itu, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan atas sistem informasi dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Keasdespan Data dan Teknologi Informasi untuk memenuhi kebutuhan ataupun inisiatif yang muncul dari unit kerja pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

b. Program Layanan Hukum

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan atensi khusus terhadap aspek layanan hukum pada birokrasi juga korporasi di bawahnya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Asisten Deputi Layanan Hukum BUMN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi pemberian dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi yang meliputi pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, penyertaan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pelaksanaan PSO BUMN, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris serta aksi korporasi lainnya;
2. Penyiapan koordinasi penyusunan pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau keterangan ahli terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN;
3. Penyiapan koordinasi penyusunan standar Anggaran Dasar BUMN;
4. Penyiapan koordinasi penyusunan Anggaran Dasar BUMN; dan
5. Pemberian konsultasi kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN.

Dalam era persaingan terbuka, seluruh insan Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan segenap insan perusahaan BUMN dituntut untuk dapat berkompetisi baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kementerian BUMN terus melakukan perbaikan agar dapat menciptakan dan meningkatkan keunggulan kompetitif dalam hal pengawasan serta pengelolaan. Dengan adanya pengawasan dan pengelolaan yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan dari stakeholder terkait.

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.



c. Keterbukaan Informasi

Negara (BUMN) mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/10/2015 yang didalamnya mencakup ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada di Bagian Humas dan Protokol, serta mekanisme penjawaban permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait.

Selama tahun 2015, PPID Kementerian BUMN menerima 20 (dua puluh) permohonan informasi publik yang secara umum membutuhkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk masing-masing pelayanan, terhitung sejak diterima/ mendapat disposisi hingga pengesahan jawaban oleh PPID setelah berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

d. Pengawasan Internal

Dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Negara yang Berkualitas di lingkungan Kementerian BUMN, Inspektorat telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan tugasnya

sesuai Pasal 290 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yaitu menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN.

Peran tersebut diimplementasikan dalam program pengawasan tahunan yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

e. Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait BUMN merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008, khususnya mengenai kebijakan peningkatan kinerja BUMN. Harmonisasi peraturan tersebut memerlukan perhatian khusus karena berhubungan dengan kepastian hukum dalam pembinaan dan pengelolaan BUMN. Harmonisasi dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan sektor terkait BUMN dengan tujuan untuk menyempurnakan peraturan-peraturan terkait BUMN yang berujung pada keselarasan peraturan-peraturan terkait BUMN dimaksud. Program dan Kebijakan Selama tahun 2015 telah ditetapkan beberapa program dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyusunan RUU Perubahan UU BUMN. Perubahan UU BUMN ini diharapkan dapat mempertegas dan memperjelas peran BUMN sebagai derivasi peran Negara dalam pengelolaan cabangcabang produksi yang penting bagi Negara dan mengelola sumber daya alam (agent of development) dalam kerangkakorporasi, dengan menegakkan pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN berdasarkan sistem korporasi yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha pada umumnya.
2. Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Anggaran Dasar (AD) Perum. Program yang ditargetkan dalam rangka pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait AD Perum tersebut, meliputi 3 (tiga) perubahan Peraturan Pemerintah yaitu RPP Perum Damri, RPP Perum Perumnas dan RPP Perum Bulog.
3. Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah selain terkait AD Perum. Dalam tahun 2015, diprogramkan pengkajian dan penyusunan RPP tentang Perubahan PP Nomor 45 Tahun 2005. Selain itu, terdapat RPP tentang Penyertaan Modal Negara dan RPP tentang Perubahan Kedua PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Menteri BUMN terkait dengan tata kelola BUMN dan Kementerian BUMN.
5. Penyusunan kajian peraturan perundang-undangan lain terkait BUMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN. Penyusunan kajian ini terdiri atas pengkajian dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan sektoral dan pengkajian dalam rangka penyusunan Keputusan Menteri BUMN dan Sekretaris Kementerian BUMN.



Program Eksternal

A. PERKEMBANGAN RESTRUKTURISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Keasdepan Restrukturisasi BUMN dan PPKNM menjalankan fungsi pembinaan BUMN dalam restrukturisasi dan monitoring entitas yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh BUMN dalam restrukturisasi. Berdasarkan keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-15/S. MBU/04/2016 tanggal 29 April 2016 telah ditetapkan pembagian BUMN yang menjadi tugas Pembinaan Deputi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, yaitu sebagai berikut:

1. PT Nindya Karya (Minoritas)
2. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) / PT MNA (Persero)
3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) / PT KKA (Persero)
4. PT Kertas Leces (Persero)
5. PT Industri Gelas (Persero) / PT Iglas (Persero)
6. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) / PT ISN (Persero)
7. PT Survei Udara Panas (Persero) / PT Panas (Persero)
8. PT Djakarta Lloyd (Persero) / PT DL (Persero)
9. PT Istaka Karya (Persero)
10. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) / PT VTP (Persero)
11. PT Primissima (Persero)
12. PT Kertas Gowa (selesai likuidasi)
13. PT Industri Soda Indonesia (dalam likuidasi)

Perkembangan restrukturisasi BUMN tersebut di atas sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. PT Nindya Karya (Minoritas) / PT NK

PT NK merupakan BUMN yang saat ini dalam restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA. Berdasarkan PP No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya, telah ditetapkan perubahan struktur kepemilikan saham Negara RI melalui penerbitan saham baru pada PT Nindya Karya, sehingga mengakibatkan kepemilikan saham Negara RI pada PT NK menjadi 1% dan kepemilikan saham (sementara) PT PPA menjadi 99%. Sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 69 tahun 2012 dinyatakan bahwa proses pengalihan kembali saham PT NK kepada Negara RI yang diambil bagian oleh PT PPA sebesar 99% adalah bersifat sementara dan diberikan batas waktu paling lambat tahun 2020 agar dialihkan kembali seluruhnya (100%) kepada Negara RI.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain mempersiapkan skema penyelesaian restrukturisasi sehingga PT NK kembali menjadi BUMN serta mempersiapkan langkah pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha PTNK melalui Pasar Modal. Dalam kajian restrukturisasi, PT NK pada tahun 2012 disebutkan bahwa PT NK akan kembali menjadi BUMN (minimum 51% milik Negara RI) paling lambat tahun 2020. Sebagaimana kajian tersebut, pengembalian PT NK sebagai BUMN dilakukan dengan mekanisme pembelian kembali (buyback) saham milik PT PPA yang dilakukan secara bertahap dan kemudian saham tersebut dihibahkan kepada Negara RI. Diproyeksikan saldo laba PT NK akan positif pada akhir tahun 2015 sehingga buyback saham dapat dilakukan mulai tahun 2016 s.d. tahun

2020 (5 tahun), dengan jumlah buyback saham sebesar 10% setiap tahunnya. Pelaksanaan buyback saham tersebut memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa buyback saham hanya dapat dilakukan apabila saldo laba sudah positif serta jumlahnya tidak melebihi 10% dari modal yang ditempatkan.

Secara umum kinerja PT NK meningkat setelah proses restrukturisasi oleh PT PPA. Kinerja prognosa tahun 2016 dibandingkan tahun 2011, antara lain Pendapatan usaha meningkat 5,13 kali menjadi Rp4,40 triliun, laba bersih meningkat 9,93 kali menjadi Rp180,44 miliar, Total Aset meningkat 2,47 kali menjadi Rp3,41 triliun dan Total Ekuitas meningkat 3,48 kali menjadi Rp696,67 miliar. Pada tahun 2016 PT NK sudah mampu mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang bernilai besar dan cukup strategis, antara lain: Jembatan Sungai Musi VI (Palembang), Bendungan Rotiklot (Belu-NTT), Bendungan Kuwil (Minahasa Utara), Bendungan Napun Gete (NTT), Bendungan Karalloe (Gowa), Jalan Tol Bawen-Salatiga, Jalan Tol Manado-Bitung, dan Pos Lintas Batas Negara di Belu-NTT.

Meskipun meningkat, kinerja PT NK dinilai belum optimal karena laba masih lebih rendah dari proyeksi/target semula yang ditetapkan dalam kajian restrukturisasi. Berdasarkan realisasi kinerja perusahaan (audited 2015) dan proyeksi internal manajemen PT NK, saldo laba PT NK baru akan positif pada akhir tahun 2017. Hal ini berdampak pada pelaksanaan buyback saham yang mundur menjadi tahun 2018 dari jadwal semula tahun 2016 (tidak sesuai kajian). Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, pelaksanaan pengalihan kembali saham PT NK yang dimiliki sementara oleh PT PPA melalui mekanisme buyback dan hibah saham sehingga dikuasai 100% oleh Negara RI, tidak dapat direalisasikan pada tahun 2020. Hal ini karena terdapat batasan jumlah saham yang bisa dilakukan buyback, yaitu maksimal 10% per tahun. Dengan demikian, diperlukan waktu selama 9-10 tahun untuk pelaksanaan buyback dan hibah saham dalam rangka mencapai PT NK kembali menjadi BUMN (100% dimiliki Negara).

Pengalihan saham PT NK kembali kepada Negara dengan menggunakan skema pengurangan modal PT PPA (sebagaimana dilakukan pada PT Waskita Karya) dapat menyebabkan kemampuan pengurangan kapasitas usaha PT PPA karena leverage capital menjadi lebih rendah sebagai akibat dari penurunan nilai aset dan ekuitas. Dana yang digunakan untuk setoran modal restrukturisasi PT NK berasal dari dana internal korporasi PT PPA. Kondisi tersebut berbeda dengan PT Waskita Karya yang menggunakan dana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) BUMN, sehingga PT PPA memiliki kepentingan karena dana yang disalurkan kepada PT NK layaknya seperti investasi perusahaan yang harus memberikan hasil nilai tambah bagi PT PPA.

Memperhatikan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, PT PPA, PT NK dan Kementerian BUMN telah melakukan kajian bersama dengan hasil sebagai berikut:

a. Asumsi:

1. PT NK membutuhkan tambahan modal kerja dan investasi untuk sustainability usaha.
2. PT PPA tidak mengalami pengurangan modal agar pengurangan kapasitas usaha dapat dihindari dan masih mendapatkan keuntungan atas investasinya pada PT NK.

3. Buyback saham akan berdampak pada cash flow PT NK karena adanya cash out untuk pembelian saham dan biaya hibah (apabila hibah dimungkinkan), akan berdampak pada laba rugi PT NK.
4. Hibah saham PT PPA kepada Negara akan berdampak biaya dan ter-cover dari rencana divestasi.

b. Skema pengalihan:

1. Alternatif 1: IPO

- a. PT PPA menghibahkan 63% saham pada PT NK kepada negara, sehingga komposisi saham menjadi Negara sebesar 64% dan PT PPA sebesar 36%.
- b. PT NK melakukan IPO dengan menerbitkan sebesar 20% saham baru pada tahun 2018 sehingga komposisi saham setelah PT NK IPO menjadi: Negara sebesar 51%, PT PPA sebesar 29% dan publik sebesar 20%. Bersamaan dengan pelaksanaan IPO, PT PPA melakukan divestasi saham PT NK sebesar 10%, sehingga komposisi saham menjadi Negara sebesar 51%, PT PPA sebesar 19% dan publik sebesar 30%.
- c. Dengan skema IPO tersebut, maka PT NK akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp973 miliar (yang terdiri dari Rp773 miliar dana hasil IPO dan Rp 200 miliar dana pelunasan Promissory Note PT PPA), sedangkan PT PPA akan mendapatkan dana sebesar Rp184 miliar ditambah dengan nilai 19% saham.

Kelebihan Alternatif 1:

1. PT NK akan memperoleh tambahan dana segar untuk meningkatkan kapasitas usahanya sehingga PT NK akan lebih sustain.
2. Beban hibah PT PPA ter-cover dari divestasi saham dan nilai investasi PT PPA pada PT NK meningkat (NPV=45 M, IRR=18%) .
3. Kepemilikan saham Negara pada PT NK menjadi mayoritas 51%.
4. Meningkatkan kepercayaan stakeholder.
5. PT PPA tidak mengalami pengurangan modal ataupun kerugian dan mendapat dana segar dari divestasi saham PT NK.
6. Proses restrukturisasi PT NK selesai (PT PPA berhasil melaksanakan restrukturisasi).

Kekurangan Alternatif 1:

- 1) Pengalihan kembali saham kepada Negara sebagian terpenuhi.
 - 2) Diperlukan proses perizinan divestasi yang panjang.
2. Alternatif 2: Divestasi saham PT PPA kepada strategic investor/ BUMN lain. Penjualan 99% saham PT PPA pada PT NK kepada BUMN lain seharga nilai harga wajar yang ditetapkan oleh KJPP.

Kelebihan Alternatif 2:

- 1) Penyelesaian restrukturisasi PT NK dapat lebih cepat.
- 2) PT PPA mendapatkan dana segar dan tingkat pengembalian investasi untuk PT PPA. (NPV =451 miliar, IRR=36%).

Kekurangan Alternatif 2:

- 1) PT NK tidak mendapatkan dana segar untuk modal kerja (kinerja tidak maksimal).
 - 2) Tidak memenuhi ketentuan PP No. 69/2012 secara keseluruhan.
 - 3) PT PPA tidak dapat menikmati potensi kinerja PT NK masa depan.
 - 4) Saham Negara RI pada PT NK hanya sebesar 1%.
 - 5) Diperlukan persetujuan yang panjang.
- Sesuai dengan hasil pembahasan bersama dengan jajaran Direksi PT PPA dan

PT NK, Alternatif 1 (IPO) merupakan alternatif yang sepakat untuk dipilih dan diusulkan kepada Menteri BUMN untuk dilaksanakan karena mampu memberikan manfaat, baik bagi PT PPA maupun PT NK (win-win solution).

2. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) / PT MNA (Persero)

Sesuai arahan Menteri BUMN, restrukturisasi PT MNA diprioritaskan pada penanganan karyawan. Arahan tersebut ditindaklanjuti dengan pembahasan kajian penanganan karyawan yang disampaikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA dilanjutkan dengan pelaksanaan hasil pembahasan kajian tersebut.

Dalam proses penanganan karyawan, PT PPA mendukung dengan menyediakan pendanaan dari dana R/R alokasi PT MNA dalam PMN PT PPA Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:

- Mendukung restrukturisasi SDM setinggi-tingginya Rp350 Miliar
- Mendukung restrukturisasi hutang/PKPU dan proses R/R lainnya setinggi-tingginya Rp150 Miliar

Terkait dengan pendanaan program penanganan karyawan, sampai dengan akhir Tahun 2016, Manajemen PT MNA telah melakukan pencairan fasilitas pinjaman R/R untuk menyelesaikan pembayaran upah tertunggak dan/atau sebagian pesangon sebanyak 1417 karyawan (93% dari total karyawan PT MNA) dengan nominal sebesar Rp322,97 Miliar dengan menggunakan fasilitas pinjaman dana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) dari PT PPA.

Pada tahun 2016, PT MNA diproyeksikan meraih pendapatan sebesar Rp0,042 Triliun atau turun 1,77% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp0,043 Triliun. Laba bersih PT MNA Tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp0,036 Triliun atau meningkat 101,47% dari Laba Bersih tahun 2015 sebesar minus Rp2,47 Triliun. Pada jumlah aset terjadi sedikit penurunan dimana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1,321 Triliun dan diproyeksikan menjadi Rp1,320 Triliun pada tahun 2016, atau menurun sebesar 0,13%.

Upaya Pemerintah terakhir yang sedang dilakukan adalah menugaskan PT PPA untuk melakukan restrukturisasi PT MNA melalui surat Menteri BUMN No. S-107/MBU/02/2016 yang secara garis besar memberikan arahan:

- Mengutamakan penanganan karyawan PT MNA (sesuai arahan S-690/MBU/10/2015)
- Pencarian investor dan;
- Restrukturisasi hutang.

Perkembangan pelaksanaan program restrukturisasi PT MNA:

1. Penanganan karyawan:

Dari karyawan PT MNA sebanyak 1.532 orang, telah diselesaikan ±93% atau sebanyak 1.417 orang, dimana 15 orang diantaranya telah menandatangani PB dan sedang dalam proses pembayaran upah tertunggak dan/atau sebagian pesangonnya serta 4 orang Direksi dan Dewan Komisaris telah diselesaikan menggunakan dana perusahaan. Sisanya sebanyak 115 orang, diselesaikan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial.

Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan anjuran kepada pihak-pihak yang berselisih dan manajemen PT MNA menolak anjuran tersebut, sehingga proses dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Pencarian Investor:

- Terdapat investor yang hingga kini masih menyatakan minat menjadi pemegang saham mayoritas di PT MNA.
- Pencarian investor melalui program privatisasi telah mendapatkan arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya adalah memperoleh persetujuan dari DPR.

3. Dalam hal persetujuan DPR telah diperoleh, maka tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Pembentukan Tim Privatisasi
- Penyusunan Kerangka Acuan (TOR) penawaran program privatisasi;
- Pengumuman program penawaran program privatisasi;
- Uji tuntas (due diligence)
- Penerimaan proposal investor strategis
- Evaluasi proposal investor strategis
- Keputusan investor pemenang
- Implementasi kesepakatan dengan investor

1. Restrukturisasi hutang dilakukan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah ada kepastian investor yang akan berpartisipasi.

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) / PT KKA (Persero)

Setelah sebelumnya pada bulan Oktober 2014 berhenti beroperasi, PT KKA pada tahun 2016 mulai dapat menghasilkan pendapatan untuk operasional. Pada bulan Desember 2015 PT KKA melakukan penandatanganan addendum dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN untuk merubah pola operasi yang pada awalnya hanya menggunakan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) namun berubah menjadi pengoperasian PLTU kombinasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Atas addendum tersebut, sampai dengan Tahun 2016 telah dilaksanakan penandatanganan addendum Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT KKA dan PT Pembangkitan Jawa Bali Services/PT PJBS terkait perubahan skema pengoperasian kombinasi PLTU dan PLTMG serta pembagian porsi pendapatan. Pada perkembangannya, 7 (tujuh) mesin PLTMG dan PLTU telah dapat dioperasikan dan dapat menghasilkan listrik sampai dengan 20 MW. Biaya operasional dan pengamanan aset PT KKA sudah dapat dipenuhi dari hasil operasi KSO tersebut.

Selain pengoperasian kembali pembangkit listrik PT KKA, telah dilakukan berbagai upaya pula untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas kraft PT KKA. Sampai dengan Tahun 2016, telah dilakukan Pre Due Diligence (DD) atas kelayakan pengoperasian kembali PT KKA yang dilaksanakan oleh PT Semen Indonesia (Persero). Hasil Pre DD tersebut telah dibahas secara teknis dan disimpulkan bahwa pabrik kertas kraft PT KKA masih layak beroperasi dengan beberapa persyaratan antara lain kecukupan bahan baku kayu. Saat ini PT KKA masuk dalam program privatisasi BUMN dan sudah mendapatkan persetujuan dari Komite Privatisasi BUMN. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan investor strategis untuk kelangsungan hidup PT KKA.

Pada tahun 2016, PT KKA diproyeksikan meraih pendapatan sebesar Rp74 Miliar atau meningkat 3742,93% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp1 Miliar.

PT KKA pada tahun 2016 mampu menurunkan kerugian menjadi sebesar

Rp79 Miliar dari semula Rp110 Miliar pada tahun 2015. Peningkatan juga terjadi pada jumlah aset dimana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp670 Miliar menjadi Rp710 Miliar pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 6,71%. Pada tahun 2016, ditetapkan 3 program utama PT KKA sebagai berikut:

1. Pengoperasian Unit PLTU untuk menghasilkan energi listrik

- a. Untuk mendukung pengoperasian kembali pembangkit listrik PT KKA PT PJBS bersama mitranya telah membangun 7 unit PLTMG di PT KKA dan telah selesai dilaksanakan pada awal Juni 2016. Hal tersebut untuk mendukung Amendemen PJBT antara PT PLN (Persero) Wilayah Aceh dengan PT KKA tanggal 16 Desember 2015 serta Addendum Kerjasama Operasi dalam rangka Pengoperasian dan Pemeliharaan PLTU PT KKA antara PT PJBS dengan PT KKA tanggal 22 Januari 2016 agar NPHR dapat dicapai 3.500 kCal/kWh.
- b. PLTMG mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 26 Juni 2016
- c. PLTU dilakukan performance test pada akhir Oktober 2016 guna mengetahui realisasi NPHR untuk menyusun pola operasi PLTU dan PLTMG selanjutnya agar tercapai NPHR < 3.500 kCal/kWh
- d. Produksi energi listrik dari PLTU & PLTMG PT KKA di-supply melalui Line 1 dan Line 2 sebesar 20 MW
- e. Pasokan gas bumi untuk mendukung operasi PLTU dan PLTMG dipasok dari PT Pertamina Hulu Energi NSB/NSO
- f. Pengaliran gas bumi dari PT PHE NSB/NSO telah dilakukan mulai tanggal 20 Juni 2016 yang mengacu kepada Kesepakatan Bersama (KB) yang telah ditandatangani tanggal 6 Juni 2016 antara PT PHE NSB/NSO dan PT KKA

2. Persiapan Pengoperasian Kembali Pabrik Kertas

- a. Telah dilakukan Pre Due Diligence ("Pre DD") oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("PT SMI") serta Memorandum Of Understanding ("MOU") dengan Floresta Singapore Pte Ltd. yang selanjutnya akan dilakukan DD dengan tujuan utama mendukung rencana pengoperasian kembali pabrik Kertas PT KKA
- b. Dalam rangka pemenuhan supply bahan baku untuk pengoperasian kembali pabrik PT KKA telah dilakukan pembahasan terhadap kebutuhan bahan baku kayu pinus dan mengetahui jumlah potensi kayu baik pinus yang dikoordinir oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan akan dilakukan inventarisasi jumlah kayu pinus baik di areal HTI maupun diluar areal HTI dengan melibatkan PT Tusam Hutani Lestari ("PT THL") dan Dinas Kehutanan Aceh.

3. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

- a. Dalam tahun 2016 telah melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset, program pengamanan dan pemeliharaan aset telah berjalan dengan baik dan tertib, aset tetap terjaga dan terawat sehingga aset yang dimiliki tetap berada dalam kondisi baik dan tertib.
- b. Sampai dengan akhir tahun 2016 Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pemanfaatan Gudang Pelabuhan dengan PT Pelindo I cabang Lhokseumawe belum ada pihak ketiga yang menyewakan gudang milik PT KKA. PT KKA telah menyampaikan persetujuan untuk melakukan Addendum perpanjangan Perjanjian KSO dan telah mendapat persetujuan dari Komisaris PT KKA.

4. PT Kertas Leces (Persero)/ PT KL

Tahun 2016 perusahaan belum dapat beroperasi normal karena tidak ada modal kerja dan perkembangan sampai dengan akhir tahun 2016 perusahaan

masih berhenti beroperasi. Saat ini PT KL berada dalam status PKPU oleh pengadilan dan telah selesai dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian antara PT KL oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 18 Mei 2015 dan PT KL juga masuk dalam program privatisasi BUMN serta sudah mendapatkan persetujuan dari Komite Privatisasi BUMN. Restrukturisasi PT KL saat ini dibutuhkan investor strategis dan penyelesaian permasalahan serikat pekerja.

Pada tahun 2016, PT KL diproyeksikan meraih pendapatan sebesar Rp0,13 Miliar atau menurun 97,61% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp5,61 Miliar. Laba bersih PT KL Tahun 2016 diproyeksikan sebesar minus Rp19,71 Miliar atau menurun 104,31% dari Laba Bersih tahun 2015 sebesar minus Rp457,00 Miliar. Peningkatan terjadi pada jumlah aset dimana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp980,12 Miliar menjadi Rp1.135 Miliar pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 15,88%.

Untuk memperbaiki kinerja PT KL, telah dilakukan sejumlah upaya diantaranya:

- a) Tambahan PMN tahun 2006 sebesar Rp100 Miliar;
- b) Tambahan PMN tahun 2007 sebesar Rp175 Miliar;
- c) Pemberian dana talangan dari PT PPA tahun 2012 sebesar Rp50 Miliar

Namun, upaya tersebut belum berhasil meningkatkan kinerja usaha dan keuangan Perusahaan. Berikut merupakan gambaran singkat perkembangan PT KL:

- a. Pada bulan Juli 2014, PT KL dituntut pailit oleh 2 kreditur dan selanjutnya memasuki proses PKPU sampai dengan ditandatangani perjanjian perdamaian pada tanggal 18 Mei 2015;
- b. Karyawan sebanyak 1.115 orang telah di-PHK pada bulan Juli 2015, dengan kewajiban sejumlah Rp221 Miliar. Kewajiban ini diperhitungkan dalam penyelesaian homologasi. Namun demikian, sebagian karyawan tidak menerima putusan homologasi dan melakukan upaya penyelesaian baik melalui litigasi maupun PHI.
- c. Dalam rangka pengoperasian kembali pabrik kertas, Perusahaan telah menjajaki kemungkinan kerjasama dengan sejumlah Investor, antara lain Raja Garuda Mas Group, Sinar Mas Group, Mount Dream, Turangga Corp, Ltd., Wen Lie/Herry Kurniadi, Wempy Edi Wiyono, dan Bukit Berlian, namun belum ada tindak lanjut. Saat ini terdapat 2 investor yang sedang dijajaki (telah ditandatangani MoU) yakni PT Sultan Putra Nusantara dan Evaluation Funding S L.
- d. Pada saat ini, Perusahaan tidak mampu membayar kewajiban kepada Pengurus PKPU dan kreditur KAM/Eldorado yang telah jatuh tempo di bulan Februari 2016;
- e. Untuk mengatasi permasalahan PT KL, alternatif solusi yang sedang ditempuh adalah melakukan program privatisasi yang hingga saat ini telah mendapatkan arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan, namun sampai dengan saat ini belum diajukan persetujuannya ke DPR;
- f. Dalam hal persetujuan DPR telah diperoleh, maka tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - Pembentukan Tim Privatisasi
 - Penyusunan Kerangka Acuan (TOR) penawaran program privatisasi;
 - Pengumuman program penawaran program privatisasi;
 - Uji tuntas (due diligence)
 - Penerimaan proposal investor strategis

- Evaluasi proposal investor strategis
- Keputusan investor pemenang
- Implementasi kesepakatan dengan investor

g. Dalam hal tidak diperoleh investor strategis, alternatif terakhir adalah penutupan perusahaan (likuidasi);

5. PT Industri Gelas (Persero) / PT Iglas (Persero)

PT Iglas (Persero) telah berhenti beroperasi sejak tanggal 16 Oktober 2015 dan telah memutuskan hubungan kerja dengan seluruh karyawan pada tanggal 31 Oktober 2015. Dengan berhentinya operasi perusahaan, maka di tahun 2016 manajemen fokus pada:

- a. Penyelesaian masalah karyawan secara tuntas baik pemenuhan hak karyawan yang di PHK maupun pemenuhan hak terutang karyawan serta pensiunan (sesuai surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha No. S-593/MBU/11/2015, tentang penyelesaian lay off karyawan PT Iglas (Persero).
- b. Penyiapan program privatisasi (sesuai surat Menteri BUMN No. S-922MBU/12 /2015 tentang usulan PT Iglas (Persero) masuk Program Tahunan Privatisasi (PTP) Tahun 2016.

Pada tahun 2016, PT Iglas diproyeksikan meraih pendapatan sebesar Rp4,20 Miliar atau menurun 94,97% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp83,42 Miliar. Laba bersih PT Iglas Tahun 2016 diproyeksikan sebesar minus Rp43,35 Miliar atau meningkat 75,06% dari Laba Bersih tahun 2015 sebesar minus Rp173,80 Miliar. Pada jumlah aset terjadi sedikit penurunan dimana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp267,71 Miliar menjadi Rp254,51 Miliar pada tahun 2016, atau menurun sebesar 4,93%.

Permasalahan yang dihadapi sekarang yaitu pelunasan hak-hak terutang karyawan dan pesangon, penyelesaian hutang perusahaan sebesar Rp987 M (termasuk hak terutang karyawan dan hutang pesangon) dan pemenuhan biaya operasional/pemeliharaan. Mengingat dana R/R yang digunakan untuk menyelesaikan H2N karyawan PT Iglas (Persero) harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka Menteri BUMN memberikan persetujuan atas usulan pengagunan aset PT Iglas kepada PT PPA tanggal 7 Januari 2016. Dengan adanya aksi korporasi tersebut, PT PPA telah memberikan dana talangan kepada PT Iglas sebesar Rp22 Miliar dari total plafond sebesar Rp33,5 Miliar. Penyelesaian H2N perusahaan saat ini masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan atas penggunaan dana RR PT Iglas.

Realisasi program penanganan PT Iglas adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pertama

PT Iglas telah berhasil membayar seluruh H2N yang terutang pada 468 karyawan yang bersumber dari dana talangan PT PPA. Saat ini, perusahaan sedang berupaya menyelesaikan pembayaran pesangon karyawan.

2. Tahap Kedua

Sampai dengan tahun 2016 terdapat 5 (lima) investor strategis yang menyatakan minatnya kepada PT Iglas, yaitu: AVIC International (China), PT Tiga Pilar (Indonesia), PT Mulia Glass (Indonesia), PT Utama Karya Reality (Indonesia), dan PT Imara (Indonesia). Saat ini PT Imara sedang melakukan due diligence keuangan.

6. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) / PT ISN (Persero)

Untuk memenuhi biaya operasional PT ISN pada saat ini dilakukan penyewaan fasilitas produksi di Patal Banjaran, Patal Cilacap, Patal Secang, dan Patal tegal. Pada tanggal 18 Februari 2016 PT PPA dan PT ISN telah menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN sesuai dengan Surat Permohonan PT ISN No. 132/8-A/2015 tanggal 9 November 2015 dan Persetujuan RUPS PT ISN No. S-887/MBU/12/2015 tanggal 11 Desember 2015. Pada tahun 2016, PT ISN diproyeksikan meraih pendapatan sebesar Rp0,20 Miliar atau menurun 99,47% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp37,61 Miliar.

Rendahnya pendapatan menyebabkan PT ISN pada tahun 2016 mencatatkan rugi bersih sebesar Rp34,42 Miliar dari semula rugi bersih sebesar Rp22,35 Miliar pada tahun 2015. Penurunan juga terjadi pada jumlah aset dimana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp605,07 Miliar menjadi Rp603,20 Miliar pada tahun 2016, atau menurun sebesar 0,31%.

Pasca penandatanganan Perjanjian Penerbitan SPN antara PT PPA dan PT ISN pada tanggal 18 Februari 2016, PT PPA telah dilakukan pembelian SPN dengan rincian sebagai berikut: - SPN Tahap I sebesar Rp5.000.000.000,00 pada tanggal 18 Februari 2016; - SPN Tahap II Trach A sebesar Rp2.969.634.586,00 pada tanggal 28 April 2016; - SPN Tahap II Trach B sebesar Rp10.374.568.35,00 pada tanggal 20 Juni 2016.

Hasil monitoring kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) karyawan: PHI 2014: Status tuntutan PHI 2014, terkait pesangon 75x dan turunannya, saat ini masih dalam proses kasasi di MA. Sementara putusan sela terkait kewajiban pembayaran tunggakan gaji karyawan eks Patal Tohpati sebesar Rp2,26 Miliar telah dibayar Rp1,6 Miliar, oleh PT ISN sehingga masih tersisa Rp666 ribu.

Monitoring tuntutan PHI 2010 terkait kewajiban normatif Perseroan yang timbul selama proses PHI berlangsung atas PHK tahun 2010 saat ini sedang dalam proses kasasi di MA. Terkait penugasan penyusunan kajian dari Menteri BUMN, saat ini PT PPA sedang menunggu kelengkapan data berupa rencana bisnis dan dokumen RPKP PT ISN. Dua dokumen tersebut sangat diperlukan karena di dalamnya memuat strategi penyehatan dan pengembangan perusahaan dengan asumsi adanya penjualan aset Tohpati oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Sesuai dengan surat PT ISN No. 91/8-A/2016, melalui mekanisme Penunjukan Langsung, telah dipilih PT Sucofindo (Persero) untuk membantu PT ISN dalam menyusun RJPP dan RKPP. Konsultan yang ditunjuk diharapkan dapat melakukan kajian yang komprehensif baik aspek teknis, pasar maupun komersial terkait opsi-opsi strategi yang paling optimal bagi PT ISN ke depan. Keberhasilan restrukturisasi PT ISN bergantung pada keberhasilan penjualan aset Patal Tohpati. Pada akhir tahun 2016 telah dilaksanakan pelelangan pertama namun tidak ada peminat sehingga pelelangan berikutnya dilaksanakan di tahun 2017.

7. PT Survei Udara Penas (Persero) / PT Penas

Restrukturisasi PT Penas masih diperlukan pencarian peluang sinergi dengan BUMN lain. Terkait dengan kajian restrukturisasi dan revitalisasi PT Penas, PT PPA telah menyampaikan kajian bisnis PT Penas kepada Kementerian BUMN melalui surat No. S-2651/PPA/PD/0816 tanggal 9 Agustus 2016. PT PPA juga telah melakukan beberapa pertemuan dengan Kementerian BUMN, terakhir

tanggal 20 September 2016, dengan masukan dari Kementerian BUMN, antara lain:

- Penyesuaian metode penyajian simulasi proyeksi kinerja keuangan PT Penas periode 2016-2020 dari semula cost method menjadi equity method.
- Rencana penggunaan dana tambahan PMN untuk pendirian anak perusahaan PT Penas, dijadikan rencana penggunaan dana yang berdiri sendiri.

Pada tahun 2016, telah diupayakan sinergi antara PT Penas dengan PTPN dan Perum Perhutani namun belum dapat terealisasi. Sementara itu proyek-proyek yang sudah berhasil diselesaikan oleh PT Penas hingga bulan September 2016 diantaranya:

- Proyek dengan LAPI ITB untuk survai udara dan pemetaan wilayah Bandung (proyek smart city)
- Proyek pemotretan wilayah Tangerang Selatan yang diselenggarakan oleh BPN Kanwil Tangerang Selatan

Pada tahun 2016, PT Penas diproyeksikan meraih pendapatan sebesar Rp3,67 Miliar atau meningkat 79,62% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp2,04 Miliar. Laba bersih PT Penas Tahun 2016 diproyeksikan sebesar minus Rp17,53 Miliar atau menurun 40,16% dari Laba Bersih tahun 2015 sebesar minus Rp12,51 Miliar. Pada jumlah aset terjadi sedikit penurunan dimana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp52,87 Miliar menjadi Rp50,82 Miliar pada tahun 2016, atau menurun sebesar 3,87%.

Dalam rangka restrukturisasi terhadap PT Penas, maka dilakukan rekomendasi penanganan PT Penas sesuai dengan urutan penyajian, yaitu: Opsi Restrukturisasi melalui skema bad bank/good bank.

a. PT Penas sebagai bad bank:

- Menyelesaikan permasalahan SDM (lay off) dan restrukturisasi hutang
- Sumber pendapatan induk: sewa alat produksi kepada anak dan dividen anak
- Dalam jangka menengah – panjang, mengaktifkan kembali AOC (Air Operator Certificate) (Catatan: setelah menunjukkan kinerja baik dalam 2 tahun pertama)

a. Anak Perusahaan sebagai good bank:

- Membentuk tim kerja baru dengan kemampuan untuk penetrasi pasar dan pelaksanaan proyek pemetaan.
- Fokus melaksanakan jasa survai udara dan pemetaan untuk memperoleh pendapatan.

Catatan:

Untuk Opsi Restrukturisasi dibutuhkan Keputusan Pemegang Saham antara lain:

- PT PPA: persetujuan atas program R/R yang akan dilaksanakan, termasuk penggunaan dana R/R dari PMN PT PPA tahun 2015 sebesar Rp25 Miliar.
 - PT Penas: persetujuan pendirian anak perusahaan dan menerima pinjaman/ penjaminan aset. Dalam hal tidak diperoleh Persetujuan Pemegang Saham, terdapat dua opsi yaitu Inbreng atau Likuidasi.
1. Opsi Inbreng PT Penas Kepada PT PPA
 - a. Kepemilikan saham Pemerintah di PT Penas di-inbreng-kan kepada PT PPA.
 - b. Pelaksanaan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).
 - c. Restrukturisasi PT Penas akan dilakukan oleh PT PPA.

- PT Penas: persetujuan pendirian anak perusahaan dan menerima pinjaman/ penjaminan aset. Dalam hal tidak diperoleh Persetujuan Pemegang Saham, terdapat dua opsi yaitu Inbreng atau Likuidasi.

1. Opsi Inbreng PT Penas Kepada PT PPA

- Kepemilikan saham Pemerintah di PT Penas di-inbreng-kan kepada PT PPA.
- Pelaksanaan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).
- Restrukturisasi PT Penas akan dilakukan oleh PT PPA.

2. Opsi Likuidasi

No	Uraian	Nilai Buku Audited 2015	Perolehan Pasca Likuidasi	%
1	Nilai Buku Aset	52,8 M	-	-
2	Estimasi Nilai Likuidasi Aset Alokasi	25,5 M	-	-
3	Karyawan	13,9 M	10,5 M	75,5 %
4	Separatis	120 M	15 M	12,5 %
5	Konkuren	22 M	-	-
6	Pemegang Saham	13 M	-	-

Catatan:

- Estimasi nilai likuidasi sebesar Rp25,5 Miliar termasuk kamera pemetaan senilai Rp15 M yang merupakan aset leasing.
- Pada saat likuidasi, perusahaan leasing akan mengeksekusi kamera, sehingga nilai riil likuidasi yang dapat didistribusi hanya tersisa Rp10,5 Miliar.

8. PT Djakarta Lloyd (Persero) / PT DL (Persero)

PT Djakarta Lloyd telah menunjukkan peningkatan kinerja baik operasional maupun profitabilitas yang sangat baik. Peningkatan kinerja operasional berdampak pada profitabilitas perusahaan, dimana pada tahun 2016, PT Djakarta Lloyd diproyeksikan meraih pendapatan sebesar Rp432,58 Miliar atau meningkat 14,60% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp377,46 Miliar. Laba bersih PT Djakarta Lloyd Tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp49,31 Miliar atau meningkat 121,22% dari Laba Bersih tahun 2015 sebesar Rp22,29 Miliar. Begitupula pada jumlah aset terjadi peningkatan dimana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp831,92 Miliar menjadi Rp841,50 Miliar pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 1,15%.

Pengalihan pembinaan PT Djakarta Lloyd kepada Kedeputan Teknis telah mendapat persetujuan Menteri BUMN dengan pertimbangan program restrukturisasi awal telah selesai dan juga untuk mendukung program dan proses pembentukan BUMN holding sektor serta memudahkan dilakukan sinergi apabila berada dalam satu sektor di Kedeputan. Adapun pertimbangan pengalihan kembali pembinaan PT Djakarta Lloyd tersebut kepada Kedeputan Teknis antara lain adalah sebagai berikut:

a. Aspek Keuangan

- Pendapatan usaha perusahaan dari tahun 2014-2016 meningkat secara signifikan. Pada tahun 2016 perusahaan mampu memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp433 miliar atau meningkat 15% dibandingkan tahun 2015

dan meningkat 99% dibandingkan tahun 2014.

- Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, perusahaan mampu memperkecil rugi usaha dan di tahun 2016 telah mampu membukukan laba usaha sebesar Rp30 miliar dimana pada tahun 2014 masih mengalami rugi usaha sebesar Rp17 miliar.
- EBITDA tahun 2014 masih minus Rp22 miliar namun demikian Ebitda tahun 2015 dan 2016 menjadi positif. EBITDA tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp60 miliar atau meningkat 37% dibandingkan tahun 2015.
- Pada tahun 2016 perusahaan diperkirakan membukukan laba sebesar Rp49 miliar atau meningkat 121% dibandingkan tahun 2015.
- Pada tahun 2015 aset perusahaan mengalami peningkatan signifikan sebesar 101% yang terutama disebabkan adanya PMN tunai sebesar Rp350 miliar.
- Ekuitas perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 3 tahun terakhir. Nilai ekuitas pada tahun 2016 sebesar Rp393 miliar atau meningkat 14% dibandingkan tahun 2015 dan pada tahun 2014 ekuitas perusahaan masih minus Rp29 miliar.

b. Aspek SDM

PT Djakarta Lloyd telah berhasil menyelesaikan pembayaran kewajiban kepada karyawan yang terdiri dari H2N, pesangon, dan pensiun kepada 1.876 pegawai dengan nilai ±Rp82 miliar.

c. Aspek Administratif

- RUPS Tahunan Tahun Buku 2008-2015 yang sebelumnya sempat tertunda dilaksanakan sekaligus tanggal 23 Desember 2016.
- Telah terbitnya PP Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penambahan PMN PT DL yang berasal dari BPYBDS berupa 5 unit Kapal Palwo dengan total nilai sebesar Rp667 miliar.
- Selesaiannya status SLA 24 unit Shipset kapal dengan total nilai sebesar Rp379,3

miliar yang selama ini masih dispute antara PT DL dan PT PANN menjadi dialihkan kepada PT DL. Penetapan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-394/MK.05/2016 tanggal 20 Mei 2016.

9. PT Istaka Karya (Persero)

Berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT. PSTJo tanggal 22 Januari 2013 para kreditur sepakat melakukan perdamaian dengan cara saldo hutang dikonversi menjadi penyertaan saham sementara. Data hutang kreditur dalam putusan tersebut sebesar Rp485,91 Miliar, namun berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik tahun buku 2012 terdapat tambahan hutang kreditur sebesar Rp116,99 Miliar sehingga Direksi PT Istaka Karya (Persero) mengajukan permohonan revisi data hutang kreditur yang akan dikonversi menjadi saham, dari Rp485,91 Miliar menjadi Rp602,90 Miliar. Selanjutnya Menteri BUMN melalui surat No. S-160/MBU/03/2016 tanggal 01 Maret 2016 telah menyampaikan permohonan revisi data hutang kreditur untuk mendukung pengajuan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Istaka Karya (Persero) kepada Menteri Keuangan.

Dalam Rapat Pembahasan Penyelesaian Perubahan Data Hutang Kreditur PT Istaka Karya (Persero) tanggal 26 Juli 2016 di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah disepakati bahwa hutang kreditur yang akan dikonversi menjadi penyertaan saham sementara adalah berdasarkan angka audit. Selanjutnya telah dimintakan kepada Direksi PT Istaka Karya (Persero) untuk menyampaikan surat pernyataan/perjanjian antara PT Istaka Karya (Persero) dengan para kreditur yang belum masuk dalam perjanjian homologasi yang antara lain berisi kesediaan kreditur yang belum masuk ke dalam perjanjian homologasi untuk mengikuti skema penyelesaian data hutang kreditur sebagaimana putusan pengadilan (homologasi).

Kinerja PT Istaka Karya (Persero) tahun 2016 mengalami peningkatan. PT Istaka Karya (Persero) diproyeksikan meraih pendapatan sebesar Rp430,16 Miliar atau meningkat 151,82% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp170,82 Miliar. Laba bersih PT Istaka Karya (Persero) Tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp20,61 Miliar atau meningkat 28,28% dari Laba Bersih tahun 2015 sebesar Rp16,07 Miliar. Begitupula pada jumlah aset terjadi peningkatan dimana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp396,44 Miliar menjadi Rp688,72 Miliar pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 73,72%.

Pengalihan pembinaan PT Istaka Karya (Persero) kepada Kedeputan Teknis telah mendapat persetujuan Menteri BUMN dengan pertimbangan program restrukturisasi awal telah selesai dan juga untuk mendukung program dan proses pembentukan BUMN holding sektor konstruksi serta memudahkan dilakukan sinergi apabila berada dalam satu sektor di Kedeputan Teknis. Adapun pertimbangan pengalihan kembali pembinaan PT Istaka Karya (Persero) tersebut kepada Kedeputan Teknis antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Telah selesai dilakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tahun 2013.
- b. Pendapatan dan Laba Bersih meningkat selama 3 tahun terakhir (2014-2016).
- c. Skor tingkat kesehatan tahun 2015 termasuk dalam kategori Sehat A.
- d. RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2010-2015 yang sempat tertunda telah dilaksanakan sekaligus pada tanggal 9 Agustus 2016.
- e. Dengan pengalihan pembinaan kepada Kedeputan Teknis, maka

diharapkan PT Istaka Karya (Persero) dapat memperoleh manfaat berupa sinergi dengan BUMN Konstruksi lainnya, khususnya dalam hal perolehan proyek baru sebagai sub kontraktor pada proyek-proyek BUMN Konstruksi lainnya.

- f. Pengalihan pembinaan kepada Kedeputan Teknis dapat memudahkan koordinasi dalam rangka persiapan pembentukan Holding BUMN Konstruksi.

10. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) / PT VTP (Persero)

PT VTP memiliki permasalahan antara lain: kondisi sarana dan prasarana usaha yang sangat minim dan sudah tua, tidak ada modal kerja yang memadai, hutang masa lalu (hutang pihak ketiga dan hutang pajak) yang belum terselesaikan dan dengan bunga yang terus membebani kinerja perusahaan sehingga PT VTP kesulitan melakukan ekspansi pasar. Meskipun memperoleh pekerjaan dengan kontrak jangka panjang. PT VTP tidak sanggup membiayai karena kesempatan untuk memperoleh kredit/pinjaman bank sangat kecil.

Kementerian BUMN terus melakukan monitoring dan evaluasi atas restrukturisasi/penyehatan PT VTP. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 antara lain: RUPS Pengesahan RKAP 2016 pada tanggal 14 Januari 2016, RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2015 pada tanggal 9 Juni 2016, Monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan secara periodik, Fasilitasi penyelesaian masalah piutang dengan PTPN VII dan PTPN VIII, Fasilitasi penyelesaian masalah hutang PT VTP kepada PT KBN dan Persetujuan penghapusbukuan bangunan gudang di Pelabuhan Tanjung Intan yang rusak berat. Pengalihan pembinaan PT VTP kepada Kedeputan Teknis telah mendapat persetujuan Menteri BUMN dengan pertimbangan program restrukturisasi awal telah selesai dan juga untuk mendukung program dan proses pembentukan BUMN holding sektor serta memudahkan dilakukan sinergi apabila berada dalam satu sektor di Kedeputan. Adapun pertimbangan pengalihan kembali pembinaan PT VTP tersebut kepada Kedeputan Teknis antara lain adalah sebagai berikut:

1. PT VTP mampu mencetak laba usaha yang meningkat selama 2 tahun terakhir (2015-2016). Pada tahun 2016 (prognosa) pendapatan usaha PT VTP menurun akibat persaingan usaha logistik yang sangat ketat, dimana perusahaan pesaing semakin banyak dan berlomba-lomba menekan harga saat tender. Penurunan pendapatan tersebut menyebabkan penurunan laba bersih, namun demikian PT VTP mampu meningkatkan efisiensi biaya yang ditunjukkan dengan naiknya operating margin dari 1,07% menjadi 1,35% serta menjaga rasio EBITDA margin pada tingkat 1,68%.
2. Telah dilaksanakan program pembenahan dan rightsizing karyawan secara bertahap dalam rangka efisiensi biaya dan untuk mencapai kebutuhan SDM yang ideal. Jumlah SDM menurun dari 221 orang (tahun 2015) menjadi 200 orang (prognosa 2016).
3. PT VTP mulai menjalankan program pendayagunaan aset tetap perusahaan yang idle dan kurang produktif, antara lain tanah di Purwakarta dan Bandung dengan menjalin sinergi dengan PT KBN (Persero). Hasil dari pendayagunaan aset tetap akan digunakan untuk melunasi hutang kepada PT KBN (Persero), hutang pajak dan tambahan modal kerja.
4. Kondisi likuiditas dan solvabilitas perusahaan relatif meningkat sebagaimana ditunjukkan dengan Current Ratio dan DER (Debt to Equity Ratio) yang membaik. Current Ratio meningkat dari 119,34% menjadi 127,39% pada tahun 2016 sedangkan DER menurun dari 1.146,14% menjadi

924,84% pada tahun 2016.

5. Skor tingkat kesehatan selama 2 tahun terakhir (2015-2016) termasuk dalam kategori Sehat A.

6. Dengan pengalihan pembinaan kepada Deputy Teknis, maka diharapkan PT VTP dapat memperoleh manfaat berupa sinergi dengan BUMN lainnya, khususnya di bidang logistik dan pengangkutan.

7. Pengalihan pembinaan kepada Deputy Teknis dapat memudahkan koordinasi dalam rangka persiapan pembentukan Holding Maritim bersama dengan BUMN Kepelabuhanan, Kawasan Industri dan Pelayaran.

11. PT Primmisima (Persero)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Primmisima, telah ditetapkan bahwa Negara akan melakukan penjualan seluruh saham yang dimiliki pada PT Primmisima (Persero) yaitu sebanyak 6.863 lembar saham atau sebesar 52,79% melalui penjualan saham secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Perseroan Terbatas. Hingga saat ini, penjualan saham PT Primmisima (Persero) belum terealisasi karena harga penawaran jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan. Range harga saham PT Primmisima (Persero) hasil valuasi PT Danareksa Sekuritas antara Rp42,4 Miliar - Rp67,9 Miliar. Berdasarkan hasil valuasi tersebut, Menteri BUMN melalui surat Nomor S-543/MBU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 menyampaikan penawaran kepada PT GKBI Investment seluruh saham milik Negara (6.863 lembar saham atau 52,79%) dengan total harga sebesar Rp68 Miliar. PT GKBI Investment melalui surat Nomor 130/GI/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 menyatakan minat membeli saham milik Negara pada PT Primmisima sebesar Rp9,13 Miliar.

Pendapatan usaha diperkirakan hanya tercapai sebesar Rp102,80 Miliar atau menurun 6,87% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp110,38 Miliar. Capaian laba bersih prognosa 2016 yang sangat tinggi disebabkan karena terdapat pendapatan di luar usaha sebesar Rp17,31 miliar yang berasal

dari penghapusan hutang pajak tahun 2012 karena perusahaan mengikuti Program Tax Amnesty, sehingga secara keseluruhan laba bersih prognosa 2016 menjadi sebesar Rp15,95 miliar. Total aset/liabilitas perusahaan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp78,90 Miliar menjadi Rp79,59 Miliar pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 0,88%, kenaikan pada sisi aset terutama berasal dari kenaikan aset lancar (kas dan bank), sementara kenaikan pada sisi liabilitas terutama berasal dari kenaikan kewajiban lancar (hutang usaha).

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi kinerja perusahaan tahun 2016, antara lain: realisasi kapasitas produksi yang rendah dari kapasitas terpasang (pemintalan $\pm 7,4\%$ dan pertununan $\pm 72,3\%$), usia mesin yang sudah tua (sebagian besar lebih dari 40 tahun), keterbatasan kemampuan keuangan untuk pembelian bahan baku kapas dan benang, produktivitas SDM yang rendah, biaya energi yang tinggi, dan persaingan industri tekstil yang semakin ketat, baik dalam kualitas, kuantitas, harga dan pelayanan.

12. PT Kertas Gowa (selesai dilikuidasi)

Dengan telah terselenggaranya RUPSLB tanggal 29 Juni 2015, maka PT Kertas Gowa telah resmi dilikuidasi (dibubarkan).

13. PT Industri Soda Indonesia (dalam likuidasi) / PT ISI

Berdasarkan Keputusan RUPSLB PT ISI tanggal 9 Oktober 2007 telah ditetapkan pembubaran dan status PT ISI sebagai perusahaan dalam likuidasi yang berlaku efektif terhitung sejak ditetapkannya pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2008, telah ditetapkan pembubaran PT ISI dan untuk menuntaskan pelaksanaan likuidasi telah dibentuk Tim Likuidasi. Pekerjaan Tim Likuidasi pada prinsipnya hanya tinggal memproses penjualan tanah dan bangunan yang telah beberapa kali pelelangan melalui Kantor Lelang Negara namun belum terjual. Tugas yang harus diselesaikan Tim Likuidasi adalah penjualan 2 (dua) aset, yaitu Tanah di Pasuruan Jawa Timur, yang saat ini sedang dalam proses perpanjangan sertifikat tanah dan rumah Dinas di Rawamangun.



B. KEGIATAN PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN BUMN

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Informasi Keuangan BUMN, Kementerian BUMN dibantu oleh Persekutuan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja selaku konsultan independen yang terpilih melalui proses seleksi/lelang umum. Dalam rangka efektivitas penyusunan informasi keuangan, melalui Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha atas nama Menteri BUMN Nomor SK-22/MBU/D6/05/2016 tanggal 4 Mei 2016, telah dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Informasi Keuangan BUMN yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan masing-masing Eselon I di Kementerian BUMN. Selain itu, untuk memastikan partisipasi aktif seluruh BUMN dalam mendukung penyusunan informasi keuangan,

melalui Keputusan Nomor SK-138/MBU/07/2016 tanggal 12 Juli 2016, Menteri BUMN telah membentuk Tim Penyusunan Informasi Keuangan yang keanggotaannya terdiri dari seluruh Direktur Utama BUMN dan Direktur yang membidangi Keuangan.

Kegiatan Penyusunan Informasi Keuangan BUMN tahun 2016 menghasilkan keluaran sebagai berikut:

- a. Rekomendasi dan hasil high level gap analysis pengembangan teknologi informasi di Kementerian BUMN untuk mendukung proses penyusunan Informasi Keuangan BUMN.

No	Kelompok Pengembangan	Analisa Kesenjangan
1	Restruktur basis Data	Perbaikan dan restrukturisasi basis data diperlukan untuk mengatasi redundansi serta memperbaiki pengelompokan akun secara otomatis.
2	Master data User	a. Pembuatan master data user memungkinkan pengadaan <i>User audit trails</i> yang komprehensif, yang dapat memberikan informasi login, lokasi, dan detail aktifitas pengguna. b. Master data user akan mendukung fungsi penjadwalan pelaporan.
3	Master data Scheduling	Jadwal pelaporan informasi keuangan yang berdekatan, memerlukan deteksi resiko <i>bottleneck</i> pada sistem (CPU atau I/Q) sehingga dapat diminimalisir dengan algoritma distribusi beban kerja sistem.
4	Proses MAC	Dengan algoritma MAC, keutuhan data dapat diyakini dengan memastikan data terkirim sama dengan data yang diterima.
5	Master data BUMN	a. Dengan pembuatan <i>unique key</i> transaksi BUMN, saldo dan transaksi antar BUMN bisa teridentifikasi. b. Memungkinkan dilakukannya proses eliminasi saldo

No	Kelompok Pengembangan	Analisa Kesenjangan
		dan transaksi untuk menunjang proses penyusunan informasi keuangan gabungan.
6	Master data Akun	a. Pembuatan master data akun, mempermudah BUMN dalam Melakukan pelaporan informasi keuangan b. Pengelompokan dan glosarium akun memberikan paduan pengisian yang komprehensif untuk BUMN
7	Pengaturan Tupoksi	Pengembangan aturan dan kontrol pelaporan yang dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan gabungan di Kementerian BUMN.
8	Maintenance	Berdasarkan <i>leading practice</i> untuk perangkat lunak di level korporasi, diperlukan pengadaan dukungan teknis terkait basis data dan sistem operasi yang digunakan oleh FIS
9	Security	a. Pemasangan metode dan perangkat enkripsi pada FIS dapat meningkatkan keamanan informasi keuangan dan informasi sensitif lainnya b. Penetration test perlu dilakukan untuk memastikan tingkat keamanan yang mencukupi

- b. Format *reporting package* Informasi Keuangan BUMN beserta manual pengisian.

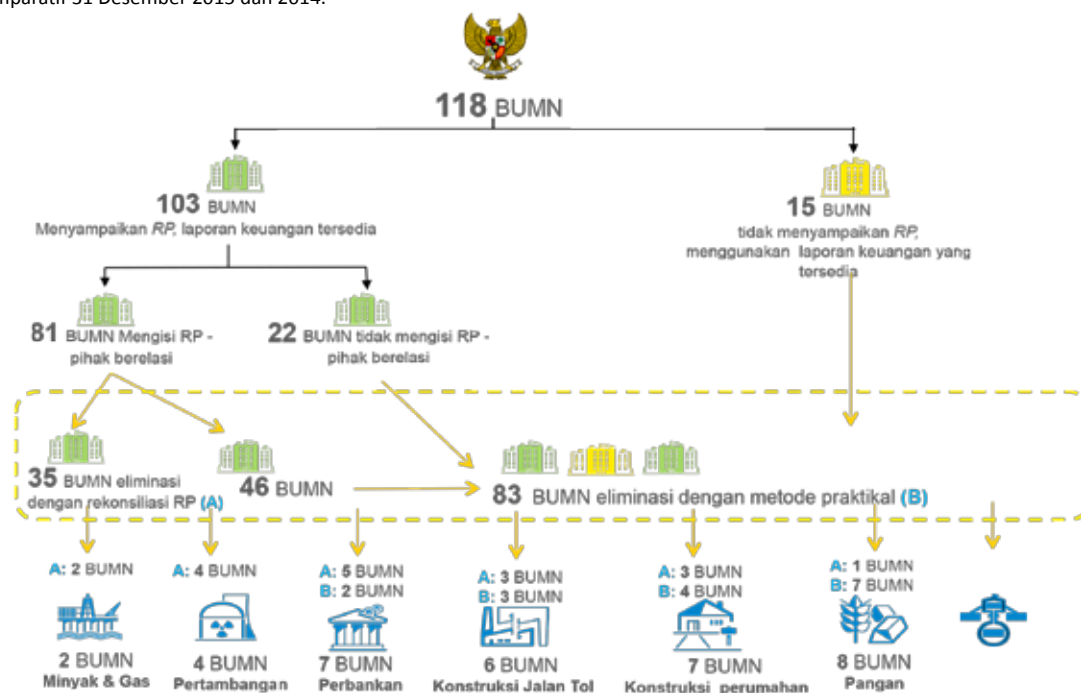
Gambaran Umum

Penyusunan Informasi Keuangan BUMN menggunakan *tool* yang dinamakan paket laporan (*reporting package*). Paket laporan merupakan suatu *template* standar input yang didesain sedemikian rupa untuk dapat mengumpulkan informasi keuangan dan non-keuangan dari masing-masing BUMN sehingga dapat digunakan untuk menyusun Informasi Keuangan BUMN dengan memperhatikan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7. Paket laporan dirancang dalam satu kesatuan formulir yang dapat digunakan oleh semua BUMN dari berbagai sektor usaha.

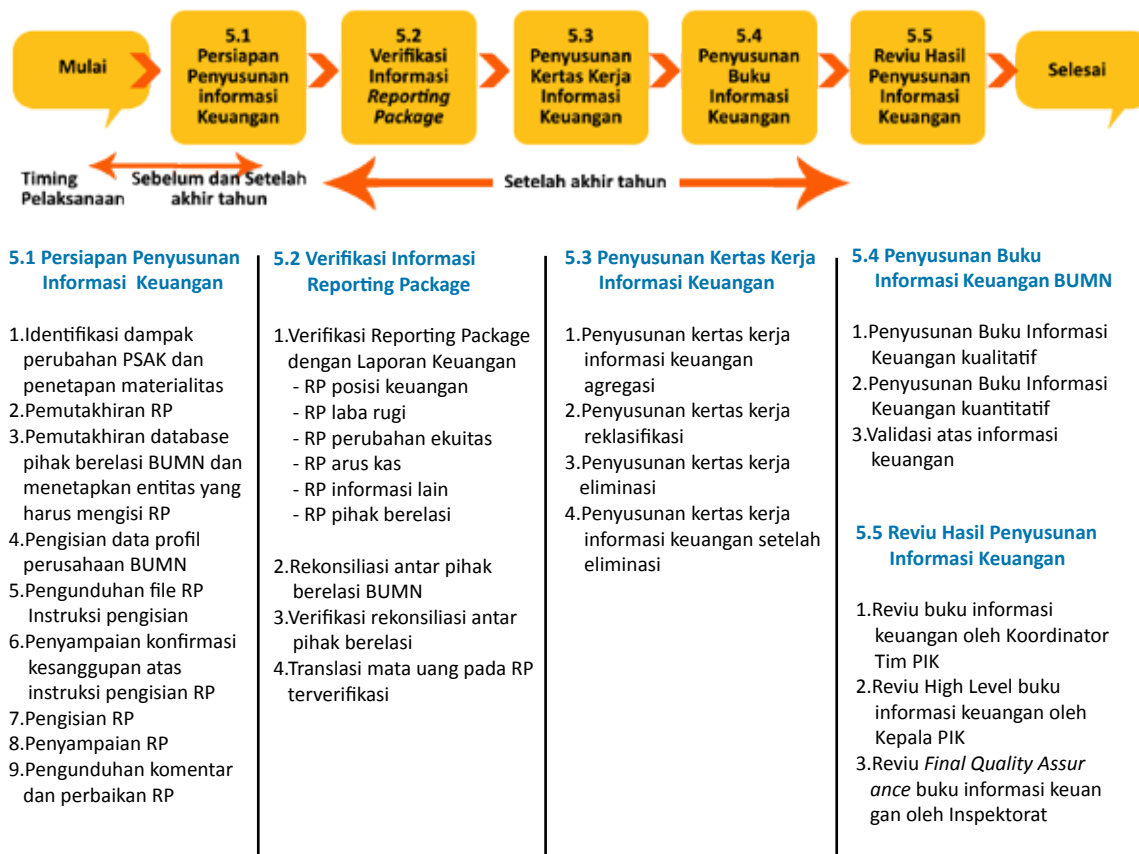
No	Aktivitas	Waktu
1.	BUMN mengunduh <i>reporting package</i>	12 Agustus
2.	BUMN menyampaikan <i>acknowledgment</i> Pengisian <i>reporting package</i>	15 Agustus
3	BUMN mengisi <i>reporting package</i>	12 -19 Agustus
4	BUMN menyampaikan <i>reporting package</i> disertai surat pernyataan persetujuan direksi	Maks. 19 Agustus
5	Validasi <i>reporting package</i> oleh EY	19 - 26 Agustus



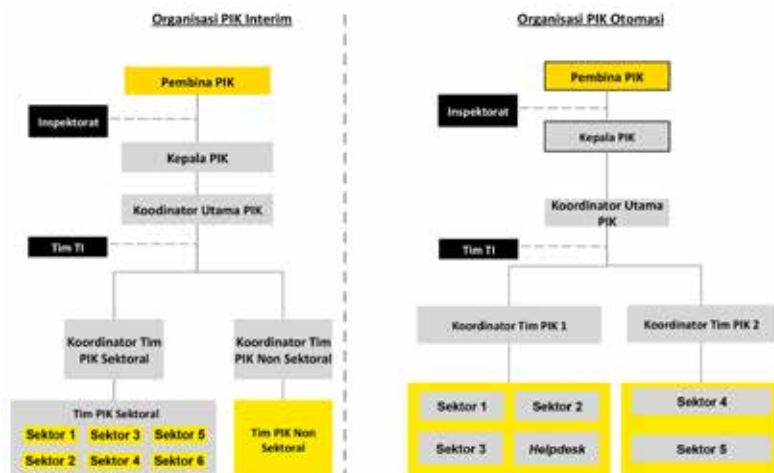
- c. Informasi Keuangan BUMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta informasi keuangan komparatif 31 Desember 2015 dan 2014, dari minimal 40 BUMN, yang merepresentasikan kurang lebih 95% total aset dan laba bersih dari seluruh BUMN, serta mewakili semua sektor dari 24 sektor usaha yang ada.
- d. Informasi Keuangan BUMN per sektor usaha untuk 6 sektor usaha yang terpilih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta informasi keuangan komparatif 31 Desember 2015 dan 2014.



- e. Standard Operating Procedures (SOP) penyusunan Informasi Keuangan BUMN



f. Rekomendasi kebutuhan unit organisasi yang bertanggung jawab atas tersusunnya Informasi Keuangan BUMN.



Jabatan Struktural	Eselon	Grading
Kepala PIK	II	15
Koordinator Utama PIK	III	10-12
Koordinator Tim PIK	IV	8-9

Posisi	Jabatan Fungsional		
	Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan
Senior	Pertama (Fungsional Keahlian)	Penata Muda Tingkat I	III/b
Staff	Pertama (Fungsional Keahlian)	Penata Muda	III/a

Rekomendasi: Sumber Pemenuhan Tenaga Kerja - Interim

Sumber pemenuhan tenaga kerja untuk tim PIK Merujuk kepada :

- Hasil diskusi EY dengan Kementerian BUMN mengenai pengadopsian Fase TI (FO-F3)
- Ketersediaan Internal Talent Pool di Kementerian BUMN yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan fungsi PIK
- Analisis beban kerja
- Analisis risiko fungsi kerja PIK
- Analisis biaya, *operational excellence*, pemenuhan kompetensi

Maka berdasarkan rujukan diatas pemenuhan tenaga kerja tim PIK akan dilakukan dengan rekomendasi :

- Menempatkan fungsi kerja kepala PIK, Koordinator PIK dan Koordinator Tim kepada jabatan yang ada saat ini di KBUMN
- Merekrut orang baru secara profesional
- Melakukan *Project based Outsourcing*

g. Kegiatan Alih Pengetahuan terkait Penyusunan Informasi Keuangan BUMN Terdapat 3 kegiatan alih pengetahuan yang telah dilaksanakan, yaitu:

- Sosialisasi pengisian Reporting Package pada tanggal 10-11 Agustus 2016 bertempat di Ballroom Mezannine Gedung Pertamina Pusat, Jakarta.
- Sharing Knowledge PSAK terkini Penyusunan Informasi Keuangan BUMN pada tanggal 15 November 2016 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta.
- Pelatihan Penyusunan Informasi Keuangan BUMN pada tanggal 1-2 Desember 2016 bertempat di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta.

C. PERKEMBANGAN AKSI DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS TAHUN 2016

- Bersama Biro Hukum menyusun konsep Peraturan Menteri BUMN yang mengatur kriteria BUMN dalam restrukturisasi atau selesai dilakukan restrukturisasi beserta SOP yang mengatur kriteria tersebut, berkoordinasi dengan Deputi Teknis perihal BUMN yang selesai direstrukturisasi dan yang masuk kriteria direstrukturisasi. Perkembangan sampai dengan saat ini telah dikirim Nota Dinas kepada Kepala Biro Hukum No. ND-97/D6.MBU.1/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 untuk menyampaikan kembali usulan pokok-pokok materi untuk penyusunan Peraturan Menteri BUMN yang sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya.
- Menyusun alternatif solusi terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT Prasadha Pamunah Limbah Industri. Sampai dengan

Rekomendasi : Sumber Pemenuhan Tenaga Kerja - Otomasi

Komponen pembagian Sektor PIK berdasarkan kedeputan (Dapat berubah sesuai dengan perkembangan organisasi di Kementerian BUMN)

Sektor 1 (15 BUMN)

- Perkebunan
- Pertanian dan Perikanan
- Kehutanan
- Farmasi

Sektor 2 (14 BUMN)

- Minyak dan Gas
- Kelistrikan
- Perdagangan dan Lainnya
- Pergudangan dan Distribusi
- Pariwisata

Sektor 3 (26 BUMN)

- Baja dan Industri Strategis
- Percetakan dan Kertas
- Media dan Telekomunikasi
- Semen

Sektor 4 (30 BUMN)

- Konstruksi
- Sarana dan Prasarana Hubungan Laut
- Perumahan dan Kawasan
- Konsultan Konstruksi

Sektor 5 (33 BUMN)

- Sarana dan Prasarana Hubungan Darat
- Sarana dan Prasarana Hubungan Laut
- Perbankan
- Asuransi
- Investasi
- Sertifikasi

Komposisi jumlah tim per sektor

sektor 1 dan 2 = @Senior 1 dan Staf 1 Orang

sektor 3 dan 4 = @Senior 2 dan Staf 2 Orang

sektor 5 = @Senior 3 dan Staf 3 Orang

Helpdesk = 1 Staf

Total kebutuhan Staf PIK KBUMN Mandiri 19 Orang

saat ini sedang dilakukan kajian alternatif pembelian saham PT PPLI oleh BUMN yang selama ini menjadi customer base PT PPLI, antara lain: PT Pertamina, PT PLN, PT Antam, PT Bukit Asam, dan lain-lain.

- Menyusun alternatif solusi terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Primmisima. Sampai dengan saat ini sedang dilakukan kajian penjajakan penjualan saham kepada Pemerintah Provinsi di Yogyakarta dan kemungkinan inbreng kepada PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.
- Menyusun alternatif solusi permasalahan restrukturisasi PT Nindya Karya terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya yang mengamanatkan agar paling lambat tahun 2020 PT Nindya Karya kembali dimiliki 100% oleh Negara. Pada Tahun 2016 telah dilakukan pembahasan bersama manajemen PT Nindya Karya dan PT PPA, dengan hasil berupa 2 (dua) alternatif solusi exit strategy restrukturisasi, yaitu:
 - Alternatif 1 : IPO (Initial Public Offering).

2. Alternatif 2 : Divestasi saham PT PPA kepada strategic investor/ BUMN lain. Penjelasan selengkapnya diuraikan pada Sub Bab Perkembangan Restrukturisasi.
5. Menyusun alternatif solusi permasalahan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Istaka Karya (Persero). Sampai dengan saat ini perkembangannya revisi data hutang kreditur telah disepakati dengan Kementerian Keuangan untuk menggunakan data audit yakni sebesar Rp602,90 Miliar dalam rangka pemrosesan RPP. PT Istaka Karya (Persero) diminta untuk melakukan konfirmasi dan surat pernyataan/perjanjian dengan kreditur yang belum masuk homologasi.
6. Memonitor dan mengevaluasi rencana penggunaan dana PMN sebesar Rp350 Miliar untuk pembelian kapal baru dan perbaikan kapal-kapal milik PT Djakarta Lloyd serta mengevaluasi dan melakukan RUPS pertanggungjawaban atas Laporan Tahunan 2008 – 2015, serta menyerahkan pembinaan PT DL kepada unit teknis setelah dinilai sehat. Perkembangan sampai dengan saat ini sedang menunggu pendapat hukum dari Deputy Infrastruktur Bisnis atas rencana penggunaan dana PMN yang akan dilaksanakan oleh Direksi.
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan pengadilan atas penjualan aset pabrik Tohpati di Bali dan aset scrap, serta memonitor dan mengevaluasi dana hasil penjualannya digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Perkembangan sampai dengan saat ini sudah lelang dua kali namun gagal. Pengumuman lelang penjualan aset Tohpati yang ketiga akan dijadwalkan pada awal Maret 2017.
8. Memonitor pembayaran Hak – Hak Normatif (H2N) karyawan perusahaan, mencari investor strategis di bidang industri gelas, properti maupun industri lainnya dalam rangka pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi PT Iglas tahun 2016, serta memonitor dan mengevaluasi penyelesaian sengketa aset Ngagel antara PT Iglas dengan Pemkot Surabaya. Sampai dengan akhir tahun 2016, H2N karyawan perusahaan sudah dapat dibayarkan semua dengan dibantu dana talangan dari PT PPA. Terkait dengan permasalahan aset PT Iglas di Ngagel Surabaya, saat ini Direksi sedang menunggu pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk memperjelas status aset Ngagel.
9. Memonitor dan mengevaluasi penggunaan dana PMN sebesar Rp1.000 Miliar kepada PT PPA, serta mengevaluasi dan memberikan rekomendasi jika terdapat usulan perubahan penggunaan dana PMN baik di PT PPA maupun alokasi dana R/R untuk BUMN tidak sehat. Sejauh ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana PMN dan disampaikan tanggapan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui surat No. S-381/MBU/D6/06/2016 tanggal 24 Juni 2016. Sampai dengan Tahun 2016 Kementerian BUMN telah memberikan persetujuan atas realokasi dana PMN PT PPA untuk kegiatan R/R PT Iglas sebesar Rp170 Miliar.
10. Memonitor pelaksanaan Program Penanganan Karyawan PT MNA, serta melakukan sosialisasi program tersebut kepada seluruh stakeholder, mengevaluasi proposal pencairan investor strategis di bidang angkutan udara, serta memonitor perkembangan anak perusahaan (PT MMF dan PT MMC). Sampai dengan Tahun 2016 telah dilakukan pembahasan dengan stakeholder terkait penanganan karyawan PT MNA dan dikirimkan tanggapan, antara lain kepada staf khusus Presiden (surat No. S-543/MBU/D6/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016), Dirjen PHI (surat No. S-43/D6.MBU/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016), Kementerian Sekretariat Negara (surat No. S-52/D6.MBU/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016). Terkait pengembangan anak perusahaan (PT MMF dan PT MTC) telah dilakukan penandatanganan MoU antara PT MMF dengan PT GMF pada tanggal 12 November 2016.
11. Memonitor dan mengevaluasi penanganan karyawan PT Kertas Leces, inventarisasi aset perusahaan, dan mengevaluasi proposal pencairan investor strategis melalui mekanisme privatisasi. Sampai dengan Tahun 2016 telah dilakukan pendataan aset terutama tanah dan bangunan, di mana PT Kertas Leces memiliki 28 (dua puluh delapan) sertifikat dengan berbagai status.
12. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama pembangkit listrik PT KKA, dan mengevaluasi proposal pencairan investor untuk pengoperasian kembali pabrik kertas (paper mill). Sampai dengan Tahun 2016, program kerjasama pembangkit listrik telah berjalan dengan baik dan menghasilkan listrik dengan daya 20 MW. Terkait pengoperasian kembali pabrik, saat ini masih dilakukan pembahasan intensif dengan PT Semen Indonesia agar dapat berperan serta sebagai investor.
13. Memonitor dan mengevaluasi kajian R/R PT Penas, termasuk usulan pencairan dana R/R dari PT PPA, serta mengevaluasi usulan pendirian anak perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2016 telah beberapa kali dilakukan pembahasan kajian R/R PT Penas, namun masih perlu penyesuaian opsi-opsi yang akan ditempuh kedepan. Terkait pendirian anak perusahaan, saat ini proposal belum disampaikan kepada RUPS masih dalam kajian manajemen.
14. Pelaksanaan kegiatan dengan dibantu oleh konsultan/pihak independen:
 - a. Menyusun Informasi Keuangan BUMN dengan dibantu oleh Persekutuan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja selaku konsultan independen, dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 8 bulan (30 April s.d. 30 Desember). Sampai dengan akhir tahun 2016, konsultan telah menyampaikan hasil pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - b. Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 untuk 3 BUMN dalam restrukturisasi yang kondisinya keuangannya sulit, yaitu PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Leces dan PT Kertas Kraft Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2016 pekerjaan audit laporan keuangan ke-3 BUMN dimaksud telah diselesaikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Audit laporan keuangan tahun buku 2015 PT Kertas Kraft Aceh oleh KAP Djoko, Sidik & Indra diselesaikan pada tanggal 19 Oktober 2016.
 2. Audit laporan keuangan tahun buku 2015 PT Merpati Nusantara Airlines oleh KAP Rama Wendra diselesaikan pada tanggal 9 November 2016.
 3. Audit laporan keuangan tahun buku 2015 PT Kertas Leces oleh KAP Hendrawinata, Eddy, Sidharta & Tanzil diselesaikan pada tanggal 23 November 2016.

Kementerian BUMN mengelola 2 DIPA yaitu DIPA Reguler Kementerian BUMN dan DIPA PMN

Realisasi anggaran Kementerian BUMN TA 2016 adalah sebesar Rp.178,8 Miliar (93,7%) dari total pagu anggaran tahun 2016 setelah *selfblocking* sebesar Rp. 190,8 miliar

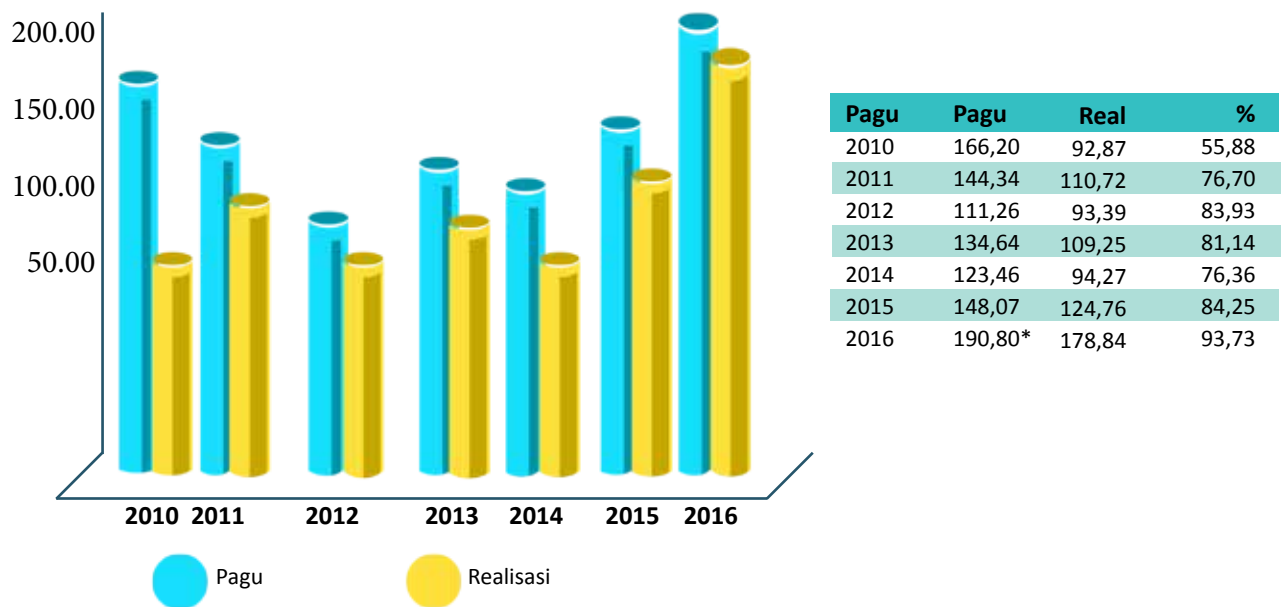
Program	Pagu APBNP	Self Blocking	Sisa Pagu	Real	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7=5/4)
Program Dukungan Manajemen	135,4	20,1	115,3	107.7	93,4%
Program Pembinaan BUMN	114.5	39.0	75.5	71.1	94,2%
Total	249.9	59.1	190.8	178.8	93,7%

Realisasi anggaran Kementerian PMN TA 2016 adalah sebesar Rp. 44.361 miliar atau 99,9% dari total pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp.44.378,6 sesuai dengan realisasi *Right Issue* (HMETD) 4 BUMN Tbk.

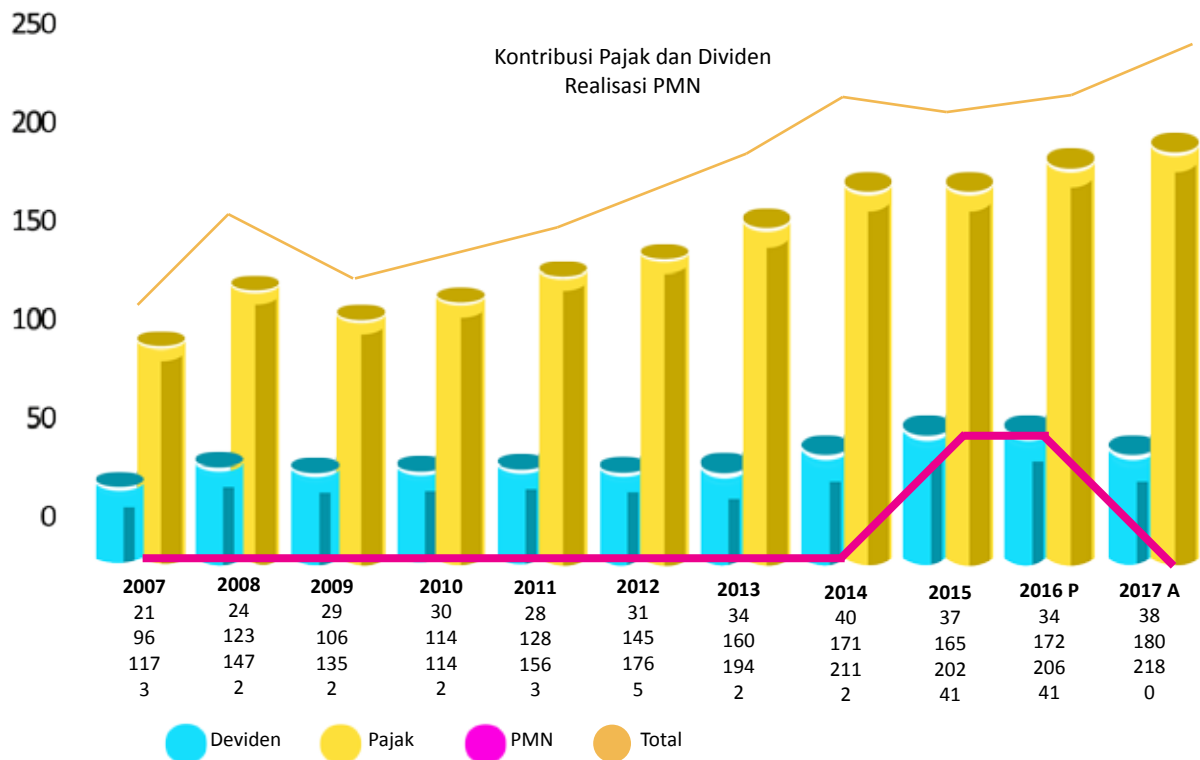
Uraian	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
PMN Tunai	41.810,0	41.809,9	99,9%
PMN Non Tunai	2.568,6	2.551,1	99,3%
Total	44.378,6	44.361,0	99,9%

Target Penyerapan Anggaran dalam Renstra 2015 - 2019 adalah > 90%

Unit Kerja	Pagu Setelah Self Blocking	Realisasi	Persentase
Sekretariat Kementerian BUMN	115.302.471	107.749.745	93,4%
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi	2.754.160	2.658.683	96,5%
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Perhubungan	3.520.998	3.370.202	95,7%
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media	7.498.397	7.242.428	96,5%
Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana			
Perhubungan	4.027.357	3.920.867	97,3%
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey Dan Konsultan	2.996.288	2.895.049	96,6%
Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha	19.015.686	17.928.860	94,2%
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis	35.683.824	33.084.237	92,7%
	190.799.181	178.840.073	93,7%



Total kontribusi BUMN terhadap APBN berupa pajak dan dividen apabila dibandingkan dengan jumlah tambahan PMN selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada data dan grafik berikut ini.





D. BUMN HADIR UNTUK NEGERI

Kemerdekaan Indonesia dapat terwujud karena komitmen yang sangat kuat para pendahulu kita untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajahan yang telah lama menyengsarakan. Oleh karena itu, dalam peringatan Kemerdekaan ini, kita sewajarnya berkomitmen juga untuk memerdekakan diri dari zona nyaman yang menghambat kemajuan. Komitmen untuk berubah untuk menjadi lebih baik adalah wujud lain dari perjuangan kemerdekaan. Perayaan 70 Tahun Indonesia Merdeka, harus dijadikan tonggak BUMN untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat. BUMN harus hadir langsung di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian BUMN menginisiasi program "BUMN hadir untuk negeri" yang diselenggarakan oleh seluruh BUMN secara serentak di 34 provinsi diseluruh tanah air, yang menjadi pertanda pula bahwa seluruh BUMN dapat bersinergi untuk membangun negeri.

Serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: program sembako murah, bedah rumah veteran, bantuan penambahan fasilitas laboratorium SMK; jalan sehat dan berbagai perlombaan, serta program lainnya, termasuk pemutaran film dengan tema nasionalisme. BUMN juga menyelenggarakan program "Siswa Mengenal Nusantara" dengan kegiatan "Pertukaran Pelajar SMU seluruh Nusantara 2015" di 34 Provinsi seluruh Indonesia, dengan tema "Indonesia Negeri Kebanggaanku", merupakan perwujudan kontribusi BUMN dalam berperan dan membangun capacity building melalui generasi penerus bangsa. Selain itu, Program BUMN mengajar diharapkan dapat memberikan wawasan dan kecintaan masyarakat terhadap BUMN serta menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi muda kita. Marilah kita mengingat pesan Bung Karno pada Sewindu Peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1953, "Kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan.

AYO KERJA untuk bangsa! AYO KERJA untuk negara!

AYO KERJA untuk rakyat!"

Siswa Mengetahui Nusantara

Indonesia merupakan sebuah negeri yang berlimpah kekayaan alam dan dihiasi dengan berbagai keragaman, mulai dari ribuan pulau yang menghiasi khatulistiwa, dengan ragam budaya, bahasa daerah, suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan, dan lain-lainnya, namun mampu tegak berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Tujuan Kegiatan SMN adalah untuk menanamkan rasa bangga sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan Nusantara, melalui proses pertukaran informasi dan kebudayaan. Kegiatan ini menjadi bagian dalam "membangun pemahaman para pemangku kepentingan (stakeholders)" mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN dalam turut serta "Membangun Kapasitas Nasional (National Capacity Building) melalui generasi muda penerus bangsa". Program ini telah dimulai sejak Tahun 2015 dan diharapkan menjadi kegiatan rutin tahunan yang akan dilakukan secara reguler di tahun-tahun mendatang, sehingga menjadi sebuah program yang berkelanjutan. Pada tahun 2015, program ini melibatkan diikuti oleh 632 siswa/siswi SMA dengan biaya sekitar Rp16,4 miliar.

Bedah Rumah Veteran

Sebagai warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah serta berperan secara aktif dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih banyak para veteran yang dihari tuanya mengalami kesulitan, khususnya belum memiliki tempat tinggal yang layak. Kegiatan Bedah Rumah Veteran merupakan bentuk kontribusi nyata bagi para veteran sebagai bentuk ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan. Tujuan Kegiatan Bedah Rumah Veteran adalah meningkatkan rasa penghargaan pada para Pahlawan atas jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kegiatan ini menjadi bagian dalam membangun pemahaman para pembangun kepentingan (stakeholders) mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN dalam turut serta kontribusi



nyata pada masyarakat. Dengan demikian, para veteran maupun pemangku kepentingan akan memiliki pandangan yang baik tentang Kementerian BUMN dan seluruh BUMN Indonesia, yang telah berperan dalam kontribusi pada masyarakat sekitar. Pada tahun 2015 jumlah Rumah Veteran yang berhasil diperbaiki dalam program ini sebanyak 919 dengan nilai maksimal masing-masing bedah rumah sederhana Rp 40 juta per rumah. Total biaya pelaksanaan program Bedah Rumah Veteran sebanyak Rp 33,9 miliar.



BAB 04

**CAPAIAN BUMN
SEBAGAI AGENT OF
DEVELOPMENT
YANG BESAR, KUAT
DAN LINCAH**





Capaian BUMN sebagai Agent of Development yang Besar, Kuat dan Lincah

BUMN melakukan ekspansi usaha hingga ke mancanegara; dengan pembukaan kantor, menjual Produk berupa vaksin, pelumas, gerbong kereta api, kapal laut dan pesawat terbang.

Ekspansi dan Kompetisi BUMN di pasar global



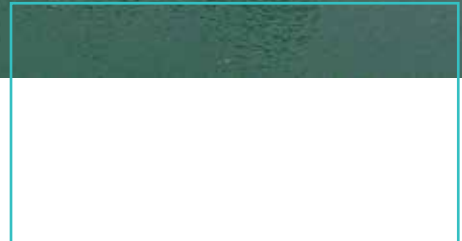
BUMN mendukung konektivitas maritim Nusantara dengan penambahan pelabuhan penyebrangan, rute pelayaran, jumlah kapal dan juga mengembangkan 24 pelabuhan strategis, di mana 9 berlokasi di Indonesia Bagian Timur.

a. Mewujudkan Indonesia Sebagai poros Maritim Dunia





Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia





b. Mengembangkan Konektivitas Udara

Dalam konteks konektivitas udara, BUMN telah mampu meningkatkan pelayanan bandara untuk 145 juta penumpang dan Garuda Group telah mengangkut 40 juta penumpang



c. Layanan Transportasi Publik BUMN

Penumpang Terangkut		
Kereta Api	Pelayaran	Penyebrangan
2016 - 352 Juta	2016 - 4,5 Juta	2016 - 6,6 Juta
2017 - 366 Juta	2017 - 4,6 Juta	2017 - 8,5 Juta

Garuda Grup pada tahun :

1. 2016 40 juta penumpang per tahun 787 Penerbangan per hari.
2. 2017 42 juta Penumpang per tahun 880 Penerbangan per hari.
3. 2018 52 juta penumpang per tahun 1.150 Penerbangan per hari
4. 2019 60 juta penumpang per tahun 1,320 Penerbangan per hari





d. Mengembangkan Konektivitas Darat

Dalam mendukung konektivitas darat, BUMN sudah mulai membangun penambahan jalan tol sepanjang 1.260km sehingga pada akhir tahun 2019 BUMN telah dapat mengoperasikan lebih dari 2.000 km.





pada akhir tahun 2019
BUMN telah dapat mengoperasikan
lebih dari 2.000 km.

e. BUMN Mendukung Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat

Dengan Program Pemerintah “Sejuta Rumah”, BUMN mendukung program ini dengan memberikan pembiayaan sebanyak 668ribu unit dan pada tahun 2018 ditargetkan akan membiayai lebih dari 1 juta unit rumah



2015

538.000 rumah
Kontribusi BUMN 76,95%

2016

668.000 rumah
Kontribusi BUMN 82,96%

2017

Target 842.000 rumah
Kontribusi BUMN 84,24%

2018

Target 1.010.000 rumah
Kontribusi BUMN 101%



f. Mewujudkan Keadilan Sosial

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, pada tahun 2016 BUMN telah mengimple mentasikan program BBM Satu Harga di Papua dan Kalimantan Utara. Pada tahun 2017 BUMN akan mengimplementasikan program “Satu Harga”, bukan hanya untuk BBM saja tetapi juga untuk produk Semen, Beras, Gula dan Minyak Goreng di seluruh Nusantara.





g. Menerangi Bumi Nusantara

Melalui Program 35Ribu MW, BUMN terus membangun infrastruktur kelistrikan untuk menerangi masyarakat di seluruh Indonesia. Daya terpasang pada tahun 2016 mencapai 55 ribu MW, naik 7% dibanding akhir tahun 2014 dan jaringan transmisi mencapai 44 ribu km sirkuit, naik 9% dibanding tahun 2015.





h. Membangun Tulang Punggung Infrastruktur Digital Indonesia

Dalam meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, pada tahun 2016 BUMN telah memiliki jaringan serat optik sepanjang 106ribu km dan 129ribu menara BTS yang menjangkau 70 ribu desa.





i. Inklusi Keuangan Untuk Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan

Dalam Program Inklusi keuangan, Himbara telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp93T kepada 4 juta Usaha Mikro dan Kecil dan telah meluncurkan Kartu Tani dan Kartu Keluarga Sejahtera.

BUMN juga mengeluarkan Program “MEKAAR” yang merupakan program pembiayaan mikro khusus untuk ibu-ibu prasejahtera yang produktif tapi belum bankable, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong pertumbuhan perekonomian berbasis kerakyatan. Jumlah nasabah MEKAAR telah mencapai 432 ribu ibu-ibu dan akan ditingkatkan menjadi 2 juta pada 2017.

j. Sinergi BUMN

BUMN juga bersinergi untuk membantu “UMKM naik kelas” melalui pembentukan Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang pada tahun 2016 sudah terbangun 100 RKB di kabupaten/kota. Pada tahun 2017 ditargetkan RKB dibangun di setiap kabupaten/kota diseluruh Indonesia.





k. Ketahanan Pangan

Dalam rangka program ketahanan pangan, BUMN telah membangun Rumah Pangan Kita sejumlah 6ribu dan ditargetkan menjadi 30ribu di tahun 2017. BUMN juga mengimplementasikan program peningkatan produksi gula dari 1,2juta ton di tahun 2016 menjadi 2,1juta ton pada tahun 2019.

L. RoadMap BUMN 2019

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi, program holding yang kami harapkan dapat terselesaikan di tahun 2016 masih belum terealisasi. Kami targetkan 6 holding yaitu Migas, Tambang, Perbankan dan Jasa Keuangan, Perumahan, Konstruksi dan Jalan Tol serta Pangan akan terealisasi di tahun 2017. Program holdingnisasi ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan BUMN dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Komitmen BUMN di tahun 2017 maupun tahun-tahun mendatang tidak lagi membebani APBN, tetapi justru meningkatkan kontribusi BUMN kepada APBN yang ditargetkan mencapai Rp 385 Triliun di tahun 2019. Pembentukan holding juga mendukung target kita untuk mendorong 6 BUMN masuk ke Fortune 500 Global



BAB 05

PENUTUP





Laporan Kinerja Kementerian BUMN ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian BUMN menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya, Kementerian BUMN telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi dimana Kementerian/Lembaga dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya, tugas Kementerian BUMN dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparatur Kementerian BUMN telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada tahun 2016 yang sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa IKU belum mencapai target yang ditentukan.

Langkah ke depan yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja aparatur Kementerian BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan BUMN antara lain dengan perubahan budaya dan pola kerja dan peningkatan kualitas dan kapasitas selaku Pembina BUMN;
2. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Negara melalui peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sebagai salah satu wujud dari pengelolaan Negara yang akuntabel. Di samping itu, Kementerian BUMN akan terus melakukan monitoring, review dan tindak lanjut atas setiap temuan audit BPK RI;
3. Melakukan perbaikan-perbaikan sistem dan pengelolaan manajemen kinerja sehingga kinerja setiap unit dan individu dapat terukur serta dapat diberikan reward dan punishment yang sesuai;
4. Melakukan penyempurnaan peraturan tentang akuntabilitas kinerja di internal Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri dan mensosialisasikannya ke seluruh pegawai agar dilaksanakan dan diterapkan dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Meningkatkan keterlibatan setiap pegawai dalam mendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan menjadikannya sebagai bagian dari kinerja. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kementerian BUMN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Kementerian BUMN dapat semakin berperan membawa BUMN dalam kancah persaingan global.

Jakarta, 20 Februari 2017
Menteri Badan Usaha Milik Negara



Rini M. Soemarno



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

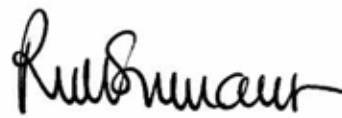
Nama : Rini M. Soemarno

Jabatan : Menteri BUMN

Pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2016

Menteri Badan Usaha Milik Negara



Rini M. Soemarno



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya BUMN sebagai <i>Agent of Development</i> yang besar, kuat dan lincah	Jumlah Aset BUMN	5.632 T Rupiah
		Jumlah Laba BUMN	143 T Rupiah
		Jumlah Ekuitas BUMN	1.340 T Rupiah
		Jumlah Capex BUMN	401 T Rupiah
		BUMN Yang Masuk Global Fortune 500	3 BUMN
		Kontribusi BUMN Terhadap Negara	244 T Rupiah
		Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)	35 BUMN masuk kategori Good Performance
		Persentase Pencapaian Roadmap BUMN	25 %
		Tercapainya SLA Penugasan PSO	93 %
2	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN	Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	84 %
		Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait /stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN	82 %
3	Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN	Nilai rata-rata GCG BUMN	83
		Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	100 %
		Persentase kepatuhan proses operasional BUMN	100 %
		Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	100 %

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif	Terpenuhinya Batas Waktu Penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)	100% Agustus 2016
		Presentase hasil riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan	≥80 %
		Persentase Kebijakan Kementerian BUMN dengan Pencapaian Visi dan Misi Presiden	100 %
5	Pembinaan BUMN yang optimal	Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan	100% respons sesuai batas waktu dalam standar layanan
		Penetapan Direksi Sesuai dengan Peraturan	100% penetapan direksi sebelum masa jabatan Direksi berakhir
		Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu	100% penyelenggaraan RUPS tepat waktu
		Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN	100 %
6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian LHP BPK	100 %
		Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	100 %
7	Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	83 %
		Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan	60 %
		Persentase pelaksanaan diklat yang sesuai dengan Training Needs Analysis (TNA)	≥90 %

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern	Persentase Pencapaian Road Map Transformasi Organisasi	25 %
9	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	70
		Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	70
		Nilai Inisiatif Anti Korupsi	73
10	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal	85 %
		Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi	≥90 %
		Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5)	Rata-rata skala 4
		Persentase downtime layanan TIK	≤3 %
11	Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel	Persentase Pemanfaatan Anggaran	≥90 %
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP Opini BPK

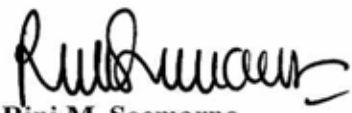
Program

Anggaran

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN | Rp165.857.092.000,00 |
| 2. Program Pembinaan BUMN | Rp179.142.908.000,00 |
| Total Anggaran | Rp345.000.000.000,00 |

Jakarta, Januari 2016

Menteri Badan Usaha Milik Negara


Rini M. Soemarno